

KESIAPAN MADRASAH DALAM PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Oleh: Nurudin

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Jln. M.H. Thamrin 6 Jakarta.

Email: dklaros@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to determine: 1) local government policies in the implementation of 12-year compulsory education, 2) policies of the Ministry of Religious Affairs on the implementation of 12-year compulsory education in Madrasah Aliyah (Islamic Senior High School) and 3) the readiness of Islamic Senior High School in infrastructure, financial, and educational staff aspects of 12-year compulsory education. This study used the qualitative approach with a policy analysis. Data sources were obtained and collected from interviews, observation and documentation. The findings included: completion of 9-year compulsory education at Elementary School/ Islamic Elementary School and Junior High School / Islamic Junior High School in Districts / Cities of the study target areas completed, except for a small portion of areas whose GER and NER have not met 95% as pilot program requirements of 12-year compulsory education. Policies of Provincial, District, and City Governments have largely led to the pilot program of 12-year compulsory education. Meanwhile, the policies of the Ministry of Religious Affairs had not prepared the regulatory device, either regulations, guidelines or other technical guidance related to the pilot program of 12-year compulsory education in Islamic Senior High School. The aspect of the availability of infrastructure and facilities in Public Islamic Senior High School is adequate and appropriate to the national standards, whereas most Private Islamic Senior High School does not meet minimum standards based on the standardized infrastructure and facilities. Meanwhile, for the financing aspect, no balance between revenue and expenditure is yet found, especially at Private Islamic Senior High School annually.

Keywords: *Compulsory Education, Madrasah (Islamic Schools), Education Access*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) kebijakan Pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan wajib belajar 12 Tahun, 2) kebijakan Kementerian Agama terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Madrasah Aliyah dan 3) kesiapan Madrasah Aliyah dalam aspek sarana-prasarana, pembiayaan, dan tenaga kependidikan dalam program wajib belajar 12 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan (policy analysis). Sumber data digali dan dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan antara lain: Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten/Kota pada daerah sasaran penelitian telah tuntas, kecuali sebagian kecil daerah yang APK dan APM belum memenuhi 95% sebagai sarat rintisan program wajib belajar 12 tahun. Kebijakan Pemda Propinsi, Kabupaten, dan Kota sebagian besar telah mengarah pada rintisan program wajib belajar 12 tahun. Sedangkan kebijakan Kementerian Agama belum menyiapkan perangkat regulasi, baik peratur-

Naskah diterima 17 Mei 2012. Revisi pertama, 3 juni 2012. Revisi kedua, 15 Juni 2012 dan revisi terakhir 25 Juni 2012

an, pedoman, dan petunjuk teknis lainnya terkait rintisan program wajib belajar 12 tahun di madrasah Aliyah. Pada aspek ketersediaan sarana prasarana di MAN telah memadai dan sesuai standar nasional, sebaliknya di madrasah swasta sebagian besar belum memenuhi standar minimum berdasarkan standar sarana prasarana. Dan pada aspek pembiayaan belum terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran khususnya pada madrasah swasta dalam setiap tahunnya.

Kata Kunci: *Wajib Belajar, Madrasah, Akses Pendidikan*

PENDAHULUAN

Latarbelakang

Program wajib belajar merupakan upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam perluasan akses pendidikan yang berkembang searah dengan kebutuhan bangsa terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wajib belajar di Indonesia dimulai dengan wajib belajar sekolah dasar 6 tahun (Wajar 6 Tahun), dan itu telah dilaksanakan sejak tahun 1984.¹ Searah dengan keberhasilan pelaksanaan Wajar 6 tahun yang ditandai dengan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan dasar 6 tahun mencapai lebih dari 90% dan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pendidikan yang lebih tinggi, maka pada tahun 1994 kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) diperluas sampai dengan 9 tahun. Saat ini, bahkan terdapat beberapa daerah yang telah merintis program wajib belajar 12 tahun atau wajib belajar pendidikan menengah.

Pemerintah mempunyai landasan kuat dalam pelaksanaan program wajib belajar, yaitu tertuang dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Disebutkan "Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah." (Pasal 1 ayat 16; Pasal 34). Selain itu Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta

Aksara, secara khusus Inpres tersebut mewajibkan Menteri Agama untuk memfasilitasi pelaksanaan gerakan Nasional percepatan penuntasan wajar Dikdas sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara di madrasah, pondok pesantren, dan lembaga keagamaan yang menjadi binaannya. Bagi kementerian agama wajib belajar pendidikan merupakan kelanjutan dari kebijakan Madrasah Wajib Belajar (MWB) 8 tahun sejak tahun 1958.

Kebijakan wajib belajar merupakan jawaban terhadap berbagai kondisi masyarakat, seperti; 1) lebih dari 80% angkatan kerja hanya berpendidikan SD atau kurang, atau SMP tidak tamat, 2) program wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai tambah pula pada pertumbuhan ekonomi, 3) semakin tinggi pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif, 4) dengan peningkatan program Wajar 6 tahun ke Wajar 9 tahun akan meningkatkan kematangan dan keterampilan siswa, 5) peningkatan Wajar 9 tahun akan meningkatkan umur kerja minimum dari 10 sampai 15 tahun.²

Indikator utama penuntasan Wajar Dikdas adalah pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs secara nasional mencapai 95% pada tahun 2008/2009. Dalam pelaksanaan program Wajar Dikdas sebagai upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan tingkat dasar bagi anak usia sekolah antara 7-15 tahun. Target program ini adalah tercapainya Angka Par-

¹ HAR Tilaar. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta

² Syarif Hidayat. 1994. *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemerataan Pendidikan dalam Upaya Memajukan Desa Tertinggal*. Makalah: IKIP Bandung

tisipasi Sekolah (APS) penduduk meningkat dari 99,12% pada tahun 2005 menjadi 99,57% pada tahun 2009. Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat dasar (SD/MI: usia 7-12 tahun) diusahakan akan meningkat dari 93,53% pada tahun 2005 menjadi 93,87% pada tahun 2009. Sementara pada tingkat dasar menengah (SMP/MTs) target yang akan dicapai adalah meningkatnya APM sebesar 63,67% di tahun 2005 ditingkatkan menjadi 75,46% pada tahun 2009, sehingga dalam kurun waktu lima tahun akan terjadi kenaikan sebesar 14,79%. Kenyataannya pada tahun 2007 APM SD/MI telah mencapai 94,66% dan APK 114,27%. Pada tahun yang sama APM SMP/MTs/Paket B dan yang sederajat 71,6% dan APK SMP/MTs/Paket B dan yang sederajat telah mencapai 92,52%.³

Sumbangan Kementerian Agama (Kemenag) terhadap pencapaian target Nasional, APK pada tahun 2005 sebesar 13,20%, tahun 2006 sebesar 13,70%, dan tahun 2007 sebesar 14,20% untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Sedangkan untuk tingkat MTS menunjukkan angka partisipasi pada tahun 2005 sebesar 17,40% tahun 2006 sebesar 18,50% , dan tahun 2007 sebesar 19,60%. Di samping kenaikan APK, indikator lain dari percepatan penuntasan Program Wajib dikdas 9 Tahun adalah menurunnya angka drop out, tahun 2006 sebesar 0,6% menjadi 0,4% pada tahun 2007 untuk MI dan untuk MTs, sebesar 1,06% tahun 2006 menjadi 1,02% pada 2007. Pada tahun 2008 angka drop out MI dan MTs turun menjadi 1,04% sedangkan APK pada MI dan MTs masing-masing mencapai 14,75% dan 20,70%. (Paparan Dirjend. Pendis pada dengar Penda-pat Komisi VIII DPR RI, Januari, 2008).

Kemenag mencatat bahwa jumlah lembaga pendidikan madrasah tidak kurang dari 18% dari seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Sedangkan besaran prosentasi tanggung jawab kementerian agama dalam penuntasan wajar Dikdas secara nasional,

³Data Rembuk Nasional Diknas tahun 2008.

dihitung berdasarkan proporsi siswa yang belajar di madrasah dan salafiyah dibagi jumlah peserta didik yang tertampung di sekolah, madrasah, salafiyah, paket, sekolah terbuka dikalikan 100%. Maka proporsi tanggung jawab kemenag secara nasional untuk MI adalah 9,77% dan untuk MTs 20,38%.⁴

Kemenag menyelenggarakan pendidikan menengah pada Madrasah Aliyah, Pesantren Mu'adalah, dan pendidikan kesetaraan paket C. Data MA saat ini adalah 5043 lembaga, dengan rincian 644 dengan status madrasah Aliyah Negeri, dan 4399 lainnya berstatus swasta, dengan jurusan yang beragam, meliputi; jurusan IPA sebanyak 1578, jurusan IPS 4225, jurusan Bahasa 363 dan Program Keagamaan sebanyak 217. Secara keseluruhan, jumlah siswa Madrasah Aliyah sebanyak 817.920 siswa dengan jumlah guru sebanyak 97.986 orang, dengan kualifikasi pendidikan di bawah S.1 22.091, berijazah S.1 sebanyak 74.582 dan kualifikasi S.2-S.3 sebanyak 1.313.⁵

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah kesiapan madrasah dalam pelaksanaan Wajar 12 Tahun? Secara khusus, penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan: *pertama*, bagaimana kebijakan Pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Wajar 12 Tahun? *Kedua*, bagaimana kebijakan Kementerian Agama terhadap pelaksanaan program Wajar 12 tahun di Madrasah Aliyah? *Ketiga*, bagaimana kesiapan Madrasah Aliyah dalam aspek sarana-prasarana, pembiayaan, dan tenaga kependidikan dalam program wajar 12 tahun?

Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan, antara lain: mengetahui kebijakan Pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Wajar 12

⁴ Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun 2004-2009. Direktorat Pendidikan Madrasah.

⁵ Data Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tahun, mengetahui kebijakan Kementerian Agama terhadap pelaksanaan program Wajar 12 tahun di Madrasah Aliyah dan mengetahui kesiapan Madrasah Aliyah dalam aspek sarana-prasarana, pembiayaan, dan tenaga kependidikan dalam program wajar 12 tahun.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu analisis kebijakan (*policy analysis*). Sumber data digali dan dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun, yakni BPS, BAPPEDA, Dewan Pendidikan, Kabid Madrasah, Kasi Madrasah, Kepala MA Negeri dan Kepala MA Swasta. Sedangkan observasi dilakukan dengan cara mengunjungi beberapa MA. Adapun dokumen yang dikumpulkan berasal dari instansi terkait, yakni BPS, BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Kemenag Propinsi atau Kabupaten/Kota, Madrasah Negeri dan swasta. Sedangkan lokasi penelitian ini pada kabupaten/kota, Kota Banda Aceh, Kota Medan, Kota Padang Kabupaten Jember Kota Malang, Kabupaten Sragen, Kota Bandung, Kabupaten Tangerang, Kota Banjarmasin, dan Kota Mataram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pendidikan pada Daerah Penelitian

APK dan APM Pendidikan Dasar dan Menengah

Berkaitan dengan APK dan APM pendidikan Dasar, APM pendidikan dasar merupakan jumlah anak usia sekolah dasar yang bersekolah di sekolah dasar dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tersebut. Sedangkan, APK sekolah dasar adalah jumlah seluruh siswa sekolah dasar dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tersebut. APK mengukur tingkat partisipasi penduduk usia 7-12

tahun pada tingkat sekolah dasar tanpa melihat kelompok umur siswa.

Tabel 1: APK, APM Pendidikan Dasar

No	Propinsi/kab./kota	APK		APM	
		SD/MI	SMP/MTs	SD/MI	SMP/MTs
1	Kota Banda Aceh	113,91%	87,67%	97,15%	97,15%
2	Sumatera Utara	115,0%	99,0%	94,81%	
3	Kota Padang	107,71%	87,28%	93,40%	89,98%
4	Bali/Jembrana	110,45%	106,45%	96,45%	85,89%
5	Jatim/Kota Malang	119,35%	99,33%	103,83%	72,89%
6	Kabupaten Sragen	115,86%	121,02%	100,13%	90,74%
7	Kota Bandung	131,05%	116,16%	123,13%	99,44%
8	Banten/Kab Tangerang	118,00%	98,17%	98,48%	78,09%
9	Kota Banjarmasin		96,18%	97,00%	
10	Kota Mataram	108%	100,12%	96,04%	77,36%

Berkaitan dengan APK dan APM pendidikan menengah, angka partisipasi Kasar untuk pendidikan menengah merupakan jumlah semua anak di tingkat sekolah menengah dibandingkan dengan jumlah anak berusia 16-18 tahun. APK memperhitungkan siswa yang mungkin terlambat memulai sekolah atau siswa yang mengulang kelas.

Tabel 2: APK dan APM Pendidikan Menengah

No	Propinsi/kab./kota	SMA/MA	
		APK	APM
1	Kota Banda Aceh	72,3%	
2	Sumatera Utara	68,20%	
3	Kota Padang	69,30%	47,19%
4	Bali/Kab. Jembrana	81,35%	69,7%
5	Kota Malang	84%	61%
6	Kabupaten Sragen	86,12%	61,36%
7	Kota Bandung	98,80%	80,99%
8	Kabupaten Tangerang	60,03%	47,50%
9	Kota Banjarmasin	72,34%	
10	Kota Mataram	100%	71,32%

Penjelasan dari data APK dan APM pada jenjang dasar dan menengah adalah masih terdapat beberapa daerah sasaran penelitian yang belum mencapai target APK dan APM nasional sebesar 95% untuk pendidikan dasar dan 64% untuk pendidikan menengah. Kasus di propinsi Sumut masih terdapat selisih yang cukup tinggi pada APK PAUD, SMP/MTs dan sederajat pada tahun 2009. Masih terdapat kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat. Di propinsi Bali Berdasarkan

APK yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD yaitu 110,63 persen dan yang terendah di tingkat SMU yaitu 81,35 persen. Tingginya APK adalah akibat adanya penambahan jumlah penduduk usia sekolah.

Sedangkan APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD yaitu 96,45 persen dan yang terendah di tingkat SMU yaitu 69,78 persen. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat Anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal itu juga menunjukkan kinerja yang paling baik terdapat di tingkat SD. Berdasarkan APK yang ada, ternyata porsi APK terbesar adalah SD yaitu 112,37 persen jika dibandingkan dengan SLTP yaitu 97,51 persen. Hal yang sama juga terjadi pada APM.

Pada kasus Jawa Timur, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 119,35 persen dan yang terendah di tingkat SM, yaitu 87,96 persen. Tingginya APK yang melebihi 100% adalah akibat banyaknya siswa usia sekolah berasal dari luar Kota Malang yang berada di jenjang tersebut. Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata masih ada perbedaan jender dilihat dari APK pada tingkat Laki-laki dibandingkan dengan tingkat Perempuan pada semua jenjang pada tingkat SD/MI APK melebihi 100% sehingga dikatakan bahwa kinerja SD/MI yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat SMP dan tingkat SM. Di daerah ini anak yang bersekolah di tingkat SD paling banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya.

Kondisi umum pendidikan di Kabupaten Sragen dapat dilihat dari berbagai indikator-indikator utama pendidikan tahun 2009, yang antara lain meliputi indikator pemerataan pendidikan dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan Menengah yang saat ini telah mencapai 100% lebih dengan rincian APK SD/MI sebesar 115,86%; APK SMP/MTs sebesar 121,02% dan APK SMU/SMK/

MA sebesar 86,12%. Sedangkan APM nya mencapai kurang dari 100% dengan rincian APM SD/MI sebesar 100,13%; APM SMP/MTs sebesar 90,74% dan APM SMU/SMK/MA sebesar 61,36%.

Pada kabupaten Sragen berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tahun 2009, angka *dropout* siswa sebesar 0,22% dari jumlah peserta didik yang ada pada jenjang SD/MI; SMP/MTs dan SMU/SMK/MA, dengan rincian sebesar 0,10% angka *dropout* siswa SD/MI; 0,16% angka *dropout* siswa SMP/MTs dan 0,41% angka *dropout* siswa SMU/SMK/MA. Khusus untuk madrasah, berdasarkan keterangan dari Kasi Mapenda kantor Kementerian Agama kabupaten Sragen Drs.H. Irwan Junaidi bahwa selama tiga tahun terakhir tidak ada siswa *dropout* untuk jenjang MI dan MTs. Sedangkan untuk jenjang MA, terdapat angka *dropout* sebesar 0,1% dari jumlah siswa sebanyak 1.448 orang. angka *dropout* ini hanya terjadi pada madrasah swasta. Sedangkan pada madrasah negeri selama tiga tahun terakhir tidak ada.

Sedangkan untuk propinsi Banten, Perkembangan APK dan APM pendidikan dasar dan menengah menunjukkan grafik yang terus meningkat. Pada tahun 2009 telah melampaui target nasional yang menetapkan kisaran APK sebesar 95%. Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai kebijakan pemda maupun pemerintah pusat di bidang pendidikan. diantaranya: pembangunan unit sekolah baru, rehab, SMP/MTs satu atap, beasiswa siswa miskin, dan kebijakan wajar dikdas 9 tahun.

Madrasah dan Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun

Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, memasuki tuntas paripurna pada tahun 2008-2009. Sehingga saat ini kebijakan yang gulirkan terhadap program tersebut di

sebagian besar daerah telah mencapai target dan meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan, sehingga berbagai daerah juga telah melanjutkan dengan melakukan rintisan penuntasan wajib belajar 12 tahun.

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang juga memiliki ketuntasan dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun hampir mencapai tuntas 100 persen. Ketuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di madrasah ini didukung oleh banyak faktor antara lain membaiknya perhatian pemerintah (kementerian agama); meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan melalui partisipasi masyarakat, pemenuhan target nasional terhadap angka partisipasi (APK dan APM), serta tumbuhnya pembinaan kemenag, baik pusat maupun daerah pada program wajar dikdas tersebut. Secara umum pada daerah penelitian tergambar bahwa program wajar 9 tahun di madrasah telah mencapai ketuntasannya.

Kebijakan Program Wajib Belajar 12 tahun

Kebijakan Pemda dalam Program Wajar 12 Tahun

Pada dasarnya, Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota telah memiliki kebijakan terkait pendidikan berupa Peraturan Daerah (PERDA) pendidikan yang mengatur penuntasan wajar DIKDAS 9 tahun dan rintisan Wajar 12 tahun. Seperti di NAD yang telah membuat kebijakan program wajar 12 Tahun, yakni APM untuk pendidikan dasar dan menengah menjadi 100% pada 2012. Bahkan dalam prioritas kebijakan untuk memperbesar akses pendidikan selama 2007-2012 adalah menjamin kemajuan otomatis dan akses yang merata selama 12 tahun di pendidikan dasar dan menengah yang bermutu tinggi. Kebijakan ini sudah disosialisasikan ke seluruh Kabupaten/Kota bekerjasama dengan AUSAID.

Namun demikian, di Kota Banda Aceh sudah ada rintisan Program Wajar 12 Tahun meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam Peraturan Walikota. Pemerintah Kota Banda Aceh membuat Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kota Banda Aceh. Melalui Peraturan ini, Pemerintah Kota Banda Aceh berusaha memenuhi kekurangan Bantuan Operasional Sekolah untuk pendidikan dasar dan lanjutan serta kekurangan Bantuan Operasional Manajemen Mutu untuk Sekolah Menengah/Kejuruan yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Perhatian Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penuntasan wajib belajar 12 tahun diimplementasikan dalam pengucuran anggaran di tiga level, dana otonomi khusus, dana BOS (APBD Kota), dan dekosentrasi. Besaran dana BOS untuk Sekolah Menengah Atas di Kota Banda Aceh sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Dana otsus sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan dana dekosentrasi (dari Kementerian Pendidikan Nasional Pusat) sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Dengan skema pendanaan ini, maka SMA Negeri di Kota Banda Aceh sudah digratiskan. Masyarakat tidak perlu lagi membayar biaya pendidikan. Sedangkan SMA swasta masih belum mendapatkan dana BOS yang berasal dari APBD Kota. SMA swasta hanya mendapat dana otsus (Rp 400.000,-) dan dekosentrasi (Rp 90.000,-) dengan total Rp 490.000,- (empat ratus ribu rupiah). Adapun Madrasah Aliyah belum mendapat dana dari DOP (Dana Operasional Pendidikan). MA hanya mendapat tunjangan prestasi sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Pada daerah lain seperti Kabupaten Sragen rintisan wajar 12 tahun mulai digulirkan pada tahun 2010. Namun demikian, saat ini kebijakan yang digulirkan tersebut

baru sampai pada taraf rintisan pengembangan. Hal ini disebabkan karena penuntasan wajar dikdas 9 tahun baru diselesaikan tahun 2008. Oleh karena itu rintisan program wajar 12 tahun saat ini, belum didukung oleh Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum dalam pelaksanaan program.

Tidak adanya Perda sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan, menurut Dwi Cahyani selaku Kasubdit Sosbud Pemda Kabupaten Sragen bahwa hal tersebut bukan karena Perda dimaksud belum selesai dibahas oleh DPRD setempat, namun karena memang Kabupaten Sragen jarang atau bahkan hampir tidak pernah melahirkan Perda sebagai dasar hukum kebijakan terhadap program yang digulirkan. Lebih lanjut menurut Dwi Cahyani bahwa Pemda Kabupaten Sragen tidak memiliki cukup anggaran yang memadai untuk melahirkan sebuah Perda. Karena untuk melahirkan satu Perda dibutuhkan dana sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sementara APBD Kabupaten Sragen tidak terlalu besar, sehingga APBD yang ada lebih banyak dimanfaatkan untuk mendanai berbagai program yang menjadi prioritas pembangunan daerah selain PERDA pembahasannya berkepanjangan. Oleh karena itu sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan setiap kebijakan yang digulirkan, acuan yang digunakan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sekaligus sebagai dasar dikeluarkannya anggaran dari APBD. Alasan lain tidak dikeluarkannya Perda dalam setiap kebijakan yang digulirkan oleh Pemda Kabupaten Sragen, menurut Dwi Cahyani adalah karena tanpa perdapun selama ini kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Pemda Kabupaten Sragen dapat direalisasikan dalam kegiatan nyata dan berjalan lancar.

Untuk dapat merealisasikan program wajar 12 tahun tersebut, Pemda Kabupaten Sragen memiliki komitmen terhadap anggaran yang harus dikeluarkan dalam pengembangan program dimaksud. Ke-

bijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam APBD yang prosesnya sebagaimana diuraikan di atas. Pada tahun 2010 ini, dana APBD yang dikeluarkan untuk pembangunan bidang pendidikan kurang lebih sebesar Rp. 21.744.293.000,- (duapuluh satu milyar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga rupiah). Jumlah ini besarnya sekitar 3% dari total APBD sebesar Rp. 839.349.992.000 (delapan ratus tigapuluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Lain halnya di kabupaten Jembrana yang telah memiliki PERDA Wajar 12 tahun, secara eksplisit peraturan ini memuat prosedur dan tata aturan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun pada pendidikan menengah, bahkan propinsi Bali telah menggulirkan program Wajib belajar 12 tahun yang diyakini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Bali. Semua anak usia sekolah akan diwajibkan untuk menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun secara gratis atau setara dengan tamatan SMA/SMK/MA. Menurut gubernur Bali yang di muat harian Kompas, masih banyak tenaga kerja Bali yang hanya tamatan SD atau *dropout* SD. Hingga Februari tahun 2010, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah atau yang *dropout* masih sangat tinggi yakni 46,37% dari total pekerja yang ada di Bali yakni sejumlah 946.469 orang.

Tabel 3: Peraturan Daerah Program Wajar 12 tahun di Daerah Penelitian

No	Propinsi/kab./kota	PERDA WAJAR 12 TAHUN
1	Kota Banda Aceh	Belum ada
2	Sumatera Utara	Belum ada
3	Kota Padang	RAPERDA Pendidikan dasar menengah
4	Bali/Kab. Jembrana	PERDA NO. 12 tahun 2006, ttg Wajar 12 Tahun
5	Kota Malang	PERDA Penyelenggaraan Pendidikan
6	Kabupaten Sragen	Belum ada
7	Kota Bandung	PERDA Penyelenggaraan Pendidikan
8	Propinsi Banten	Belum Ada
9	Kota Banjarmasin	Belum Ada
10	Kota Mataram	PERDA Penyelenggaraan Pendidikan

Kebijakan Kementerian Agama dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun

Kementerian Agama di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota secara umum belum memiliki kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Tidak adanya Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kementerian Agama Tingkat Propinsi dikarenakan Kementerian Agama Pusat belum memiliki Program Wajib Belajar 12 Tahun. Namun menurut Kabid MAPENDA Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NAD, pembinaan yang dipusatkan pada peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui kegiatan KKG, MGMP, dan Workshop. Kegiatan-kegiatan ini merupakan upaya yang telah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NAD dalam memajukan madrasah.

Kebijakan Kemenag Kabupaten lain seperti halnya Sragen dalam rangka penuntasan Program Wajar 12 tahun dilakukan melalui pembinaan terhadap madrasah (khususnya MTs) yang diawali dengan melakukan penyusunan program tahunan. Dalam penyusunan program tersebut dilakukan dengan melihat skala prioritas kebutuhan yang lebih mendesak untuk segera dilakukan pengembangannya. Untuk menyusun program tersebut terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap seluruh komponen pendidikan dengan melihat kelebihan dan kekurangan serta prediksi pengembangannya. Program yang telah tersusun tersebut, semaksimal mungkin diupayakan untuk dapat direalisasikan sepenuhnya. Namun dalam kenyataan, realisasi program tersebut terkadang hanya mencapai 90%. Program yang telah disusun pada tahun 2010, hingga saat ini sudah terealisasi sekitar 75%. Keberhasilan pelaksanaan program ini sangat didukung oleh banyak pihak antara lain perhatian pemerintah terhadap pendidikan yang lebih baik, adanya kerjasama yang lebih baik antara Kemenag, Pemda dan madrasah.

Strategi Penyiapan Madrasah dalam Pengembangan Wajar 12 Tahun

Dalam rangka penyiapan wajar 12 tahun, madrasah sebenarnya belum memiliki kesiapan secara khusus. Namun ada beberapa program pengembangan yang saat ini dilakukan madrasah yang difokuskan pada beberapa komponen antara lain pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, sarana prasarana, pembiayaan, pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam rangka melakukan pengembangan tersebut ada beberapa langkah yang ditempuh madrasah.

1. Dalam upaya pengembangan kurikulum, upaya yang dilakukan melalui pengembangan KTSP. Untuk itu madrasah melakukan kerjasama dengan sekolah umum dalam rangka pengembangan kurikulum, penyusunan slabus, pemahaman terhadap kompetensi dan kompetensi dasar. Kegiatan ini dilakukan melalui berbagai even antara lain seminar maupun workshop baik diupayakan sendiri maupun mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh Kemenag, Depdiknas, Pemda maupun instansi lain.
2. Dalam upaya peningkatan strategi pembelajaran, kegiatan yang dilakukan hampir sama dengan pengembangan kurikulum yaitu dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti seminar maupun workshop baik yang diupayakan sendiri maupun mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh Kemenag, Depdiknas, Pemda maupun instansi lain. Kegiatan ini juga dilakukan dengan memerankan MGMP dan melakukan kerjasama dengan sekolah umum lain dalam melakukan kegiatan tersebut.
3. Dalam upaya pengembangan sarana prasarana, kegiatan yang dilakukan adalah dengan pemanfaatan dan pemeliharaan seoptimal mungkin. Sedangkan dalam upaya pengembangan pembiayaan, strategi yang dilakukan adalah

dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik institusi pemerintah maupun swasta dan masyarakat luas pada umumnya.

4. Dalam upaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensi mereka. Dalam peningkatan kualifikasi, para pendidik dan tenaga kependidikan diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi lanjutan dan diberikan bantuan biaya pendidikan. Sedangkan dalam peningkatan kompetensi, upaya yang dilakukan adalah dengan mengikutkan mereka pada berbagai kegiatan diklat, workshop, seminar baik yang diadakan oleh instansi pemerintah, swasta maupun lembaga organisasi profesi seperti MGMP, KKM dan organisasi sejenis.

Program Wajib Belajar 12 Tahun di Madrasah

Bagian ini memaparkan data kesiapan Madrasah Aliyah dalam aspek sarana-prasarana, pembiayaan, dan tenaga kependidikan dalam program wajar 12 tahun. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan madrasah dalam pelaksanaan wajar 12 tahun di daerah sasaran penelitian, yaitu di MAN dan MAS. Dua madrasah ini merupakan perwakilan dari Madrasah negeri dan swasta yang dianggap paling memadai atau paling baik di daerah tersebut.

Pemenuhan Aspek Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Secara umum, tingkat kesiapan madrasah dalam pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kategori baik, meskipun dalam beberapa bidang studi masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan. Misalnya di MAN Model Kota Banda Aceh, pendidik berjumlah 60 guru dengan

rincian 48 berpendidikan S-1 dan 12 guru berpendidikan S-2 dengan tingkat kesesuaian latar belakang pendidikan dan mengajar 100%.

Dilihat dari aspek pendidik dan tenaga kependidikan, secara umum madrasah memiliki kesiapan yang cukup baik dan memenuhi standar dalam rangka penuntasan wajar 12 tahun. Indikator kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan tersebut antara lain terlihat dari ketersediaan guru pada seluruh mata pelajaran; 99% guru mengajar sesuai bidang studi (tidak *mismatch*); seluruh guru berpendidikan sarjana bahkan 25% berpendidikan S2 dan 70% guru berstatus sebagai PNS. Sedangkan dari sisi tenaga kependidikan, madrasah minimal memiliki tenaga kependidikan yang menangani masalah administrasi, keuangan, kebersihan, laboratorium, perpustakaan dan keamanan. Kondisi seperti ini dapat dilihat dari data MAN I dan MA NU Sragen yang menjadi sampel penelitian. Sedangkan data pendidik dan tenaga kependidikan secara keseluruhan untuk Kabupaten/kota sasaran penelitian, secara umum tidak jauh berbeda dengan keterwakilan dua madrasah tersebut yakni guru yang berpendidikan sarjana mencapai sekitar 60% bahkan 25% berpendidikan S2 dan 90% lebih memiliki kesesuaian dalam mengajar (tidak *mismatch*). Pada tingkat pemenuhan standar minimal berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru, tenaga pendidik di madrasah aliyah telah memenuhi standar kualifikasi.

Berdasarkan profil tenaga pendidik dan kependidikan di atas, untuk mewujudkan prestasi madrasah, guru S1 perlu menambah pengetahuan yang lain, memiliki keahlian yang multi, serta menguasai bahasa dan menjunjung tinggi akhlak. Sedangkan bagi tenaga kependidikan mereka harus menguasai IT. Demikian halnya di MAS tenaga pendidik perlu diikutsertakan dalam workshop-workshop untuk menun-

jang pembelajaran dan tenaga kependidikan harus menguasai IT dengan baik.

Pemenuhan Aspek Sarana dan Prasarana

Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Permendiknas no 24 tahun 2007 tentang standar sarana prasarana, dari aspek pemenuhan sarana prasarana, madrasah baik yang negeri maupun yang swasta belum memiliki kesiapan dalam penuntasan wajar 12 tahun, karena tingkat keterpenuhan sarana prasarana tersebut rata-rata baru mencapai sekitar 60% bagi MAN dan 40% bagi MAS. Kondisi ini terlihat dari keberadaan MA sasaran penelitian. Diasumsikan MA lain tidak jauh berbeda atau bahkan mungkin dalam kondisi lebih buruk, karena MA yang menjadi sasaran penelitian adalah MA yang paling baik di Kabupaten/kota daerah penelitian. Kondisi ini menggambarkan bahwa madrasah belum memiliki kesiapan yang cukup, karena untuk mendukung program wajar 12 tahun, setidaknya madrasah harus sudah memiliki kesiapan yang maksimal dalam hal sarana prasarana baik secara kualitas maupun kuantitas.

Beberapa sarana prasarana yang belum terpenuhi pada MAN I Sragen misalnya: ketersediaan asrama siswa, PSBB, aula, laboratorium bahasa, laboratorium agama dan rumah dinas bagi guru dan karyawan. Sedangkan pada MAS sarana prasarana yang belum tersedia jumlahnya lebih banyak seperti laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium Agama, gedung keterampilan, klinik kesehatan, aula, PSBB, rumah dinas dan kantin. Sedangkan asrama bagi MA swasta justru telah tersedia dengan jumlah yang cukup memadai yaitu sebanyak 12 unit asrama putra dan 12 unit asrama putri. Terpenuhinya sarana asrama ini karena madrasah ini menyatu dengan pondok, sehingga sebagian besar siswa madrasah merupakan santri di pesantren ini.

Dalam rangka penyiapan program wajar 12 tahun, menurut kepala MAN I

Sragen Dra. Siti Afiah, M.Pd, tahun depan kekurangan sarana prasarana tersebut akan diupayakan pengadaannya melalui dana APBN dan pencarian dana lain melalui komite madrasah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi lain baik negeri maupun swasta, maupun dengan masyarakat luas. Pada MAN Serpong telah memiliki 3 unit kantor dengan luas 168 m² dalam kondisi baik. Perpustakaan 1 unit dengan luas 112 m² dalam kondisi baik. Aula (Gedung Serbaguna) 1 unit dengan luas 168 m² dalam kondisi baik. Ruang belajar (Rombel) 10 unit dengan luas 560 m² dalam kondisi baik dengan daya tampung 48 siswa.

Laboratorium IPA 1 unit dengan luas 56 m² dalam kondisi baik. Laboratorium Bahasa 1 unit dengan luas 56 m² dalam kondisi kurang baik. Laboratorium komputer 1 unit dengan luas 56 m² dalam kondisi kurang baik. Koperasi dan kantin 1 unit dengan luas 10 m² dalam kondisi kurang baik. Masjid/musholla 1 unit dengan luas 112 m² dalam kondisi baik. WC 10 unit dengan luas 225 m² dalam kondisi baik. Sedangkan sarana dan prasarana lainnya tidak dimiliki.

Menurut Kepala MAN Serpong, sarana prasarana Laboratorium IPA, Komputer, dan Bahasa yang dimilikinya masih minim karena tidak sesuai dengan jumlah siswa. Untuk pengembangannya MAN Serpong hanya mengandalkan pada dana DIPA dan orang tua. Selama tiga tahun terakhir ini, jumlah siswa MAN Serpong mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 dengan rombel berjumlah 9 siswa MAN Serpong berjumlah 300 orang. Pada tahun 2009 dengan rombel 10 siswa MAN Serpong berjumlah 332 orang. Pada tahun 2010 dengan rombel 10 siswa MAN Serpong berjumlah 371 orang. Ini berarti ada peningkatan sekitar 10 persen. Namun, menurut Kepala MAN Serpong, dengan peningkatan itu daya tampung MAN Serpong masih kurang. Adapun MA Raudlatul Irfan memiliki kantor 1 unit dengan luas 25 m² dalam kondisi baik. Ruang be-

lajar (Rombel) 2 unit dengan luas 294 m² dalam kondisi baik. Laboratorium Komputer 1 unit dengan luas 28 m² dalam kondisi baik. OSIS 1 unit dengan luas 25 m² dalam kondisi baik. WC 1 unit dengan luas 2,4 m² dalam kondisi baik. Selain itu, sarana dan prasarana lainnya tidak dimiliki (seperti perpustakaan, aula, Laboratorium IPA, dll). Kepala MA Raudlatul Irfan mengatakan sarana dan prasarana yang dimiliki memang sangat minim. Untuk pengembangannya strategi yang dilakukan ialah mengajukan proposal bantuan kepada instansi-instansi.

Merujuk pada standar sarana-prasarana pendidikan menengah minimum harus memiliki 1. ruang kelas, 2. ruang perpustakaan, 3. ruang laboratorium biologi, 4. ruang laboratorium fisika, 5. ruang laboratorium kimia, 6. ruang laboratorium komputer, 7. ruang laboratorium bahasa, 8. ruang pimpinan, 9. ruang guru, 10. ruang tata usaha, 11. tempat beribadah, 12. ruang konseling, 13. ruang UKS, 14. ruang organisasi kesiswaan, 15. jamban, 16. gudang, 17. ruang sirkulasi, 18. tempat bermain/berolahraga. Maka kondisi MAS masih jauh dari pemenuhan standar minimum terkecuali beberapa MAS unggulan seperti halnya MA Ruhul Islam Anak Bangsa di Aceh.

Pemenuhan Aspek Pembiayaan

Tingkat kesiapan madrasah dalam pemenuhan pembiayaan menunjukkan bahwa madrasah negeri sudah terpenuhi pembiayaannya dalam DIPA. Sedangkan madrasah swasta sangat tergantung pada kesiapan masing-masing lembaga/yayasan. Jika MA swasta mampu menggali sumber pendanaan alternatif, maka kesiapan MA swasta dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun cukup besar.

Pembiayaan merupakan aspek penting, karena tersedianya pembiayaan yang memadai, pelaksanaan pembelajaran di madrasah dapat berjalan lancar dan maksimal. Dilihat dari aspek pembiayaan, umumnya madrasah belum memiliki kesiapan yang

matang, hal ini disebabkan karena sumber pembiayaan madrasah yang masih sangat terbatas. Bagi madrasah negeri, disamping mengandalkan pembiayaan dari dana BOS, juga memperoleh pembiayaan dari pemerintah melalui dana APBN. Tetapi bagi madrasah swasta, satu-satunya sumber pembiayaan yang dapat diandalkan saat ini hanyalah dari dana BOS dan iuran SPP siswa yang jumlahnya tidak terlalu besar. Menurut Drs Minanul Aziz (kepala MA NU) Sragen, biaya SPP siswa perbulannya sebesar Rp. 80.000. Jumlah biaya yang tidak terlalu besar itupun masih banyak siswa yang tidak sanggup membayar, sehingga terkadang iuran SPP itu oleh sebagian siswa dicicil beberapa kali, bahkan ada beberapa siswa yang sama sekali tidak mampu membayar. Terhadap siswa tidak mampu ini, pihak madrasah membebaskan mereka dari kewajiban membayar SPP. Adanya sebagian siswa yang tidak sanggup membayar SPP tersebut, menjadikan madrasah tidak dapat mengandalkan sumber pembiayaan dari SPP.

Bagi MA negeri yang memiliki sumber pembiayaan lebih baik karena memperoleh pembiayaan dari pemerintah, ternyata masih banyak persoalan. Menurut kepala MA negeri Dra. Siti Afiah, M.Pd, dana yang ada belum mampu mencukupi secara maksimal segala keperluan biaya operasional madrasah. Antara pemasukan dan pengeluaran belum ada keseimbangan bahkan masih jauh dari mencukupi, sehingga dana yang ada belum mampu membiayai semua kebutuhan yang dibutuhkan madrasah. Kegiatan yang belum dapat tercukupi pembiayaannya secara maksimal terjadi pada semua komponen baik untuk kebutuhan personel, operasional maupun untuk biaya investasi. Namun yang selama ini belum terbiayai secara maksimal adalah untuk biaya peningkatan kesejahteraan personel, pemeliharaan sarana prasarana dan biaya investasi, karena untuk keperluan tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari madrasah sasaran penelitian (MAN I Sragen dan MA NU Sragen), diketahui bahwa selama ini madrasah tersebut mengalami ketimpangan antara pendapatan dengan pengeluaran, yakni pendapatan yang diperoleh madrasah masih jauh dari mencukupi segala kebutuhan madrasah. Antara biaya yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan, jumlahnya tidak seimbang, sehingga komponen kegiatan yang selama ini dilakukan tidak dapat terbiayai secara maksimal. Bila dibagi kedalam tiga komponen pembiayaan yaitu pembiayaan untuk kepentingan personel madrasah; pembiayaan untuk kegiatan operasional madrasah dan biaya investasi madrasah, maka keperluan dana yang dibutuhkan pertahunnya untuk MAN I Sragen dan MA NU Sragen memiliki perbedaan yang signifikan. Bagi MAN I Sragen, untuk kepentingan personel baik untuk kesejahteraan maupun untuk pengembangan, dibutuhkan dana sebesar Rp. 6.567.807.000,- untuk biaya operasional (untuk penunjang KBM, pemeliharaan dan penggantian, daya/jasa, pembinaan kesiswaan dan rumah tangga) dibutuhkan biaya sebesar Rp. 874.301.000,- dan untuk biaya investasi dibutuhkan dana Rp. 710.093.100,-. Jumlah total pembiayaan yang dibutuhkan madrasah untuk tiga komponen tersebut pertahunnya kurang lebih sebesar Rp. 8.161.201.100,-. Sedangkan untuk MAS, untuk kepentingan personel baik untuk kesejahteraan maupun untuk pengembangan madrasah dibutuhkan dana sebesar Rp. 154.960.000,-; untuk biaya operasional (untuk penunjang KBM, pemeliharaan dan penggantian, daya/jasa, pembinaan kesiswaan dan rumah tangga) dibutuhkan biaya sebesar Rp. 213.650.000,- dan untuk biaya investasi dibutuhkan dana Rp. 40.000.000,-. Jumlah total pembiayaan yang dibutuhkan madrasah untuk tiga komponen tersebut pertahunnya kurang lebih sebesar Rp. 408.610.000,-.

Pendapatan antara MAN dan MAS jauh berbeda, sedangkan pengeluaran per-

tahunnya jumlahnya baik di MAN maupun di MAS rata-rata melebihi dari pendapatan yang diperoleh selama satu tahun. Contoh pada MAN I Sragen, pada tahun 2010 memperoleh pendapatan sebesar Rp. 3.750.100.000,-, namun dari rancangan anggaran pembiayaan yang telah disusun dibutuhkan biaya sebesar Rp. 8.161.201.100,-. Sedangkan bagi MA NU Sragen, pendapatan tahun 2010 sebesar Rp. 141.000.000,-, sedangkan dari rancangan anggaran pembiayaan yang telah disusun dibutuhkan biaya sebesar Rp. 408.610.000,-. Data ini jelas menunjukkan bahwa madrasah belum memiliki keseimbangan antara pendapatan dengan kebutuhan yang harus dikeluarkan. Akibatnya banyak pos-pos kegiatan yang tidak secara maksimal dilaksanakan karena terbentur masalah biaya yang tersedia. Persoalan lain adalah masih jauhnya kesenjangan pendapatan antara madrasah negeri dengan swasta. Perbedaan ini jelas akan berpengaruh terhadap capaian hasil pembelajaran. Kondisi ini menggambarkan bahwa dilihat dari aspek pembiayaan, madrasah belum memiliki kesiapan dalam rintisan program wajar 12 tahun.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, penuntasan Wajar dikdas 9 tahun pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten/Kota pada daerah sasaran penelitian telah tuntas, kecuali sebagian kecil daerah yang APK dan APM belum memenuhi 95% sebagai sarat rintisan program wajar 12 tahun. Kedua, kebijakan Pemda Propinsi, Kabupaten, dan Kota sebagian besar telah mengarah pada rintisan program wajar 12 tahun, daya dukung berupa PERDA maupun Peraturan Bupati/Walikota telah disiapkan. Ketiga, kebijakan Kementerian Agama baik pusat, propinsi, ataupun kabupaten/kota belum menyiapkan perangkat regulasi, baik peraturan, pedoman, dan petunjuk teknis lainnya terkait rintisan program wajar 12 tahun

di madrasah Aliyah. Keempat, dari segi ketersediaan sarana prasarana di MAN telah memadai dan sesuai standar nasional, sebaliknya di madrasah swasta sebagian besar belum memenuhi standar minimum berdasarkan standar sarana prasarana, bahkan daya tampung siswa di MAS rata-rata hanya terisi 60%. Kelima, keadaan tenaga pendidik dan kependidikan di MA cukup baik, terutama di MAN sedangkan di MA swasta sebagian besar juga telah memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi. Keenam, aspek pembiayaan belum terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran khususnya pada madrasah swasta dalam setiap tahunnya.

Sedangkan rekomendasi penelitian ini adalah: pertama, kementerian agama melalui Ditjend. Pendidikan Islam untuk segera menerbitkan pedoman rintisan program wajib belajar 12 tahun (menengah) di madrasah. Kedua, kementerian agama melalui direktorat Pendidikan madrasah untuk memprioritaskan bantuan berupa sarana-prasarana, pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik dan kependidikan, serta bantuan operasional pendidikan untuk madrasah aliyah swasta.

SUMBER BACAAN

- Barach, A.B (1996): *Chaning Technology & Draging Culture*, dalam Brikchman, W. & Lehre, L. *Automotion Education & Human Values*. New York. School Society.
- Departemen Pendidikan Nasional (2006): *Undang-undang Republik Indonesia No-*

mor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung.

- De Young, C.A., dan Wynn, R. (1964): *American Education*. New York. McGraw-Hill Book Company.
- Darmaningtyas (2008): *Pendidikan yang menyesatkan*. Jakarta. Kompas.
- Hasanuddin, B. (2000): Diundur Hingga 2009, *Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun*. . Jakarta. *Harian Kompas*. Edisi 3 Maret.
- Moh. Nazir (1988): *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Noeng Muhadjir (1992): *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Rake Sarasin.
- Parsono dkk (1997): *Landasan Kependidikan – Materi Pokok U*. Jakarta. Universitas Terbuka.
- Supandi & Achmad Sanusi (1988): *Kebijakan dan Keputusan Pendidikan*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (P2LPTK).
- Syarif, Hidayat (1994): *Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemerataan Pendidikan dalam Upaya Memajukan Desa Tertinggal*. Makalah: IKIP Bandung.
- Tilaar, H.A.R. (2000): *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Zais, R.S. (1976): *Curriculum: Principles & foundations*. New York. Harper & Row.

KOMPETENSI KEPALA MADRASAH ALIYAH

Oleh: Umul Hidayati

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Jl. MH Thamrin No. 06 Jakarta Pusat
puslitbangpenda@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this study is to determine the competence of heads of Madrasah Aliyah (Islamic Senior High Schools), which includes five competencies, namely Personality Competence, Managerial Competence, Supervision Competence, Entrepreneurial Competence and Social Competence. This study used the survey approach in six provinces, namely: Banten, Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta and East Java. The findings show that the competence of heads of Madrasah Aliyah (Islamic Senior High Schools) is included in sufficient category with a mean score of 3.8, or about 76% meets the NES. Of the five circumstances, the social competence is the best competence with a score of 4.1 or 82% meets the NES and the entrepreneurial competence is the worst competence with a score of 3.5 or 70% which meets the National Education Standards (NES).

Keywords: Competence, Heads of Madrasah Aliyah

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi Kepala Madrasah Aliyah yang mencakup lima kompetensi yaitu Kompetensi Kepribadian, Manajerial, Supervisi, Kewirausahaan dan Sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei yang dilakukan di enam propinsi yaitu: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kepala Madrasah Aliyah termasuk kategori cukup dengan rerata skor 3.8 atau sekitar 76% memenuhi SNP. Dari lima kompetensi tersebut, kompetensi sosial merupakan kompetensi terbaik dengan skor 4.1 atau 82% memenuhi SNP dan kompetensi kewirausahaan merupakan kompetensi paling kurang baik dengan skor 3.5 atau 70% memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Kata Kunci: Kompetensi, Kepala Madrasah Aliyah

PENDAHULUAN

Supriyadi dalam Mulyasa menyebutkan bahwa kepala sekolah merupakan salah satu komponen penting pendidikan yang paling dominan peranannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Karena erat hubungannya antara mutu/kompetensi kepala sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim bu-

daya sekolah, perilaku civitas sekolah dsb. Kepala sekolah bertanggungjawab atas manajemen pendidikan secara makro, artinya ia bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan serta pendayagunaan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah.¹

¹E. Mulyasa. 2005. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, h. 25

Naskah diterima 20 Mei 2012. Revisi pertama, 6 juni 2012. Revisi kedua, 18 Juni 2012 dan revisi terakhir 28 Juni 2012

Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa kepala madrasah memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan, karena ia merupakan unsur penentu kebijakan untuk mencapai keberhasilan pendidikan di madrasah. Oleh karena itu kepala madrasah harus memiliki visi, misi, serta strategi manajemen pendidikan secara utuh dan berorientasi kepada mutu pendidikan. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tersebut, dibutuhkan kepala madrasah yang memiliki kompetensi yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam rangka pemenuhan standar tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui berbagai kebijakan program pengembangan. Sedangkan untuk memberikan batasan atau kriteria pemenuhan standar, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan antara lain UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam bab XI pasal 29 diuraikan tentang batasan dan tugas-tugas tenaga kependidikan yang salah satunya adalah kepala madrasah. UU ini kemudian diperkuat dengan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang isinya antara lain memberikan ketentuan tentang syarat menjadi kepala madrasah yaitu harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi. PP ini kemudian diperjelas dengan Permendiknas RI No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Madrasah, yang isinya menjelaskan tentang kompetensi yang harus dimiliki kepala madrasah yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan dan sosial.

Dalam kenyataan, hingga saat ini masih banyak kepala madrasah yang belum memiliki kompetensi memadai mencakup lima kompetensi tersebut. Depdiknas memperkirakan 70% dari 250 ribu kepala sekolah di Indonesia tidak kompeten. Padahal berdasarkan ketentuan Permendiknas RI No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah, setiap kepala sekolah harus memenuhi lima aspek kompetensi tersebut.

Namun hampir semua kepala sekolah lemah di bidang kompetensi manajerial dan supervisi. Padahal dua kompetensi tersebut merupakan kekuatan kepala sekolah untuk mengelola sekolah dengan baik. Temuan Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas melalui uji kompetensi lebih dari 400 kepala sekolah dari lima propinsi, hasilnya juga sama yaitu kompetensi manajerial dan supervisi masih lemah.²

Hasil survai oleh LPPKS tahun 2010 di enam propinsi (Bali, Banten, Jabar, Jatim, Sulsel dan DIY) dan survai lain pada tahun yang sama dengan melibatkan 9.105 kepala sekolah di 30 propinsi menunjukkan bahwa ada kecenderungan kepala sekolah hanya memiliki beberapa kompetensi saja dan kompetensi sosialnya memiliki nilai pada rata-rata paling rendah.³ Sedangkan penelitian yang dilakukan Puslitbang Penda dan Keagamaan, Kementerian Agama tahun 2004 berjudul "*Kompetensi Kepala Madrasah Aliyah (MA)*" yang menyoroti bidang pengetahuan tentang kepemimpinan, administrasi dan supervisi, hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi kepala MA masih dalam kategori kurang. Penelitian tahun 2007 tentang "*Kompetensi Manajerial Kepala MTs*", hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi manajerial Kepala MTs dalam kategori sedang. Penelitian tahun 2008 tentang "*Kesiapan Madrasah dalam Pemenuhan Standar Layanan Minimal Pendidikan (Kesiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan MI dan MTs Menurut SNP)*", menunjukkan kompetensi kepala MTsN juga dalam kategori sedang.

Untuk mengetahui kondisi riil kompetensi kepala MA mencakup lima kompetensi tersebut, tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang Kompetensi Kepala Madrasah

²<http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2008/08/12,20080812.130482.id.html>. Diunduh, 12 September 2011

³<http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2008/08/12,20080812.130482.id.html>. Diunduh, 12 September 2011

Aliyah yang mencakup lima kompetensi (kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial). Penelitian ini penting dilakukan, untuk mengetahui kompetensi kepala MA mencakup lima kompetensi tersebut, mengingat dari beberapa hasil penelitian tentang kompetensi kepala madrasah yang sudah dilakukan selama ini belum mencakup kelima kompetensi tersebut.

Dari uraian di atas, penelitian ini dapat dirumuskan adalah bagaimana Kompetensi Kepala Madrasah Aliyah mencakup lima kompetensi yaitu Kompetensi Kepribadian, Manajerial, Supervisi, Kewirausahaan dan Sosial?.

KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam Permendiknas RI No. 13 tahun 2007 tentang Standar kepala Madrasah disebutkan bahwa kompetensi kepala madrasah meliputi lima kompetensi yaitu kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan dan sosial.

Kompetensi Kepribadian

Dalam Permendiknas RI No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Madrasah disebutkan bahwa kompetensi kepala madrasah meliputi lima kompetensi yaitu kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan dan sosial. Kompetensi kepribadian kepala madrasah meliputi 1). Berakhlak mulia, menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas madrasah dan mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia; 2). Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin; 3). memiliki keinginan kuat mengembangkan diri sebagai kepala madrasah; 4). Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi; 5). Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan dan 6). Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

Beberapa hal yang dilihat dalam penelitian terkait dengan kompetensi kepribadian kepala madrasah meliputi akhlak mulia,

keteladanan dan upaya dalam mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia; integritas kepribadian sebagai pemimpin; keinginan mengembangkan diri; sikap dalam menjalankan tupoksi; kemampuan dalam mengendalikan diri setiap menghadapi masalah, bakat dan minatnya terhadap jabatan.

Kompetensi Manajerial

Menurut Malayu, istilah manajemen berasal dari kata "*to manage*" yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Sehingga manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁴ Andrew F. Sikula dalam Malayu mengatakan bahwa manajemen adalah aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan, yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang dimiliki sebuah institusi/lembaga, perusahaan dsb, sehingga dihasilkan sebuah produk atau jasa secara efisien.⁵

Dalam Permendiknas RI No. 13 tahun 2007 disebutkan bahwa Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah meliputi: 1). menyusun perencanaan madrasah untuk mengembangkan ide, sumber belajar dan pembiayaan madrasah; 2). Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan, penempatan dan pengembangan kapasitas serta mengelola ketenagaan (guru dan staf); 3). Mengelola pengembangan kurikulum dan pembelajaran; 4). Mengelola keuangan secara akuntabel, transparan dan efisien; 5). Mengelola ketatausahaan; 6). Mengelola

⁴H. Malayu SP. Hasibuan. 2003. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, h. 1

⁵*Ibid*, h.2

sarana prasarana; 7). Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk peningkatan pembelajaran dan 8). Melakukan monitoring dan evaluasi. Kedelapan indikator tersebut secara keseluruhan termasuk pada keempat dimensi manajemen yang harus dimiliki kepala madrasah.

Dari uraian tersebut, maka kompetensi manajerial Kepala MA yang dilihat dalam penelitian meliputi kemampuan dalam mengelola madrasah yang meliputi kemampuan menyusun perencanaan madrasah; mengelola peserta didik dan ketenagaan; mengelola kurikulum; mengelola keuangan; mengelola sarana prasarana; memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan kemampuan melakukan monitoring dan evaluasi.

Kompetensi Supervisi

Secara semantik supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya.⁶ Supervisi juga diartikan sebagai usaha pembinaan oleh pimpinan madrasah kepada para staf madrasah (guru dan tenaga kependidikan) dalam rangka peningkatan kemampuan mengelola pelaksanaan pendidikan agar menjadi lebih baik.⁷ Dengan demikian supervisi adalah kegiatan supervisor yang dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar (PBM). Ada dua tujuan yang harus diwujudkan oleh supervisi yaitu: perbaikan (guru, pegawai dan murid) dan peningkatan mutu pendidikan, karena supervisi adalah aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif.⁸

⁶ <http://social-sciences/education/pengertian-supervisi-pendidikan>, diunduh tanggal 3 April 2011.

⁷ Departemen Agama RI. 1997. *Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pada Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, h. 1

⁸ <http://s1pgsd.blogspot.com/2009/02/supervisi-pendidikan-1.html>, diunduh tanggal 1 April 2011.

Dari uraian tersebut supervisi dapat dipahami sebagai upaya bimbingan dan pembinaan kepala madrasah (sebagai supervisor) terhadap guru dan tenaga kependidikan, agar pelaksanaan pendidikan di madrasah berjalan efektif dan efisien. Ada dua hal yang perlu diperhatikan pertama, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kedua, hal-hal yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Karena aspek utama adalah guru, maka layanan dan aktivitas ke-supervisian harus lebih diarahkan kepada upaya memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar.⁹

Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang standar kepala madrasah, kompetensi supervisi kepala madrasah meliputi: 1). merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalitas guru; 2). melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat dan 3). menindaklanjuti hasil supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalitas guru.

Berdasarkan uraian tersebut, kompetensi supervisi kepala MA yang dilihat dalam penelitian ini meliputi kemampuan kepala madrasah dalam melakukan perencanaan program supervisi akademik untuk peningkatan profesionalisme guru; kemampuan melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; kemampuan melakukan tindak lanjut hasil supervisi akademik terhadap guru.

Kompetensi Kewirausahaan

Kompetensi kewirausahaan adalah kemampuan kepala MA melakukan pembaharuan madrasah melalui usaha-usaha yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Menurut Permendiknas No. 13 tahun 2007

⁹ Depdiknas. 1997. *Petunjuk Pengelolaan Administrasi Sekolah Dasar*. Jakarta: Depdiknas, h. 101

tentang Standar Kepala Madrasah, indikator kompetensi kewirausahaan meliputi: 1). menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan madrasah; 2). bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah; 3). memiliki motivasi kuat untuk sukses dalam melaksanakan tupoksi sebagai pemimpin madrasah; 4). pantang menyerah dan selalu mencapai solusi terbaik dalam menghadapi kendala; 5). memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa madrasah.

Dari uraian tersebut, kompetensi kewirausahaan kepala madrasah yang dilihat dalam penelitian meliputi kemampuan kepala madrasah dalam menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan madrasah; kemampuan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah; motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tupoksinya dan kemampuan mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala.

Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan bersosialisasi kepala MA baik ketika di madrasah, di rumah maupun di masyarakat sebagai bagian dari anggota masyarakat. Menurut Permendiknas No 13 tahun 2007 tentang standar kepala Madrasah, indikator kompetensi sosial kepala madrasah meliputi: 1). bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan madrasah; 2). berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan 3). memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain.

Berdasarkan uraian ini, maka kompetensi sosial kepala MA yang dilihat dalam penelitian meliputi kemampuan kepala MA dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan madrasah; kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survai yakni data dikumpulkan dari sejumlah sampel untuk mewakili seluruh populasi, atau mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok.¹⁰ Pendekatan penelitian adalah kuantitatif. Analisis data menggunakan teknik deskriptif statistik dan data dideskripsikan dalam bentuk tabel dan grafik. Dalam pengumpulan data dilakukan wawancara, hasilnya untuk memperjelas dan memperkaya analisis data kuantitatif.

Penelitian dilakukan di 6 (enam) Propinsi di pulau Jawa yaitu Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta dan Jatim. Pemilihan lokasi didasarkan pada alasan bahwa jumlah MA di pulau Jawa sudah representative mewakili MA di Indonesia. Kegiatan penelitian dari bulan Maret s.d. Oktober 2011.

Populasi penelitian adalah seluruh kepala MA di 6 (enam) propinsi di pulau Jawa yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan sasaran penelitian adalah kepala MA (Negeri dan Swasta) yang sudah terakreditasi A, B dan C. Penentuan besaran sampel penelitian (MA terakreditasi A, B, C), dilakukan menggunakan rumus proporsi oleh LP3ES dengan *Margin of Error* (MoE) 4% dengan tingkat kepercayaan 95%. Dari jumlah MA terakreditasi A, B, C sebanyak 1.249, didapat MA sebanyak 375 untuk 6 propinsi. Penarikan sampel melalui teknik *proporsional stratified random sampling*, hasilnya sbb:

¹⁰ Masri Singarimbun. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, h. 3

Tabel 1: Teknik Sampling dan Jumlah Sampel Per-Propinsi

No	Populasi Sampling	Populasi sasaran	Populasi Per-Prop	Persen (%)	Jml Sampel MA Akred A,B,C	Sampel Per-Prop
		1.249				
1	5.897 Jml Seluruh MA di Pulau Jawa	Banten	89	7.16	375	26
2		Jabar	166	13.29		52
3		DKI	53	4.24		17
4		DIY	45	3.6		15
5		Jateng	352	28.25		104
6		Jatim	544	43.55		161
Jumlah			1.249	100		375

Instrumen/alat pengumpul data dalam penelitian berupa kuesioner. Sedangkan untuk memperoleh gambaran tentang *Kompetensi Kepala MA*, dilakukan melalui telaah dokumen dan penyebaran Instrumen Pengumpul Data (IPD) berupa kuesioner kepada sejumlah responden (wakil bidang kurikulum, guru umum dan guru PAI MA). Instrumen untuk menjangkau data menggunakan daftar pilihan jawaban sebanyak lima jawaban yang diberi skor tertinggi 5 dan terendah 1 dan daftar isian. Selanjutnya hasil penelitian dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu baik, cukup dan kurang. Pengelompokan semacam ini dilakukan untuk melihat hasil penelitian tentang kompetensi kepala MA pada kondisi ekstrim. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 2: Pengelompokan

No	Persentase (%) Rentang Nilai	Kualifikasi	Kategori
1	80 – 100	A	Baik
2	60 – 79	B	Cukup
3	0 – 59	C	Kurang

Untuk memperoleh skor ideal digunakan rumus menurut Sujana (2002), skor ideal adalah perbandingan skor rata-rata/skor perolehan dengan skor maksimal masing-masing variabel sbb:

$$\text{Skor Nilai Ideal} = \frac{\text{Skor Rata-rata}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100\%$$

Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif statistik. Deskripsi tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan gra-

fik. Dalam melakukan deskripsi data dari instrumen yang telah diisi oleh responden, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan pengisian instrumen. Sedangkan untuk melihat hasil penelitian berupa kompetensi kepala MA berdasarkan akreditasi A, B dan C, serta untuk melihat kompetensi kepala MA berdasarkan status MA negeri dan swasta, dilakukan dengan anova satu jalur atau *one ways anova*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompetensi Kepala MA Secara Keseluruhan

Dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah bahwa setiap kepala sekolah/madrasah harus memenuhi lima aspek kompetensi yaitu kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan dan sosial. Penelitian yang dilakukan Puslitbang Penda dan Keagamaan tahun 2011 terhadap 375 kepala MA dengan responden sebanyak 1.125 orang (375 guru umum, 375 guru PAI dan 375 wakil kepala bidang kurikulum), hasilnya menunjukkan bahwa kepala MA yang menjadi sasaran penelitian masuk kategori *cukup* dengan rerata skor 3.8 atau sekitar 76% memenuhi SNP, dengan skor maximum 4.94 dan skor minimumnya 1.34, standar deviasinya 0.68 dan mediannya 3.94.

Dari lima aspek kompetensi tersebut, kompetensi sosial merupakan kompetensi terbaik kepala MA dengan memperoleh skor 4.1 atau 82% memenuhi SNP dan kompetensi kewirausahaan merupakan kompetensi paling tidak baik dengan memperoleh skor 3.5 atau 70% memenuhi SNP. Kompetensi terbaik selanjutnya adalah kompetensi kepribadian dengan memperoleh skor 3.9 atau 78% memenuhi SNP, disusul kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi, dengan skor masing-masing 3.8 dan 3.7 atau 76% dan 74% memenuhi SNP.

Rendahnya kompetensi kewirausahaan kepala MA selama ini disebabkan karena masih banyaknya kepala MA yang belum terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan kreatif untuk melakukan pembaharuan di madrasah. Padahal inovasi dan kreatifitas dalam menjalankan tugas bagi kepala madrasah sangatlah penting. Sebagai kepala madrasah, ia memiliki peran ganda yakni sebagai pemimpin dan sebagai manajer. Dalam perannya sebagai manajer inilah inovasi dan kreatifitas dibutuhkan. Karena mengelola lembaga pendidikan, ibaratnya mengelola sebuah perusahaan, sehingga jiwa *interpreneur* juga harus dimiliki oleh seorang kepala madrasah.

Inovasi dan kreatifitas seorang kepala madrasah dapat dilakukan pada beberapa aspek dan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pada aspek pembelajaran, pembaharuan dapat dilakukan dengan meningkatkan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif, dengan melakukan diversifikasi strategi pembelajaran. Pada aspek pengelolaan, pembaharuan dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip SBM yang antara lain mencakup kemandirian madrasah, pelibatan masyarakat, unsur terkait, akuntabilitas, transparansi pengelolaan, dsb. Pada aspek pendanaan, pembaharuan dapat dilakukan dengan memperluas sumber-sumber pendanaan seperti menjalankan usaha-usaha ekonomi yang produktif, menjalin kerjasama dengan berbagai lapisan masyarakat, lembaga-lembaga terkait, meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola pendanaan dsb. Pada aspek kurikulum, pembaharuan dapat dilakukan dengan memperluas cakupan kurikulum baik kurikulum nasional maupun muatan local. Pada aspek ketenagaan, pembaharuan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik melalui berbagai kegiatan pengembangan, dan pembaharuan bidang administrasi dapat dilakukan dengan penyelenggaraan administrasi berbasis teknologi.

Sedangkan rendahnya kompetensi supervisi kepala madrasah selama ini, karena faktor kebiasaan dalam menjalankan supervisi yang tidak didahului dengan melakukan perencanaan. Pada sebagian madrasah, supervisi sering dilakukan hanya karena kebutuhan sesaat seperti ketika ada persoalan-persoalan mendesak yang membutuhkan arahan dan bimbingan kepala madrasah. Padahal supervisi tidak sekedar itu. Sebagai kepala MA sudah selayaknya jika ia memiliki program supervisi yang terencana dengan baik, sehingga kegiatan supervisi dapat terarah dan tepat sasaran dan waktu, sehingga hasilnya sangat bermanfaat sebagai bahan umpan balik untuk memperbaiki madrasah.

Kompetensi Kepribadian

Kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi dan tempramen seseorang, yang akan terwujud dalam tindakannya jika di hadapkan pada situasi tertentu. Setiap orang mempunyai kecenderungan perilaku yang baku, atau pola dan konsisten, sehingga menjadi ciri khas pribadinya. Dengan kata lain kepribadian adalah keseluruhan pola sikap, kebutuhan, ciri kas dan perilaku seseorang. Pola sikap ini dapat berbentuk perilaku, akhlak, watak, emosi, bakat dsb. Sesuai Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah, yang menyebutkan bahwa indikator Kompetensi Kepribadian Kepala MA terdiri dari enam yaitu: 1). berakhlak mulia, menjadi teladan akhlak mulia dan mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia; 2). memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin; 3). memiliki keinginan kuat mengembangkan diri sebagai kepala madrasah; 4). Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; 5). mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan dan 6). memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Hasil penelitian terhadap enam indikator kompetensi kepribadian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi kepriba-

dian kepala MA sasaran penelitian masuk kategori *cukup* dengan rerata skor 3.9 atau sekitar 78% memenuhi SNP, dengan skor maximum 5 dan skor minimum 1, standar deviasinya 0.79 dan mediannya 4.00.

Dari enam indikator tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian kepala MA masih ada kelemahan pada beberapa aspek. Kompetensi tertinggi terlihat pada indikator mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan, dengan perolehan skor 4.4 atau 88% memenuhi SNP, disusul kemudian pada indikator bersikap terbuka dalam melaksanakan tupoksi dengan perolehan skor 4.0 atau 80% memenuhi SNP dan indikator memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan dengan perolehan skor 3.9 atau 78% memenuhi SNP. Sedangkan kompetensi paling rendah terlihat pada indikator memiliki keinginan kuat mengembangkan diri sebagai kepala madrasah dengan perolehan skor 3.7 atau 74% memenuhi SNP. Pada indikator berakhlak mulia, menjadi teladan akhlak mulia dan mampu mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia serta memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, kompetensi kepala MA terlihat merata dengan perolehan skor sama pada masing-masing indikator yaitu 3.8 atau 76% memenuhi SNP.

Membaiknya kompetensi kepala MA dalam mengendalikan diri setiap menghadapi masalah dalam bekerja ini banyak dipengaruhi oleh faktor individu kepala MA itu sendiri, yang rata-rata merupakan sosok dengan tingkat keberagamaan cukup tinggi, sehingga menjadikan kepala MA memiliki tingkat kesalehan hidup, kerendahan hati dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi berbagai persoalan, serta kemampuan mengendalikan emosinya dengan baik. Adapun rendahnya kemampuan mengembangkan diri sebagai pemimpin, juga banyak dipengaruhi oleh kondisi diri kepala MA khususnya bagi kepala MA swasta, dimana mereka rata-rata merupa-

kan pegawai non PNS. Sebagai pegawai swasta/non PNS, jabatan dan karier bukan menjadi tujuan utama atau orientasi dalam bekerja, sehingga keinginan atau upaya untuk mengembangkan diri menjadi rendah. Hal-hal yang menjadi motivasi dalam bekerja umumnya lebih kepada pengabdian dan ibadah, disamping motivasi ekonomi. Karena motivasi dan orientasi bekerja yang demikian, sehingga keinginan mengembangkan diri menjadi rendah, karena tugas yang dijalankannya juga tidak berpengaruh signifikan terhadap karier, jabatan dan ekonomi.

Kompetensi Manajerial

Sebagai *manager* pendidikan, kepala madrasah bertanggungjawab penuh *manage* madrasah. *Manage* berarti mengatur seluruh potensi madrasah agar berfungsi secara optimal untuk mencapai tujuan madrasah. Kepala madrasah bertanggungjawab melaksanakan administrasi madrasah dengan seluruh substansinya, memobilisasikan sumber daya madrasah, merencanakan dan mengevaluasi program, melaksanakan kurikulum dan pembelajaran, mengelola personalia, memberdayakan sarana dan sumber belajar, mengadministrasikan keuangan, melakukan pelayanan siswa, mengelola hubungan dengan masyarakat, dan menciptakan iklim madrasah yang kondusif. Disamping itu, kepala madrasah bertanggung jawab terhadap kualitas pengembangan dan pemberdayaan SDM madrasah agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas kependidikan secara efektif.

Untuk menjadi seorang manajer yang baik, kepala MA minimal harus memiliki kompetensi standar sesuai SNP yang mencakup sembilan indikator yaitu: 1). menyusun perencanaan madrasah; 2). mengelola peserta didik; 3). mengelola ketenagaan (guru dan staf); 4). mengelola pengembangan kurikulum dan pembelajaran; 5). mengelola keuangan; 6). mengelola ketatausahaan; 7).

mengelola sarana prasarana; 8). memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk peningkatan pembelajaran dan 9). melakukan monitoring dan evaluasi. Namun hasil penelitian terhadap sembilan indikator tersebut, menunjukkan bahwa kompetensi manajerial kepala MA belum maksimal dan masuk kategori *cukup* dengan rerata skor 3.8 atau sekitar 76% memenuhi SNP, skor maksimum 4.94 dan skor minimum 1.41, standar deviasi 0.68 dan median 3.94.

Dari sembilan indikator tersebut, kompetensi tertinggi kepala MA terlihat pada indikator mengelola pengembangan kurikulum dan pembelajaran dengan skor 4.4 atau 88% memenuhi SNP dan kompetensi terendah terlihat pada indikator mengelola ketatausahaan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan perolehan skor 3.4 atau 68% memenuhi SNP. Indikator mengelola peserta didik merupakan kompetensi tertinggi kedua dengan skor 3.9 atau 78% memenuhi SNP, kemudian pada indikator mengelola ketenagaan dan mengelola sarana prasarana dengan perolehan skor masing-masing 3.8 atau 76% memenuhi SNP. Indikator menyusun perencanaan madrasah, mengelola keuangan secara akuntabel dan melakukan monitoring dan evaluasi, ketiganya memiliki skor 3.7 atau 74% memenuhi SNP.

Tingginya skor yang diperoleh kepala MA pada indikator melakukan pengembangan kurikulum dan pembelajaran ini banyak dipengaruhi oleh adanya berbagai kegiatan yang diikuti kepala MA seperti seminar, workshop, pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan Kemenag, Kemendiknas maupun oleh KKM, MGMP dsb, telah memberi manfaat bagi dirinya dalam peningkatan kompetensi manajerialnya. Sedangkan rendahnya skor pada indikator mengelola ketatausahaan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk peningkatan pembelajaran, disebabkan oleh faktor ketidakberdayaan madrasah itu sendiri, khususnya madrasah swasta yang serba kurang memadai dalam berba-

gai aspeknya terutama keterpenuhan sarana prasarana yang lebih modern, sehingga menjadikan kepala madrasah terkadang kurang menguasai teknologi alias gagap teknologi.

Kompetensi Supervisi

Supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya, dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, metode mengajar dan evaluasi pengajaran. Dengan demikian, supervisi adalah kegiatan supervisor yang dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar (PBM). Ada dua tujuan (tujuan ganda) yang harus diwujudkan oleh supervisi yaitu: perbaikan (guru murid) dan peningkatan mutu pendidikan.

Dalam Permendiknas RI No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah, indikator kompetensi supervisi meliputi: 1). merencanakan program supervisi akademik guna peningkatan profesionalitas guru; 2). melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat dan 3). menindaklanjuti hasil supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalitas guru. Hasil penelitian terhadap tiga indikator kompetensi supervisi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi supervisi kepala MA masuk kategori *cukup* dengan rerata skor 3.7 atau sekitar 74% memenuhi SNP, dengan skor maksimum 5 dan skor minimum 1, standar deviasinya 0.94 dan median 4.00.

Dari tiga indikator tersebut, dua indikator yaitu melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat serta menindaklanjuti hasil supervisi akademik, memperoleh skor sama 3.8 atau 76% memenuhi SNP. Sedangkan indikator

kemampuan merencanakan program supervisi memperoleh skor sebesar 3.5 atau 70 persen memenuhi SNP.

Rendahnya kemampuan kepala MA dalam merencanakan program supervisi disebabkan karena sebagian kepala MA belum terbiasa menyusun perencanaan supervisi sebagai langkah awal dalam kegiatan supervisi; kegiatan supervisi oleh sebagian kepala MA belum diposisikan sebagai kegiatan wajib; hasil supervise terkadang tidak dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki madrasah; sebagian kepala MA memiliki latar belakang pendidikan yang belum memenuhi standar, dsb.

Kompetensi Kewirausahaan

Kompetensi kewirausahaan adalah kemampuan kepala MA dalam menciptakan pembaharuan di madrasah dengan melakukan suatu kegiatan yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu madrasah. Oleh karena itu kepala madrasah sebagai wirasaha harus mampu melakukan perubahan-perubahan tersebut. Dalam Permendiknas No. 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah disebutkan bahwa indikator kompetensi kewirausahaan meliputi: 1). Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan madrasah; 2). Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah; 3). Memiliki motivasi kuat untuk sukses dalam melaksanakan tupoksi sebagai pemimpin madrasah; 4). Pantang menyerah dan selalu mencapai solusi terbaik dalam menghadapi kendala; 5). Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. Hasil penelitian terhadap lima indikator tersebut menunjukkan bahwa kompetensi kewirausahaan kepala MA masuk kategori *cukup* dengan rerata skor 3.5 atau sekitar 70% memenuhi SNP, dengan skor maksimum 5 dan skor minimum 1, standar deviasi 1.02 dan median 3.57.

Dari lima indikator kompetensi kepribadian kepala MA tersebut, kompetensi

tertinggi kepala MA terlihat dari kemampuannya bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah dengan perolehan skor 4.0 atau 80% memenuhi SNP. Sedangkan kompetensi terendah terlihat pada motivasinya untuk mencapai sukses dalam menjalankan tupoksi dan naluri kewirausahaannya dalam mengelola usaha produksi dengan perolehan skor sama yaitu 2.9 atau 58% memenuhi SNP. Kompetensi tertinggi selanjutnya terlihat dari kemampuannya mencari solusi dalam menghadapi persoalan dalam bekerja dengan skor 3.9 atau 78% memenuhi SNP dan kemampuannya motivasinya dalam pengembangan madrasah dengan skor 3.6 atau 72% memenuhi SNP.

Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan sosial kepala MA baik ketika menjalankan tugasnya sebagai pemimpin madrasah, sebagai anggota keluarga dan sebagai anggota masyarakat serta kemampuannya berkomunikasi secara efektif, empatik, ramah dan santun dengan seluruh warga madrasah, keluarga dan masyarakat. Kompetensi sosial juga dapat dilihat dari kemampuannya menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat, menjalin hubungan dan kepekaan sosial terhadap orang lain dan partisipasinya dalam berbagai kegiatan sosial. Dalam Permendiknas No 13 tahun 2007, indikator kompetensi sosial kepala MA meliputi: 1). kemampuan bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan madrasah; 2). kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan 3). memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain. Hasil penelitian terhadap indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sosial kepala MA masuk kategori *Baik* dengan rerata skor 4.1 atau sekitar 82% memenuhi SNP, dengan skor maksimum 5 dan skor minimum 1, standar deviasi 0.98 dan median 4.33.

Kompetensi Kepala MA Berdasarkan Akreditasi

Perbedaan akreditasi menunjukkan bahwa madrasah memiliki perbedaan kualitas pada berbagai aspeknya, karena pemberian akreditasi dilakukan untuk melihat sejauhmana madrasah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Perbedaan kualitas tersebut juga terjadi pada kondisi SDM yang ada termasuk kepala madrasah. Untuk mengetahui kompetensi kepala MA berdasarkan akreditasi (A, B dan C), dilakukan analisis ANOVA satu jalur (*one way ANOVA analysis*) terhadap kompetensi kepala MA akreditasi A, B dan C.

Dari jumlah MA sasaran sebanyak 375 lembaga, sebanyak 114 merupakan MA akreditasi A, 183 MA akreditasi B dan 79 MA akreditasi C, dengan responden 1125 (375 guru umum, 375 guru PAI dan 375 wakil bidang kurikulum). Setelah dilakukan analisis, hasilnya menunjukkan bahwa antara kepala MA akreditasi A, B dan C, memiliki perbedaan kompetensi namun tidak terlalu signifikan. Perbedaan kompetensi kepala MA akreditasi A dan B tidak terlalu signifikan, karena signifikansinya sebesar 0.0 atau lebih kecil dari 0,05 dengan nilai perbedaan atau *mean differencenya* sebesar 0.215. Begitu juga antara kepala MA akreditasi A dan C, juga memiliki perbedaan kompetensi yang tidak terlalu signifikan, karena signifikansinya sebesar 0.0 atau lebih kecil dari 0,05 dengan nilai perbedaan atau *mean difference* sebesar 0.244 atau lebih besar dari 0.05. Sedangkan antara kepala MA akreditasi B dan C, tidak ada perbedaan kompetensi, karena signifikansinya sebesar 0.850 atau lebih besar dari 0,05 dengan nilai perbedaan atau *mean difference* sebesar 0.029.

Kompetensi Kepala MA berdasarkan Status Madrasah

Untuk mengetahui kompetensi kepala MA Negeri dan MA Swasta, juga dilakukan analisis ANOVA satu jalur (*one way ANO-*

VA analysis) terhadap kompetensi kepala MA Negeri dan MA Swasta. Hasil analisis menunjukkan bahwa antara kepala MAN dan MAS memiliki perbedaan kompetensi tidak signifikan, karena signifikansinya sebesar 0.0 atau lebih kecil dari 0,05 dengan nilai perbedaan atau *mean differencenya* sebesar 0.69. Adapun hasil penelitian terhadap kompetensi kepala MA Negeri dan MA Swasta, hasilnya menunjukkan bahwa kepala MAN memperoleh skor 3.9 atau 78% memenuhi SNP dan kepala MAS memperoleh skor 3.7 atau 74 memenuhi SNT.

ANALISIS

Kepala madrasah adalah kunci keberhasilan pendidikan di madrasah. Karena itu untuk menjadi kepala madrasah dibutuhkan kompetensi yang memadai. Sebagai *the key person atau* penanggungjawab utama, ia merupakan faktor kunci untuk membawa madrasah menjadi *center of excellence*, pusat keunggulan dalam mencetak dan mengembangkan sumberdaya manusia madrasah. Madrasah akan menjadi efektif, bermutu, sukses atau sebaliknya madrasah akan tetap stagnan, semua tergantung dengan peran seorang kepala madrasah.

Profesionalisme kepala madrasah menjadi sebuah keharusan. Tidak ada madrasah akan bisa menjadi lebih baik tanpa keberadaan kepala madrasah yang baik pula. Tegasnya, pemeran utama dan penanggungjawab utama adalah kepala madrasah. Karena secara operasional kepala madrasah adalah orang yang paling bertanggungjawab mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyelaraskan semua sumber daya (*resources*) madrasah. Kepemimpinan kepala madrasah merupakan faktor pendorong untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran madrasah yang dipimpinnya menuju madrasah yang bermutu. Bermutu dibidang pelayanan, dibidang pembelajaran, dibidang sarana prasarana, pengembangan SDM, dibidang prestasi akademik dan non akademik. Itulah tugas

suci seorang kepala madrasah: menciptakan madrasah yang bermutu.

Karena tugas keseharian kepala madrasah bergelut dengan mutu/kualitas, sudah seharusnya jika kepala madrasah wajib memiliki kompetensi yang memadai mencakup seluruh aspek baik kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan dan sosial. *Pertama*. Kompetensi kepribadian, menuntut kepala madrasah harus memiliki sifat dan tingkah laku yang terpuji yang dapat menjadi panutan dan contoh bagi seluruh warga madrasah. Sifat dan tingkah laku yang terpuji ini akan tercermin dalam kebiasaan, sikap, nilai, keyakinan, minat, pendirian, keadaan emosional, perasaan, kemampuan dan potensi yang dimiliki. Untuk dapat menjadi kepala madrasah yang baik, hal tersebut harus dimiliki dan melekat pada kepribadian kepala madrasah.

Kedua. Kompetensi manajerial, menuntut kepala madrasah memiliki kemampuan manajemen yang memadai. Aspek-aspek manajemen yang antara lain meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *coordinating* (koordinasi/kerjasama), *actuating* (pelaksanaan), *leading* (kepemimpinan), *communication* (hubungan) dan *controlling* (pengawasan), harus dimiliki. Kepala madrasah harus memiliki perencanaan yang baik agar dapat menyusun program pengembangan madrasah; harus dapat menjalankan fungsi-fungsi organisasi agar dapat menggerakkan madrasah dengan memanfaatkan SDM yang ada; harus dapat melakukan kerjasama yang baik secara internal dan eksternal untuk dapat melaksanakan program madrasah; harus dapat melaksanakan program yang telah disusun secara efektif dan efisien; harus dapat memimpin madrasah dengan baik dengan memberikan pengarahan dan contoh kepada bawahan; harus dapat melakukan komunikasi yang baik kepada seluruh warga madrasah agar tercipta hubungan kerja yang sinergis dan harmonis dan harus dapat melakukan kontrol baik kontrol

terhadap pelaksanaan program maupun kontrol terhadap kinerja seluruh personal madrasah. Dewasa ini, salah satu aspek yang paling lemah dalam dunia madrasah adalah aspek manajemen. Banyak guru senior yang trampil dan berpengalaman dalam mengajar, tetapi miskin dengan *management ability*. Padahal pemberdayaan madrasah hanya dapat dilakukan apabila kepala madrasah memiliki kemampuan manajerial yang lebih dari pada kemampuan yang dimiliki sekarang dan kemampuan para bawahan, untuk membawa madrasah menjadi madrasah yang berkualitas.

Ketiga. Kompetensi supervisi, menuntut kepala madrasah harus mampu melakukan bimbingan dan pengarahan kepada seluruh warga madrasah agar dapat melakukan perbaikan dan peningkatan mutu madrasah, karena tujuan dari supervisi adalah perbaikan dan peningkatan mutu. Oleh karena itu supervisi dapat diarahkan pada dua aspek yaitu supervisi akademik dan manajerial. Supervisi akademik, menitikberatkan pada pengamatan terhadap kegiatan akademik berupa pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Sedangkan supervisi manajerial, menitikberatkan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi madrasah yang berfungsi sebagai pendukung (*supporting*) terlaksananya pembelajaran.

Keempat. Kompetensi kewirausahaan, menuntut kepala madrasah harus mampu melakukan wirausaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Sebagai wirausaha, kepala madrasah memiliki peran sebagai interpreneur. Peran sebagai entrepreneur, kepala madrasah harus berperan dan mampu untuk melihat adanya peluang dan memanfaatkan peluang untuk kepentingan madrasah. Oleh karena itu kepala madrasah harus memiliki kemampuan menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan madrasah; kemampuan bekerja keras untuk mencapai hasil yang efektif; kemampuan memotivasi yang kuat untuk mencapai sukses dalam melaksa-

nakan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala madrasah.

Kelima. Kompetensi sosial, menuntut kepala madrasah harus mampu berperan sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu sebagai kepala madrasah ia harus mampu bekerjasama dengan pihak lain baik secara individual maupun institusional untuk kepentingan madrasah; harus mampu berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungannya; harus memiliki kepekaan sosial terhadap pihak lain yang ditunjukkan dengan rasa empati dan simpati dan diaktualisasikan dalam bentuk ringan tangan membantu sesamanya yang membutuhkan kehadiran dan pertolongannya.

Kelima kompetensi yang menjadi tuntutan kepala madrasah tersebut dalam kenyataan belum dapat terpenuhi secara maksimal. Sebagaimana hasil penelitian yang baru mencapai kategori cukup dengan skor perolehan 76% memenuhi SNP, menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan pada beberapa aspek kompetensi kepala madrasah. Banyaknya kepala madrasah yang hingga saat ini belum memiliki kompetensi memadai tersebut salah satu faktor penyebabnya adalah buruknya rekrutmen yang berjalan selama ini. Rekrutmen yang tidak didasarkan pada aturan yang ada seperti dengan melihat pada kompetensi dan kualifikasi, menjadi penyebab mengapa banyak kepala madrasah kurang kompeten dalam memimpin madrasah. Kenyataan semacam ini banyak di jumpai di madrasah-madrasah swasta. Sebagaimana kita ketahui bahwa madrasah-madrasah swasta umumnya dikelola oleh yayasan dengan manajemen pengelolaan berbasis kekeluargaan. Dalam manajemen kekeluargaan, sering mendahulukan kepentingan keluarga setara dengan kepentingan madrasah, karena salah satu dibentuknya yayasan adalah juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Berdasar pola manajemen yang demikian, maka sangat mungkin terjadi tarik menarik

antara kepentingan keluarga dengan kepentingan madrasah. Akibatnya, kualitas madrasah bukan menjadi satu-satunya tujuan yang harus dibela.

Adanya kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga inilah yang kemudian menjadikan idialitas dalam rekrutmen ketenagaan (khususnya kepala Madrasah) menjadi terabaikan. Sehingga rekrutmen lebih mendahulukan unsur-unsur kekeluargaan dari pada pemenuhan aturan-aturan yang ada. Pola semacam inilah yang kemudian lebih banyak berkontribusi terhadap lemahnya kemampuan sebagian kepala madrasah dalam memimpin madrasah, disamping faktor lain seperti kemampuan mengembangkan diri yang juga masih rendah; kemampuan bermetamorfosa menjadi sosok yang lebih berkualitas dengan melakukan berbagai hal yang mengarah pada profesionalitas dan perbaikan diri. Peningkatan kompetensi kepala madrasah ini akan terjadi manakala ada kemauan yang keras dari diri kepala madrasah tersebut untuk meningkatkan kompetensinya melalui berbagai upaya yang mengarah pada peningkatan kompetensi tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penelitian tentang Kompetensi Kepala MA yang dilihat melalui lima aspek kompetensi (kepribadian, manajerial, supervisi, kewirausahaan dan sosial), hasilnya menunjukkan bahwa secara umum kompetensi kepala MA masuk kategori *cukup* dengan rerata skor 3.8 atau sekitar 76% memenuhi SNP.
2. Dari lima aspek kompetensi tersebut, kompetensi sosial merupakan kompetensi terbaik yang dimiliki kepala MA dengan memperoleh skor 4.1 atau 82% memenuhi SNP dan masuk kategori baik, sedangkan kompetensi kewirausahaan merupakan kompetensi yang

- paling lemah dimiliki oleh kepala MA dengan memperoleh skor 3.5 atau 70% memenuhi SNP, disusul dengan kompetensi supervisi.
3. Pada aspek kepribadian, kompetensi kepala MA masuk kategori *cukup* dengan rerata skor 3.9 atau sekitar 78% memenuhi SNP. Keunggulan kepala MA pada aspek ini terletak pada kemampuannya mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dan kelemahannya terletak pada kemampuannya mengembangkan diri.
 4. Pada aspek manajerial, kompetensi kepala MA masuk kategori *cukup* dengan rerata skor 3.8 atau sekitar 76% memenuhi SNP. Keunggulan kepala MA pada aspek ini terletak pada kemampuan dalam mengembangkan kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran serta kelemahannya terletak pada pemanfaatan teknologi informasi.
 5. Pada aspek supervisi, kompetensi kepala MA masuk kategori *cukup* dengan rerata skor 3.7 atau sekitar 74% memenuhi SNP. Keunggulan kepala MA pada aspek ini terletak pada kemampuannya dalam merencanakan supervisi dan kelemahannya terletak pada kemampuannya melakukan tindak lanjut hasil supervisi.
 6. Pada aspek kewirausahaan, kompetensi kepala MA masuk kategori *cukup* dengan rerata skor 3.5 atau sekitar 70% memenuhi SNP. Keunggulan kepala MA pada aspek ini terletak pada kemampuannya melakukan kewirausahaan dan kelemahannya terletak pada kemampuan memotivasi diri untuk sukses dalam melaksanakan tupoksi serta melakukan wirausaha melalui pengembangan usaha-usahan ekonomi.
 7. Sedangkan pada aspek sosial, kompetensi kepala MA masuk kategori *Baik* dengan rerata skor 4.1 atau sekitar 82% memenuhi SNP. Keunggulan kepala MA pada aspek ini terletak pada kepe-

kaan sosialnya terhadap orang lain dan kelemahannya terletak pada kemampuan kerjasama dengan orang/pihak lain untuk memajukan madrasah.

Saran-saran

Mengingat sampai saat ini masih terdapat beberapa kelemahan pada kompetensi kepala MA, maka direkomendasikan kepada Dirjen Pendis Kementerian Agama sbb:

- a. Meningkatkan kompetensi kepala MA melalui berbagai diklat terkait dengan pengembangan kewirausahaan dengan tema pengembangan *interpreneurship* dan pelaksanaan supervisi, sehingga kepala MA memiliki jiwa *interpreneur* dan mampu melakukan supervisi dengan baik.
- b. Mengingat pelaksanaan diklat selama ini belum mampu mendongkrak kemampuan kepala MA mencapai 100%, sebaiknya diklat dilaksanakan secara berjenjang yaitu diklat tingkat dasar, untuk memberikan kemampuan dasar kepala MA, diklat tingkat lanjutan untuk meningkatkan kompetensi kepala MA mencapai SNP dan diklat tinggi, untuk meningkatkan kompetensi kepala MA pada kategori mahir, sehingga hasil diklat dapat berkontribusi signifikan meningkatkan kompetensi kepala MA..
- c. Melanjutkan program studi lanjutan khusus bagi kepala MA dengan prinsip pemerataan dan menjangkau madrasah-madrasah di seluruh pelosok tanah air termasuk madrasah swasta.
- d. Perlu disusunnya sebuah pedoman pengembangan kompetensi kepala MA terkait dengan lima kompetensi yang harus dikuasai. Sehingga masing-masing kepala MA memiliki dasar untuk mengembangkan kompetensinya,.
- e. Perlu disusun peraturan perundang-undangan terkait dengan rekrutmen

kepala MA, sehingga dalam melakukan rekrutmen, pengelola madrasah memiliki pedoman yang jelas dan rekrutmen tidak dilakukan secara baik.

Kepada para guru (sebagai calon kepala MA) dan kepala MA, sebaiknya lebih giat mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan yang menunjang dalam meningkatkan kemampuan, sebagai upaya menyiapkan diri agar memiliki kesiapan yang matang untuk menjadi kepala MA, karena menjadi kepala MA merupakan tanggungjawab besar yang dituntut mampu membawa madrasah kearah yang lebih berkualitas.

SUMBER BACAAN

Depdiknas (1997): *Petunjuk Pengelolaan Administrasi Sekolah Dasar*. Jakarta. Depdiknas.

Departemen Agama RI (2007): *Petunjuk Pelaksanaan Supervisi Pada Madrasah*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

E. Mulyasa (2004): *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik dan Implementasi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

E. Mulyasa (2004): *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

M. Manulang (2002): *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta. Gajahmada Universitas Press.

Singarimbun, Masri (1995): *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. PT Pustaka LP3ES Indonesia.

Siagian, Sondang P. (1980): *Filsafat Administrasi*. Jakarta. Gunung Agung.

S. P. Hasibuan, H. Malayu (2003): *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta. Bumi Aksara.

Supandi (1996): *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta. Departemen Agama Universitas Terbuka.

Soetopo, Hendiyat dkk (2003): *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta. PT. Bina Aksara

Winardi (1989): *Dasar-Dasar Ilmu Manajemen*. Bandung. Alumni.

Winardi. J (2003): *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Perkasa.

Wahyosumidjo (2001): *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.

<http://belajarpsikologio.com/pengertian-kepribadian>.

<http://social-sciences/education/pengertian-supervisi-pendidikan>.

<http://www.psikologizone.com/pengertian-kepribadian-menurut-awam-dan-psikologi>,

<http://s1pgsd.blogspot.com/2009/02/supervisi-pendidikan-1.html>.

REFORMULASI PARADIGMA KAJIAN KEISLAMAN DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)

Oleh: Saifullah
Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

In the midst of highly rapid social changes, currently the PTAs /IAINs are facing various problems. On one hand, the PTAs / IAINs are in crucial period of their development, while on the other hand, the PTAs are also at the intersection between: 1) various scientific traditions, 2) state and civil society, and, 3) science and religious education and general studies. Therefore, in the face of these issues, PTAI must seek to respond to the existing challenges and the need to reformulate a new paradigm in accordance with the needs of society, which rest on three main pillars, namely independency in management or autonomy, accountability and quality assurance, and with reference to the Three Responsibilities of Higher Education: education / teaching, community service and research. This paper tries to describe how PTAI provides efforts in response to changes in the surrounding and any attempt to do by PTAI in accordance with the global market demands while characterizing the Islamic professionalism.

Keywords: Reformulation, Paradigm, Islamic Studies, PTAI

Abstrak

Di tengah perubahan sosial masyarakat yang begitu cepat, saat ini PTAI/IAIN dihadapkan pada berbagai persoalan. Satu sisi PTAI/IAIN berada pada periode sangat menentukan dalam perkembangannya; sementara di lain pihak PTAI juga berada pada titik temu antara: 1) berbagai tradisi ilmiah, 2) negara dan masyarakat sipil, dan, 3) ilmu pengetahuan dan pendidikan agama serta ilmu pengetahuan umum. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan tersebut, PTAI mesti berupaya merespon tantangan yang ada dan perlunya mereformulasikan kembali paradigma baru sesuai kebutuhan masyarakat yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu kemandirian dalam pengelolaan atau otonomi, akuntabilitas (accountability) dan jaminan mutu (quality assurance), serta dengan mengacu kepada Tridharma Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan/pengajaran, pengabdian masyarakat dan penelitian. Tulisan ini berusaha mendeskripsikan bagaimana upaya PTAI dalam merespon perubahan yang terjadi sekitarnya dan upaya apa saja yang harus dilakukan PTAI sesuai dengan tuntutan pasar global dan tetap mencirikan profesionalitas keislaman-nya.

Kata Kunci: Reformulasi, Paradigma, Kajian Islam, PTAI

PENDAHULUAN

Pada saat ini, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) khususnya IAIN dan STAIN telah dan sedang dihadapkan pada persoalan besar dan mendasar. Persoalan terse-

but adalah menyangkut tentang out put-nya yang hingga kini belum terakomodasi (terlibat/dilibatkan) secara memadai, jika tidak dikatakan secara maksimal ke dalam berbagai aspek kebutuhan kehidupan modern. Padahal tuntutan perubahan terus

Naskah diterima 20 Mei 2012. Revisi pertama, 6 juni 2012. Revisi kedua, 18 Juni 2012 dan revisi terakhir 28 Juni 2012

menggelinding seiring dengan perubahan zaman yang seakan-akan tak dapat dibendung. Persoalan demikian ternyata tidak hanya menimpa PTAI di Indonesia, namun juga telah menggejala hampir di sebagian besar Perguruan Tinggi Agama Islam di belahan dunia.

Sebagaimana dilaporkan Bassam Tibi dari hasil penelitiannya, bahwa hampir seluruh universitas Islam di kawasan Timur Tengah dan Afrika, dia tidak menyebut Indonesia sangat menekankan kapasitas untuk menghafal agar mahasiswa dapat lulus dalam studi mereka; tidak pada kapasitas untuk berfikir kritis dan analitis. Mahasiswa dipersiapkan bukan untuk menjawab tantangan perubahan, tetapi untuk stabilisasi dan gengsi. Alhasil, setelah lulus dari studi, para mahasiswa lebih dibekali dengan ijazah, tetapi tidak dengan kualifikasi yang dapat diterapkan secara bermanfaat dalam proses pembangunan. Tamatan universitas pada umumnya dalam masyarakat, pertama kali tidak ditanya tentang bidang keahlian dan kualifikasi mereka, tetapi tentang gelar akademis yang mereka sandang, dan dari universitas mana mereka peroleh.¹ Pendapat Tibi di atas kiranya sama dengan kondisi Perguruan Tinggi Islam yang ada di Indonesia. Seperti dilaporkan Azyumardi Azra, bahwa mahasiswa di Indonesia belajar ke Perguruan Tinggi pertama-tama adalah untuk mengejar status dan selebar ijazah, bukan keahlian, keterampilan dan profesionalisme.²

Kenyataan yang dilaporkan Tibi dan Azra di atas, tampaknya tidak dapat disalahkan ataupun dibenarkan seluruhnya, walaupun dinyatakan pada tahun 90-an jika dilihat kondisi out put PTAI hingga saat ini, pendapat tersebut seperti cu-

¹ Bassam Tibi. 1991. *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*. h. 110.

² Azyumardi Azra. *Pendidikan Tinggi Islam dan Kemajuan Sains (Sebuah Pengantar)*, dalam Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, (terj.) 1994. H. Afandi dan Hasan Asari. Jakarta: Logos, h. xv.

kup beralasan. Kondisi demikian, paling tidak dapat dibuktikan melalui kajian-kajian empiris yang masih sangat terasa di sebagian PTAI, walaupun tidak sedikit juga ditemukan Perguruan Tinggi Islam yang telah dan sedang melakukan berbagai inovasi dan transformasi baik dari aspek keilmuan maupun aspek-aspek teknis-akademis lainnya. Kajian empiris tersebut paling tidak dapat dilihat dari dua hal, antara lain: *pertama*, di satu sisi, sebagian besar lulusan (alumni) PTAI terlihat tidak dan atau kurang percaya diri dalam merebut peluang kerja jika dibandingkan dengan para lulusan dari Perguruan Tinggi Umum (PTU) lainnya.³ Persoalan ini muncul sebagai konsekuensi logis kompleksitas permasalahan yang dihadapi PTAI pada umumnya mulai dari belum jelasnya landasan epistemologi keilmuan yang dibangun, visi-misinya (sebagai lembaga dakwah, akademis atau praktis-pragmatis?) yang juga belum jelas, sampai kepada persoalan kurikulum, SDM pengelolanya, minimnya anggaran dana yang tersedia, terbatasnya bangunan kerjasama (*stakeholders*), sarana-prasarana

³ Fenomena di atas sebenarnya merupakan fenomena yang tidak hanya terjadi pada PTAI semata, namun juga pada Perguruan Tinggi Umum (PTU). Menurut data yang berhasil dihimpun, jumlah sarjana menganggur melonjak drastis dari 183.629 orang pada tahun 2006 menjadi 409.890 orang pada tahun 2007, ditambah pemegang gelar Diploma I, II, dan III yang menganggur berdasarkan pendataan 2007, lebih dari 740.000 orang. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Fasli Jalal menyatakan, saat ini di Indonesia ada 740.206 lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Mereka terdiri atas 151.085 lulusan D-1 atau D-2; 179.231 lulusan D-3; dan 409.890 lulusan universitas. Mereka tidak bekerja karena kompetensi tidak sesuai, lulusan yang tidak terserap, memilih untuk tidak bekerja, atau mahasiswa lulusan dari program studi yang sudah jenuh (05/02/2009). Sementara pada Agustus 2007, Badan Pusat Statistik merilis angka pengangguran yang mencapai 10,01 juta orang atau turun 8,42% jika dibandingkan dengan angka pengangguran per Agustus 2006 sebanyak 10,93 juta jiwa. BPS juga mencatat, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2007 mencapai 10,28% atau turun bila dibandingkan dengan angka pengangguran terbuka pada Agustus 2006 sebesar 10,28%. Lihat Siti Muyassarotul H. "Ironi Pengangguran Kaum Terpelajar" dalam *Jawa Pos*, Selasa 29 September 2009).

yang kurang memadai, dan sebagainya. *Kedua*, di lain sisi, barangkali juga tidak dapat menutup mata terhadap peran dan kiprah para alumni PTAI dalam perkembangan masyarakat Indonesia selama ini. Tidak sedikit alumninya yang muncul sebagai sosok pemikir, wartawan, bahkan juga politisi di pentas nasional.⁴ Tentu saja sulit untuk menyimpulkan bahwa prestasi tersebut berkat kurikulum yang mereka pelajari ketika menjadi mahasiswa. Akan tetapi, sebagai sebuah institusi, PTAI telah berfungsi dengan baik dalam menyediakan ruang pengembangan bakat-bakat para warganya.

Jika mengikuti identifikasi permasalahan Perguruan Tinggi Islam yang dibuat Tibi dan Azra di atas, maka problem yang sedang dihadapi PTAI adalah: (1) Kurang tumbuhnya tradisi berfikir kritis dan analitis, (2) Mahasiswa tidak dibekali dengan bidang keahlian dan kualifikasi yang dapat diterapkan secara bermanfaat dalam proses pembangunan, dan (3) Mahasiswa ke Perguruan Tinggi pertama-tama adalah untuk mengejar status dan selebar ijazah, bukan keahlian, ketrampilan dan profesionalisme.

Di samping problem-problem besar di atas, nampaknya masih banyak problem yang hingga kini masih sering disaksikan, misalnya: (1) Bagaimana bangunan epistemologi keilmuan yang dikembangkan PTAI selama ini, apakah sudah tepat, kurang tepat, dan atau tidak tepat sama sekali? Jika demikian, bagaimana pemecahannya? Pertanyaan ini penting diajukan, mengingat struktur keilmuan (keagamaan) Islam yang dikembangkan di PTAI pada umumnya selama ini cenderung terkesan dikotomis (jika tidak disebut antagonis) terhadap ilmu-ilmu ke-Islaman dan ilmu-ilmu umum (sosial); (2) Jika demikian, apakah masih perlu dilakukan transformasi/konversi, misal-

⁴ Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed.), "Menilik Dinamika IAIN", dalam *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, (Ditertais Depag. RI., 2000), hal. xxvi.

nya Institut menjadi Universitas, dan atau Sekolah Tinggi menjadi Institut? Pertanyaan ini juga penting diangkat, sebab sebagian besar praktisi dan penentu kebijakan pendidikan di Negeri ini masih menganggap "institusi" sebagai hal sangat penting, sehingga perubahan-perubahan tidak bisa dilakukan tanpa melakukan perubahan terhadap institusinya terlebih dahulu; (3) Bagaimana dengan SDM yang dimiliki PTAI, apakah sudah benar-benar siap dalam menghadapi akselerasi yang terjadi, baik yang menyangkut masalah-masalah sosial, budaya, politik, maupun ekonomi?; dan (4) Persoalan yang tidak kalah penting adalah bagaimana dengan kurikulum, kesediaan dana, dan sarana-prasarana, sistem kerja sama dengan pihak lain (*stakeholders*), baik negeri, swasta, dalam negeri dan luar negeri, apakah sudah cukup memadai atau belum?

Tulisan ini akan berusaha mendiskusikan dengan mengaitkan berbagai kondisi dan kebutuhan, tentunya juga diusahakan menampilkan berbagai solusi alternatif dalam pengembangan PTAI ke depan.

PEMBAHASAN

Konsekuensi di balik Institut, Universitas, Atau pun Sekolah Tinggi

Ada hal penting yang mesti diklarifikasi terlebih dahulu sebelum dibahas mengenai substansi pembahasan dalam tulisan ini, sehingga tidak terjebak kepada istilah-istilah teknis-pragmatis dalam pemahaman selanjutnya. Hal ini penting dikemukakan, mengingat sebagian besar dari komunitas kampus, khususnya para penentu kebijakan pendidikan di Negeri ini, masih menganggap bahwa persoalan wadah (institusi) adalah masalah pertama dan utama sebelum berbicara tentang isi dan substansinya. Hal ini dapat diibaratkan sebuah rumah dan isi rumah/perabot. Memang cukup dilematis, jika berbicara tentang bangunan rumah, tentunya akan berfikir bagaimana

rumah itu bisa terisi. Begitu juga ketika berbicara tentang isi rumah/perabot, maka yang ada dalam benak kita adalah di mana isi rumah/perabot tersebut ditempatkan.

Terkait dengan hal tersebut, bagaimana melihat kembali tentang makna Institut, Universitas, ataupun Sekolah Tinggi. Hal ini penting dikemukakan, mengingat istilah-istilah teknis tersebut seringkali membuat kita terbatas, yang pada gilirannya berakibat pada “tidak leluasnya” untuk mencoba melakukan perubahan-perubahan di dalamnya bila hal tersebut dirasa perlu dan penting. Di antara contoh mutakhir yang dapat dikemukakan adalah adanya ungkapan, bahwa sebuah Institut Agama Islam (IAI) tidak akan dapat melakukan transformasi/konversi ilmu-ilmu ke-Islamannya dengan ilmu-ilmu umum selama tidak merubah institusinya menjadi Universitas. Begitu juga Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), tidak akan dapat mengembangkan paradigma kajian keilmuannya sebelum merubah diri menjadi sebuah Institut, dan seterusnya. Padahal dalam realitas-praksisnya, paradigma keilmuan yang dibangun dari kedua Perguruan Tinggi Islam tersebut senafas dan sejalan. Demikian persoalan yang seringkali menjadi kendala bagi komunitas Perguruan Tinggi Islam, khususnya bagi para pengelolanya. Hal tersebut biasanya terkait dengan kendala-kendala administratif dan birokratif.

Oleh karena itu, ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan di sini, yaitu: Institut, Universitas, Sekolah Tinggi, dan bahkan kita juga mencoba untuk menjelaskan Politeknik, dan Akademi sebagai bagian dari lembaga pendidikan tinggi. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan⁵ bahwa Institut adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan

⁵ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag. RI. 2006. *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI. Tentang Pendidikan*. Jakarta: Direkt. Jend. Pend. Islam Depag. RI, h. 57.

akademik dan/atau pendidikan vokasi⁶ dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, sedangkan Universitas adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sekolah Tinggi adalah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Adapun Politeknik adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Adapun Akademi adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Bertolak dari pengertian di atas, istilah-istilah tersebut memang secara definitif memunculkan perbedaan makna. Aksentuasi yang terlihat pada institut adalah terletak pada “sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu”. Penekanan universitas terletak pada “sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni”, sedangkan sekolah tinggi menekankan pada “satu disiplin ilmu tertentu”. Adapun politeknik aksentasinya pada “sejumlah bidang pengetahuan khusus”. Kemudian pada akademi ditekankan dalam “pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu”.

Dalam praksisnya yang terjadi di lapangan ternyata tidak semua penentu kebijakan pendidikan di Negeri ini yang taat sepenuhnya terhadap amanat Undang-

⁶ Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. *Ibid.*, h. 55.

undang tersebut. Buktinya masih dijumpai dan tidak sedikit institusi pendidikan tinggi yang tidak konsisten untuk melaksanakan aturan tersebut. Misalnya saja, di lingkungan perguruan tinggi Islam, seperti IAI/STAI/PTAI lainnya, mereka tidak hanya membuka fakultas/jurusan/prodi dari sekelompok dan/atau satu disiplin ilmu pengetahuan ke-Islaman semata, namun juga didapati berbagai kelompok dan rumpun ilmu pengetahuan selain ilmu-ilmu ke-Islaman (ilmu umum). Begitu juga yang terdapat pada perguruan tinggi umum semisal politeknik dan akademi. Di sana didapati pula tidak hanya terdiri dari sejumlah bidang pengetahuan khusus, tapi juga merambah kepada bidang kajian keilmuan yang mestinya menjadi wilayah kajian pada perguruan tinggi di tingkat institut dan juga sekolah tinggi. Kondisi seperti ini yang dalam perkembangan selanjutnya membawa konsekuensi pada problem paradigmatis kajian-kajian keilmuan selanjutnya. Termasuk yang terjadi di lembaga pendidikan perguruan tinggi Islam (PTAI).

Dengan demikian, berbicara tentang alih status/transformati/konversi dari Institut ke-Universitas, Sekolah Tinggi ke-Institut sekiranya bukanlah hal signifikan, jika yang ingin dilakukan perubahan-perubahan adalah menyangkut substansinya. Dengan kata lain, jika ingin merubah PTAI sebagai lembaga *par-excelence* yang dapat memenuhi segala tuntutan zaman, tidaklah harus melakukan transformasi/konversi kelembagaan. Transformasi dirasa relevan manakala menyangkut perbaikan/perubahan substansi: visi-misi, bangunan epistemologis, kurikulum, pengembangan SDM, sistem rekrutmen, bangunan kerjasama dengan pihak lain (*stakeholders*), dan lain-lain. Tentunya harus senantiasa dikorelasikan dengan tuntutan dan kebutuhan, baik pada skala lokal, nasional maupun global.

Meretas Sejarah Kajian ke-Islaman pada

PTAI di Indonesia

Rencana besar transformasi IAIN menjadi UIN dan/atau STAIN akan di-IAIN-kan kembali (yang awalnya sebagai IAIN cabang yang berada di daerah-daerah) hingga kini masih *debatable* dan mengandung berbagai kontroversi. Kontroversi itu muncul sebagai akibat dari perspektif epistemologis yang mempertanyakan, apakah benar selama ini Islam mengikuti dualisme kajian ke-Islaman sebagaimana yang banyak diperdebatkan. Hal ini kemudian menjadi masalah tersendiri. Yang demikian juga tidak dapat dilepaskan dari akibat rendahnya standar mutu manajemen (*quality management system*), sehingga masalah-masalah tersebut juga sangat berpengaruh terhadap out put yang dianggap tidak atau kurang mampu bersaing di era persaingan global. Oleh karena itu Kementerian Agama melindungi wacana pengembangan IAIN menjadi UIN dan STAIN menjadi IAIN. Dalam perkembangannya wacana tersebut terus menggelinding dan menjamur bagai jamur di musim hujan. Walaupun tidak semua IAIN dan STAIN mengikuti wacana tersebut. Akan tetapi wacana tersebut hampir tidak terdengar lagi gaungnya seiring dengan diterbitkannya Surat Edaran Dirjend Depag RI. No. DJ.II/PP.03.2/698/2006, tgl 2 Agustus 2006 perihal tidak disetujuinya proses usulan baru tentang perubahan status kelembagaan PTAI, kecuali PTAIS yang sudah diproses lebih dulu. Akan tetapi dalam prakteknya, surat edaran Dirjend ini seakan terabaikan seiring dengan munculnya usulan baru alih status dari beberapa perguruan tinggi Islam, dan dalam kenyataannya juga dapat diproses.

Jika dirunut ke belakang, dalam sejarahnya yang panjang, kajian Islam (*Islamic studies*) di Indonesia sebenarnya bukanlah tumbuh dan berkembang dari realitas historis yang kosong, ia hadir secara kronologis dalam konteks ruang dan waktu yang jelas, sebagai respon sejarah atas sejumlah perso-

alan keagamaan yang dialami umat Islam di negeri ini. Secara substantif, kajian Islam sebenarnya sudah dimulai semenjak agama ini datang ke Indonesia pada abad ke 13 dan mencapai momentum spiritualnya pada abad ke 17. Kajian ke-Islaman di masa-masa ini diwarnai oleh proses transformasi nilai keagamaan secara besar-besaran yang dilakukan oleh para pemimpin sufi dan ulama, terutama di lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren.⁷ Proses transformasi ke-Islaman ini berlangsung hingga Indonesia memproklamasikan hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, saat itu bangsa Indonesia dituntut untuk mulai memikirkan dan membenahi proses pelembagaan di segala sektor kehidupan bangsa, tidak terkecuali sektor kehidupan keagamaan sebagai elemen penting, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat religius.

Proses transformasi ke-Islaman pada masa-masa ini tidak bisa dilepaskan dari peran para ulama dan tokoh-tokoh pemimpin gerakan sufi karena diakui terdapat keterkaitan historis yang sangat ekstensif antara umat Islam di Indonesia dengan para ulama di Jazirah Arab seperti Mekah dan Madinah, belakangan Kairo.⁸

Hubungan keagamaan yang sudah sedemikian *established* di antara kedua komunitas Muslim ini pada gilirannya menciptakan sebuah iklim *intellectual exchanges* yang relatif dinamis dan dialektis antar mereka. Daratan Jazirah Arab selanjutnya dikenal sebagai oase subur yang memproduksi karya-karya intelektual ke-Islaman yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Proses transmisi epistemologis ini berlangsung melalui beragam cara, baik langsung maupun tidak langsung,

⁷ M. Atho Mudzhar, "In the Making of Islamic Studies in Indonesia (In Search for a Qiblah)," makalah disampaikan dalam seminar internasional *Islam in Indonesia: Intellectualization and Social Transformation*, di Jakarta 23-24 November 2000, h. 1.

⁸ Azyumardi Azra. 1994. *Jaringan Intelektual Ulama Nusantara*. Bandung: Mizan, h. 8

mulai dari diseminasi hasil karya-karya intelektual ulama Timur Tengah di banyak lembaga pesantren maupun pengiriman generasi muda Islam yang ingin memperdalam ilmu agamanya ke negara-negara di wilayah ini.⁹

Sekalipun Indonesia memiliki kedekatan hubungan intelektual dengan tradisi keagamaan di Arab, terutama Mekah dan Madinah, itu tidak berarti bahwa Islam Indonesia bisa dikatakan sebagai sekadar replica Islam Arab. Proses transmisi ke-Islaman dari tradisi intelektual Arab ke tradisi intelektual Indonesia berlangsung dalam pola yang sangat dinamis, unik, dan kompleks, disesuaikan dengan kosmologi keagamaan domestik, sehingga wajah Islam yang berkembang di Indonesia dalam banyak hal bisa berbeda dari wajah Islam "asli" Timur Tengah. Sekalipun demikian, Islam Indonesia tidak serta merta dianggap sebagai Islam pinggir (*peripheral Islam*) seperti yang diklaim oleh Geertz.¹⁰ Pencitraan terhadap Islam Indonesia yang reduktif dan distortif ini bahkan telah dmentahkan oleh Woodward,¹¹ Ricklefs,¹² dan Hefner¹³ yang tetap memandang Islam di negeri ini sebagai varian keagamaan yang tidak tercerabut dari akar-akar meminjam istilah Fazlur Rahman, "Islam normatif".¹⁴ Persoalan wajah Islam Indonesia yang berbeda dari wajah Islam Timur Tengah dikatakan mereka hanya pada dataran kultural historis semata akibat proses adaptasi, asimilasi

⁹ Mona Abaza. 1994. *Indonesian Students in Cairo*. Paris: EHESS, h. 18

¹⁰ Clifford Geertz. 1960. *The Religion of Java*. London: The Free Press of Glencoe, h. 18

¹¹ Mark R. Woodward. 1989. *Islam in Java, Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*. Tucson: The University of Arizona Press

¹² Merle C. Ricklefs. 1979. *Six Centuries of Islamization in Java*, dalam Nehemia Levtzion (ed.), *Conversion to Islam*. New York: Holmes and Meir, h. 100-128

¹³ Robert W. Hefner. 1987. *Islamizing Java? Religion and Politics in Rural East Java*. *The Journal of Asian Studies* 46: 3 (August 1987), h. 533-54

¹⁴ Fazlur Rahman. 1980. *Islam*. Chicago: The University of Chicago Press, h. 45

dan akulturasi dalam jangka waktu yang relatif panjang, bukan pada dataran substantif doktrinalnya.

Sebagai bukti bahwa proses transmisi ke-Islaman di Indonesia berlangsung secara unik dan kompleks bisa dijustifikasi melalui proses belajar mengajar yang berlangsung di lembaga pesantren yang mengambil bentuk dan modus operandi cukup unik.¹⁵ Di daratan Arab sendiri tidak ditemui padanan istilah pesantren yang secara terminologis berarti tempat berlangsungnya proses belajar mengajar antara kyai dan santri di sebuah asrama bersama antara mereka. Istilah santri sendiri bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal dari bahasa Jawa kuno (Pallawa), *cantrik*, yang berarti murid atau siswa yang sedang menuntut ilmu-ilmu kerohanian. Pengadopsian khasanah budaya domestik ini menjadi legitimasi betapa Islam Indonesia sarat dengan muatan-muatan material non-Islam yang tidak bisa dijumpai di negara asalnya, yaitu Arab. Keunikan di tingkat budaya ini menjadi penguat proses pelebagaan kajian ke-Islaman di wilayah non-Arab seperti Indonesia.

Keunikan lain yang bisa dijumpai dari fenomena pesantren adalah digunakannya bahasa "Arab pegon" (Arab Jawi), yakni gabungan antara bahasa Jawa yang ditulis dengan karakter huruf Arab sebagai sarana memahami sejumlah teks-teks kitab kuning yang berbahasa Arab. Bahkan bahasa Arab pegon ini tidak saja digunakan di lembaga-lembaga pesantren di Indonesia, tetapi juga digunakan di dunia Melayu (kini Malaysia, Pattani, dan Brunei Darussalam).¹⁶ Tidak seperti di belahan dunia Islam lainnya, terutama di Timur Tengah yang tetap menggunakan bahasa Arab sebagai sarana pengkajian ke-Islaman, tradisi intelektual

¹⁵ Zamakhsyari Dhofier. 1989. *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, h. 5

¹⁶ Anthony Reid, "Introduction," dalam Anthony Reid (ed.), 1993. *The Making of an Islamic Political Discourse in Southeast Asia*. Centre of Southeast Asian Studies: Monash University, h. 1-4.

di Jawa berkembang dalam bahasanya sendiri, sementara tidak meninggalkan nuansa bahasa Arab sebagai bahasa penting bagi kajian ke-Islaman secara umum.

Proses pelebagaan kajian Islam dalam pesantren terus berlangsung seiring dengan terjadinya proses transformasi dan modernisasi lembaga tradisional ini.¹⁷ Proses transformasi dan modernisasi ini terjadi ketika kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan sekolah kepada masyarakat pribumi yang dampaknya dirasakan oleh pesantren melalui penyelenggaraan sistem pembelajaran kelas (*classical*). Sebagai akibat dari penyelenggaraan pembelajaran model ini, maka berdirilah sekolah-sekolah (madrasah) di lingkungan pesantren yang hanya mengajarkan materi pendidikan agama klasik yang meliputi fiqh, tasawuf, etika Islam, dan lain sebagainya. Bahkan jauh setelah masa kemerdekaan, banyak pesantren yang juga memberikan pengajaran materi sekuler seperti ilmu bumi (geografi), ilmu hitung (matematika), dan ilmu alam (fisika dan biologi), serta ilmu bahasa (Inggris). Pola pengajaran yang sekuler ini biasanya berlangsung di sejumlah pesantren yang mengadopsi metode pengajaran modern seperti Gontor dan Assalam di Solo, yang kemudian diikuti oleh pesantren-pesantren lainnya dengan pola dan sistem pengajaran yang sama. Proses transformasi dan modernisasi pesantren terutama sepanjang dua dekade terakhir ini mengindikasikan adanya sensibilitas lembaga ini terhadap perubahan zaman yang pada gilirannya turut membentuk tradisi kajian Islam di Indonesia secara keseluruhan.¹⁸

Salah satu implikasi mendasar adanya proses transformasi lembaga pendidikan ini menyebabkan sebagian elemen masyarakat

¹⁷ Abdurrahman Wahid. 2001. *Menggerakkan Tradisi*. Yogyakarta: LkiS, h. 37-48

¹⁸ Azyumardi Azra, "The Making of Islamic Studies in Indonesia," makalah disampaikan dalam seminar internasional *Islam in Indonesia: Intellectualization and Social Transformation*, di Jakarta 23-24 November 2000, h. 4

muslim menginginkan kehadiran lembaga tinggi bagi pengkajian dan pengajaran Islam (*Islamic higher learning institution*). Salah satu respon terhadap keinginan semacam ini di-suarakan oleh Satiman Wiryoandjojo --seorang pemimpin Masyumi dan belakangan menjadi perdana menteri-- akan pentingnya mendirikan lembaga pengkajian Islam dimaksud melalui harian Pedoman Masyarakat pada tahun 1938.¹⁹ Hal ini ditujukan agar status muslim meningkat di hadapan koloni Belanda. Menyambut gagasan tersebut, pada bulan April 1945, empat bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, sekelompok pemimpin muslim berkumpul di Jakarta guna membentuk sebuah komisi persiapan yang dipimpin oleh Moh. Hatta yang selanjutnya menjadi wakil presiden RI pertama. Tugas komisi ini adalah mempersiapkan pembentukan lembaga tinggi Islam yang diwujudkan pada tanggal 8 Juli 1945 dengan berdirinya Sekolah Tinggi Islam (STI).²⁰

Setelah kemerdekaan RI, seiring dengan berpindahannya ibukota akibat revolusi dari Jakarta ke Yogyakarta, maka keberadaan Sekolah Tinggi Islam tersebut mengikuti gerak para aktivis Republik. Pada tanggal 10 April 1946, sebuah perguruan Islam berdiri di Yogyakarta dan kemudian beralih status menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 10 Maret 1948 dengan empat fakultas: Kajian Islam, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Sebagai penghargaan pemerintah atas perjuangan umat Islam dalam memperoleh kemerdekaan RI, maka pada tahun 1951 pemerintah meresmikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang diambilkan dari fakultas Kajian Islam UII yang memiliki empat fakultas: Fakultas Dakwah (belakangan menjadi Fakultas Dakwah dan Ushuluddin), Fakultas Qada' (belakangan menjadi Fakultas Syari'ah), dan Fakultas Tarbiyah. Kurang lebih delapan tahun kemudian Fakultas Adab ditambahkan melengkapi keempat

¹⁹ Mudzhar, "In the Making", h. 2

²⁰ Mudzhar, "In the Making", h. 2

fakultas yang ada setelah ia diintegrasikan dengan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) di Jakarta, sebuah akademi yang didesain untuk mempersiapkan calon-calon tenaga kepegawaian di Departemen Agama RI.²¹

Integrasi kedua lembaga pendidikan tinggi Islam di atas melahirkan sebuah lembaga pengkajian Islam yang kemudian disebut sebagai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan lima fakultas: Dakwah, Ushuluddin, Shari'ah, Tarbiyah, dan Adab. Sementara IAIN Yogyakarta tetap berdiri secara independen, lembaga serupa di Jakarta juga berdiri sebagai lembaga independen. Keduanya merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam tertua di Indonesia.²² Belakangan ini, muncul ide di kalangan pembuat kebijakan pendidikan tinggi Islam untuk mengembalikan semangat kajian Islam yang lebih komprehensif lagi; disiplin keilmuan yang dicakup IAIN

²¹ Mudzhar, "In the Making", hal. 2, Cf. Azra, "The Making", h. 4

²² Belakangan jumlah lembaga yang sama di seluruh Indonesia menjadi 14 IAIN; 7 buah di Sumatera, 5 di Jawa, 1 di Kalimantan, dan selebihnya di Sulawesi, beserta semua cabang masing-masing. Pada tahun 1997, cabang-cabang masing-masing ke 14 IAIN tersebut ditransformasikan ke dalam lembaga pendidikan tinggi Islam yang lebih kecil lagi tapi independen yang disebut sebagai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang keseluruhannya berjumlah 33 buah dan tersebar diseluruh pelosok tanah air. Di samping lembaga-lembaga tinggi Islam Negeri ini, sejumlah perguruan tinggi dan universitas swasta juga berdiri di mana fakultas kajian Islam mengambil tempat di dalamnya. Jumlah mahasiswa di seluruh IAIN dan STAIN seluruh Indonesia, menurut data yang dihimpun oleh DEPAG adalah 90.000 orang. Jumlah ini diambil dari buklet Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000). Data tersebut sudah berubah, di mana 6 dari 14 IAIN tersebut berubah menjadi UIN (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan UIN Alauddin Makassar). Begitu juga STAIN yang berjumlah 33, kemudian ada 3 STAIN yang mentransformasikan diri menjadi IAIN, yaitu: IAIN Mataram, IAIN Serang, dan IAIN Slt. Amal Gorontalo. Dengan demikian jumlah IAIN ada 12, UIN ada 6, STAIN menjadi 30, dan jumlah PTAIS ada 272. Lihat: www.ditpertais.net.

tidak melulu meliputi disiplin ilmu agama semata, namun juga ilmu-ilmu umum yang bernuansa ke-Islaman, seperti psikologi, komunikasi, sosiologi, antropologi, dan lain sebagainya. Ke depan, IAIN akan dikembangkan dalam bentuk Universitas Islam Negeri (UIN) yang membawahi bidang kajian ke-Islaman dan ilmu-ilmu sekuler.

Problem Paradigmatik Kajian ke-Islaman di PTAI

Rencana besar transformasi IAIN menjadi UIN sebagaimana dijelaskan di atas didasari oleh kesadaran futuristik umat Islam terhadap urgensi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyesuaikan diri dengan akselerasi perubahan zaman yang begitu cepat. Selain itu, transformasi itu muncul sebagai wujud kesadaran umat Islam yang tidak mau mengikuti pola dualisme keilmuan, antara ilmu-ilmu ke-Islaman dan ilmu-ilmu sekuler, sebagai dampak historis kebijakan kolonialisme Belanda. Namun terlepas dari nilai tambah proses transformasi semacam ini, terdapat problem paradigmatik kajian ke-Islaman di PTAI. Hal ini yang di kemudian fenomena pengembangan IAIN menjadi UIN masih *debatable* dan menyimpan banyak kontroversi. Kontroversi itu antara lain muncul dari perspektif epistemologis yang mempertanyakan apakah benar selama ini Islam mengikuti dualisme kajian ke-Islaman sebagaimana yang banyak diperdebatkan. Sebenarnya langkah rekonsiliasi epistemologis tersebut tidak harus dilakukan dengan cara mengembangkan IAIN menjadi UIN yang membawahi disiplin ilmu agama maupun sekuler. Sebab universitas-universitas negeri yang selama ini dianggap sekuler pun pada hakikatnya merupakan bagian dari umat Islam. Bukankah dengan dibukanya jurusan-jurusan umum di IAIN justru akan semakin merunyamkan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia? Bukankah kehadiran keduanya menjadi saling overlapping antara yang satu dengan lainnya?

Terlepas dari persoalan kontroversi transformasi IAIN menjadi UIN, hal menarik yang perlu digarisbawahi di kalangan IAIN/PTAI adalah kecenderungan kajian Islam yang berlangsung di dalamnya. Sejak berdirinya, lembaga pendidikan tinggi Islam ini membawa dua tugas utama: sebagai lembaga keagamaan dan sebagai lembaga keilmuan. Sebagai sentral pengkajian keagamaan, IAIN/PTAI membawa misi religius untuk memberikan pencerahan masyarakat muslim dalam memahami ajaran Islam (lembaga dakwah). Sedangkan sebagai lembaga keilmuan, IAIN/PTAI diharapkan menjadi *avant garde* dalam mengkaji Islam sebagai sebuah disiplin akademis, bukan sebagai doktrin agama.²³ Kedua fungsi ini tidak selamanya berjalan secara harmonis dan berseiringan, bahkan tidak jarang ditemukan konflik di antaranya. Di satu sisi, sebagai sebuah lembaga akademis, IAIN/PTAI harus mengikuti *rules of the game* kehidupan akademis yang memperlakukan kajian terhadap agama dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah dan akademis yang hasilnya tidak jarang bertentangan dengan aspek normatif Islam. Di sisi lain, IAIN/PTAI diharapkan berfungsi sebagai lembaga keagamaan yang cenderung menafikan prinsip-prinsip akademis murni.

Dalam sejarah perkembangannya, IAIN/PTAI di Indonesia pernah didominasi oleh pendekatan kajian normatif doktrinal yang lebih mengedepankan dimensi legal formal Islam (*shari'ah*) dan teologi (*ushul ad-din*). Hal yang demikian terjadi sebagai implikasi logis dari terlalu mengedepannya karakteristik IAIN/PTAI sebagai lembaga keagamaan. Hasil dari pendekatan ini adalah munculnya kecenderungan kajian Islam yang sangat skriptural, mengacu kepada praktik-praktik ibadah dan akidah dalam Islam. Hal ini, menurut Azra, disebabkan oleh dominasi pendekatan normatif-ideal-

²³ Azyumardi Azra, "Studi-studi Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri," dalam *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 169-70

tik yang dikembangkan di sejumlah perguruan tinggi Islam Timur Tengah, utamanya al-Azhar Kairo.²⁴ Bahkan yang lebih parah lagi, IAIN/PTAI cenderung memfokuskan diri pada satu aliran pemikiran (*school of thought*) atau madzhab dalam Islam. Sementara madzhab pemikiran Islam yang lain tidak dipelajari karena dianggap akan menyesatkan bangunan keimanan mereka.

Berkenaan dengan pelembagaan tradisi kajian Islam di IAIN/PTAI yang cenderung normatif teologis itu, sejumlah kritik menarik telah dilontarkan oleh Sudirman Tebba. Menurutnya, IAIN/PTAI telah gagal mengembangkan tradisi keilmuan klasik yang fondasinya telah diletakkan oleh para 'ulama. Kegagalan tersebut tidak hanya pada pengembangan metode kajian Islam di bidang hukum Islam saja, tetapi juga di bidang teologi. Misalnya di bidang fiqh, landasan berpikir yang telah diletakkan oleh para ulama tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat IAIN/PTAI lainnya, akan tetapi yang dipelajari oleh mereka justru produk hukumnya, bukan metode ijtihadnya. Akibatnya, IAIN/PTAI tidak mampu menghadirkan citra Islam yang dinamis, melainkan citra stagnan. Sementara itu di bidang teologi, IAIN/PTAI juga hanya berkutat pada kajian historis pemikiran para ulama klasik seperti pemikiran Mu'tazilah, Ash'ariyah dan Maturidiyah yang terlepas sama sekali dari analisis konteks realita sosial yang mengitarinya.²⁵ Sebagai akibatnya, kajian tersebut lebih merupakan refleksi romantisisme masyarakat IAIN/PTAI yang mendambakan masa kejayaan umat Islam seperti terjadi pada abad pertengahan.

Namun demikian, kecenderungan kajian Islam yang demikian normatif teologis tersebut tidak berlangsung selamanya, sebab kecenderungan baru muncul sebagai respons IAIN/PTAI terhadap fenomena

²⁴ Azra, "The Making", hal. 6

²⁵ Sudirman Tebba. 1993. "Orientasi Mahasiswa dan Kajian Islam IAIN," dalam *Islam Orde Baru*. Yogyakarta: Tiara Wacana, h. 83-92

pembangunan dan perubahan zaman. Kecenderungan kajian Islam yang terjadi di awal dekade 1970-an ini lebih mengarah pada kajian Islam yang terkait dengan konteksnya, bersifat sosio-kultural yang menyejarah. Program pembangunan nasional yang mengambil modernisasi sebagai tujuannya cenderung menggiring kaum intelektual muslim seperti Nurcholish Madjid, Harun Nasution²⁶ dan Mukti Ali untuk mereorientasi arah kajian Islam yang berlangsung di IAIN (Sekadar untuk diketahui, ketiga orang tersebut juga produk dari pendidikan Barat). Kecenderungan perubahan pendekatan ini bahkan semakin diperlancar dengan dikirimkannya para intelektual muda muslim ke barat untuk meneruskan jenjang studinya.

Hasil paling mendasar dari upaya reorientasi visi kajian Islam di lembaga tinggi Islam ini adalah heterogenitas pendekatan terhadap Islam; Islam tidak hanya dilihat dari satu pendekatan atau madzhab pemikiran saja, melainkan juga berbagai madzhab pemikiran lain yang belum pernah diajarkan di IAIN/PTAI lain. Pendekatan kajian Islam semacam ini turut memberikan kontribusi terhadap diterapkannya metode pengkajian Islam yang lebih empiris dan akademis, tanpa menegasikan kenyataan Islam sebagai sistem keyakinan dan agama. Sebagai akibatnya, mahasiswa cenderung lebih terbuka dan toleran terhadap upaya

²⁶ Betapa pemikiran pembaruan Islam memiliki dampak yang begitu ekstensif di IAIN bisa dilihat dari digunakannya karya-karya teks Harun Nasution sebagai literatur wajib bagi mahasiswa IAIN. Terlebih ketika dia memimpin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan belakangan direktur program pasca sarjana di lembaga yang sama. Dalam diskursus kajian teologi ke-Islaman, barangkali dialah yang pertama kali meletakkan landasan berteologi secara kritis-rasional terhadap doktrindoktrin akidah Islam. Ia pula yang secara terang-terangan memproklamirkan diri sebagai pendukung utama aliran Mu'tazilah dalam berteologi yang senantiasa mengedepankan proses berpikir rasional. Lihat Richard Martin et. al., "Harun Nasution and Modern Mu'tazilism," dalam Richard Martin (ed.). 1997. *Defenders of Reason in Islam*. Oxford: Oneworld, h. 119-179

pemahaman agama yang berbeda.²⁷ Kondisi ini pada gilirannya mendorong lahirnya pendekatan non-madzhabi dalam kajian Islam di Indonesia, seiring dengan semakin mudarnya loyalitas dan fanatisme buta umat Islam terhadap madzhab tertentu.²⁸

Dimensi lain dari fenomena perubahan pendekatan dalam kajian Islam di IAIN dan PTAI pada umumnya adalah semakin sadarnya umat Islam terhadap realitas sosio-kultural mereka. Kesadaran semacam ini bahkan membawa pada implikasi radikal terhadap redefinisi relasi agama-manusia; apakah manusia didedikasikan untuk agama ataukah sebaliknya, agama untuk manusia. Pendekatan normatif jelas mengandaikan relasi yang menempatkan agama sebagai target pengabdian manusia. Sementara itu, pendekatan kontekstual empiris mengandaikan relasi yang menempatkan agama sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia di dunia, bukan untuk kepentingan-kepentingan ukhrawi manusia semata. Jadi, agama sebagai *way of life*, mediasi yang mengantarkan manusia untuk mendapatkan ridla Allah. Bukan agama sebagai tujuan akhir seperti yang diasumsikan dalam pendekatan normatif teologis.

Perubahan pendekatan kajian Islam di IAIN/PTAI juga membawa konsekuensi perubahan pendekatan dalam memandang realitas agama lain selain Islam. Se-

²⁷ Kekhawatiran terjadinya degradasi kualitas keimanan seseorang ketika menerapkan metode ilmiah dalam kajian agama sebenarnya sudah pernah dijawab oleh Max Müller dalam karyanya *Introduction to the Science of Religion* (1873). Dia mengatakan bahwa pendekatan *scientific* dalam kajian agama tidak seharusnya menambah keraguan terhadap keyakinan agama si peneliti, melainkan justru bisa semakin memperkuat bangunan keimanannya. Hal yang demikian ini bisa terjadi ketika si peneliti mampu melakukan pemaknaan-pemaknaan yang cukup berarti terhadap hasil-hasil temuannya untuk kemudian diinternalisasikan dalam sistem keimanannya sendiri. Periksa, Peter Connolly, "Psychological Approaches," dalam Peter Connolly. 1999. *Approaches to the Study of Religion*. London & New York: Casell, h. 139

²⁸ Azra, "The Making," h. 7

belumnya, pendekatan dalam mengkaji agama-agama lain cenderung menerapkan pendekatan apologetik untuk menjustifikasi kebenaran Islam atas agama-agama lain. Sementara itu, komunitas non-Islam dianggap sebagai orang kafir yang halal darahnya untuk dibunuh. Terutama sejak Mukti Ali kembali dari Canada setelah menyelesaikan program MA-nya, pendekatan dalam kajian perbandingan agama berubah secara radikal. Paradigma *truth claim* yang dianut sejak lama oleh IAIN/PTAI secara bertahap mengalami pergeseran dan digantikan oleh paradigma berpikir yang lebih toleran, inklusif, dan pluralistik di mana kehadiran agama-agama yang berbeda di muka bumi ini dianggap sebagai hukum alam (*sunnatullah*) yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Kehadiran mereka tidak boleh diperangi sepanjang tidak membuka perlawanan dengan umat Islam, dan di antara mereka terikat hukum mu'amalah yang saling mengikat. Perubahan paradigma ini semakin diperkokoh dalam tatanan khidupan beragama secara nasional ketika Mukti Ali diangkat sebagai Menteri Agama RI.²⁹

Sebuah pertanyaan mendasar telah dimunculkan oleh Atho Mudzhar berkenaan dengan kajian Islam di IAIN dan juga pada PTAI umumnya. *Pertama*, dengan adanya transformasi besar-besaran dalam bidang kajian Islam di lembaga ini, harus dirumuskan secara tegas mana kajian ilmu yang termasuk inti dan mana yang termasuk ilmu-ilmu bantu? Pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat transformasi kajian Islam di IAIN/PTAI yang semakin diperkaya dengan berbagai pendekatan dan perspektif "sekuler" itu bukan bertujuan untuk mengerdilkan kajian Islam itu sendiri, melainkan agar kajian Islam bisa ditopang oleh bidang kajian yang lebih membumi,

²⁹ Nico Kaptein, "The Transformation of the Academic Study of Religion: Examples from Netherlands and Indonesia," makalah disampaikan dalam seminar internasional *Islam in Indonesia: Intellectualization and Social Transformation*, di Jakarta 23-24 November 2000, hal. 11

menyejarah dan empiris. Dalam perspektif ini, fiqh, misalnya, harus diklasifikasikan sebagai ilmu inti atau ilmu bantu. Demikian pula sosiologi ataupun antropologi, termasuk ilmu inti atau ilmu bantu? Ini semua dalam rangka mendudukkan persoalan secara proporsional, jangan sampai ada gejala *overlapping* antara satu dan lainnya.³⁰ *Kedua*, Bagaimana cara mendekati Islam normatif yang bersifat dogmatis teologis itu? Sebagai konsekuensi logis dari pertanyaan ini, perlu dimunculkan studi antar dan interdisipliner untuk memahami fenomena Islam ideal ke dalam kerangka historisnya. *Ketiga*, berpijak pada serangkaian pertanyaan di atas, sudah waktunya bagi IAIN/PTAI lain untuk membuka program studi-program studi (prodi) umum untuk membangun pemahaman Islam yang lebih komprehensif seperti yang telah dilakukan di al-Azhar dan sejumlah universitas lain di dunia Islam,³¹ tidak harus mengubah/mengganti identitas "Pendidikan Tinggi Islam"-nya dan atau merubah "institusi"-nya, misalnya dari Institut menjadi Universitas, Sekolah Tinggi menjadi Institut, dan sebagainya.

Namun demikian, kondisi sosio-kultural bagi kedua lembaga pendidikan tinggi Islam dimaksud nampaknya tidaklah sama. Barangkali setting Mesir agak bersahabat bagi dibukanya *full-fledged university* seperti al-Azhar, sementara Indonesia agak kompleks. Sekalipun demikian, IAIN/PTAI tetap harus mengevaluasi ulang misi orisinalnya sebagai pijakan disusunnya ilmu inti (*core subjects*) dan ilmu bantu (*auxiliary subjects*). Persoalannya, bagaimana melakukan itu semua?

³⁰ Atho Mudzhar. 1998. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 29

³¹ Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam*, h. 30-31

PENUTUP

Kesimpulan

Fenomena tentang alih status/transformati/konversi dari Institut ke-Universitas, Sekolah Tinggi ke-Institut sekiranya bukanlah hal signifikan, jika yang ingin dilakukan perubahan-perubahan adalah menyangkut substansinya, artinya, jika ingin merubah PTAI sebagai lembaga *par-excelence* yang dapat memenuhi segala tuntutan zaman, tidaklah harus melakukan transformasi/konversi kelembagaan. Transformasi dirasa relevan manakala menyangkut perbaikan/perubahan substansi: visi-misi, bangunan epistemologis, kurikulum, pengembangan SDM, sistem rekrutmen, bangunan kerjasama dengan pihak lain (*stakeholders*), dan lain-lain. Tentunya harus senantiasa dikorelasikan dengan tuntutan dan kebutuhan, baik pada skala lokal, nasional maupun global.

Rencana besar transformasi IAIN menjadi UIN dan/atau STAIN akan di-IAIN-kan kembali hingga kini masih *debatable* dan mengandung berbagai kontroversi. Kontroversi itu muncul sebagai akibat dari perspektif epistemologis yang mempertanyakan, apakah benar selama ini Islam mengikuti dualisme kajian ke-Islaman sebagaimana yang banyak diperdebatkan. Hal ini kemudian menjadi masalah tersendiri, sehingga masalah-masalah tersebut juga sangat berpengaruh terhadap out put yang dianggap tidak atau kurang mampu bersaing di era persaingan global.

Dari pemetaan problem paradigmatis kajian ke-Islaman pada PTAI sebagaimana diuraikan di atas, nampaknya ada dua upaya besar yang mesti dilakukan PTAI untuk mengejar ketertinggalan-ketertinggalan selama ini, yaitu upaya yang bersifat intern dan ekstern.

1. Bersifat intern, adalah upaya perbaikan paradigma kajian keilmuan (epistemologis)-nya, tidak terjebak pada dikotomisasi ilmu, menentukan pilihan seba-

gai lembaga dakwah, akademis, dan atau praktis pragmatis, memperkuat SDM, memperbaiki dan menyesuaikan kurikulumnya dengan tuntutan perubahan, penambahan sarana-prasarana, peningkatan anggaran, memperkuat jaringan (*stakeholders*), pembenahan sistem rekrutmen, dan lain-lain.

2. Bersifat ekstern, adalah dengan cepatnya persaingan global, regional dan lokal seperti sekarang ini, dengan menjamurnya Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta di lingkungan PTAI, dengan program dan produk yang sama, dan atau lebih menjanjikan; tentu akan membuat persoalan tersendiri bagi PTAI yang dikelola dan dikembangkan, jika tidak memacu diri ikut berkompetisi secara dinamis. Tentunya dengan tawaran produk yang lebih menjanjikan.
3. Barangkali hal yang mesti disiapkan adalah dengan segala upaya bagaimana PTAI bisa tetap *survive* dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan di tengah transformasi sosial yang hebat seperti sekarang ini. Di antaranya adalah dengan membangun dan memperkuat jaringan (*stakeholders*) dengan berbagai pihak, baik dengan pihak Negeri maupun swasta; baik dalam maupun luar negeri. Sudah saatnya PTAI melakukan upaya-upaya tersebut demi persaingan di tengah kapitalisme global, tanpa harus merubah "status kelembagaan dan atau institusinya".

SUMBER BACAAN

- Abaza, Mona (1994): *Indonesian Students in Cairo*. Paris, EHESS.
- Azra, Azyumardi (1999): "Studi-studi Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri," dalam *Pendidikan Islam*. Jakarta, Logos.
- , "The Making of Islamic Studies in Indonesia," makalah disampaikan

dalam seminar internasional *Islam in Indonesia: Intellectualization and Social Transformation*, di Jakarta 23-24 November 2000

- , "Pendidikan Tinggi Islam dan Kemajuan Sains (Sebuah Pengantar)", dalam Charles Michael Stanton (1994): *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, (terj.) H. Afandi dan Hasan Asari. Jakarta, Logos.
- (1994): *Jaringan Intelektual Ulama Nusantara*. Bandung, Mizan.
- Boullata, Issa J., *Classical Exegesis (Tafsir I)*, di Institute of Islamic Studies, McGill University, Canada, semester Summer, September-Desember 1997
- Connolly, Peter, "Psychological Approaches," dalam Peter Connolly (1999): *Approaches to the Study of Religion*. London and New York, Casell.
- DEPAG RI., (2000): *Buklet Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama*. Jakarta, Departemen Agama RI.
- Dhofier, Zamakhsyari (1985): *Tradisi Pesantren*. Jakarta, LP3ES.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag. RI (2006): *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI. Tentang Pendidikan*. Jakarta, Direkt. Jend. Pend. Islam Depag. RI.
- Geertz, Clifford (1960): *The Religion of Java*. London, The Free Press of Glencoe.
- Hefner, Robert W., "Islamizing Java? Religion and Politics in Rural East Java." *The Journal of Asian Studies* 46: 3 (August 1987)
- Hidayat, Komaruddin dan Hendro Prasetiyo (ed.), (2000): "Menilik Dinamika IAIN", dalam *Problem dan Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, Ditpertaids Depag. RI.
- Jeffery, Arthur (1958): *Islam: Muhammad and His Religion*. New York, Library of Liberal Arts.

- Kaptein, Nico, "The Transformation of the Academic Study of Religion: Examples from Netherlands and Indonesia," makalah disampaikan dalam seminar internasional *Islam in Indonesia: Intellectualization and Social Transformation*, di Jakarta 23-24 November 2000
- Madjid, Nurcholish (1966): *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta, Paramadina.
- Martin, Richard et. al., "Harun Nasution and Modern Mu'tazilism," dalam Richard Martin (ed.) (1997): *Defenders of Reason in Islam*. Oxford, Oneworld.
- Mudzhar, M. Atho (1998): *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- , "In the Making of Islamic Studies in Indonesia (In Search for a Qiblah)," makalah disampaikan dalam seminar internasional *Islam in Indonesia: Intellectualization and Social Transformation*, di Jakarta 23-24 November 2000
- Rahman, Fazlur (1980): *Islam*. Chicago, The University of Chicago Press.
- Rais, Amien (1991): *Cakrawala Islam*. Bandung, Mizan.
- Reid, Anthony, "Introduction," dalam Anthony Reid (ed.), (1993): *The Making of an Islamic Political Discourse in Southeast Asia*. Centre of Southeast Asian Studies, Monash University
- Riclefs, Merle C., "Six Centuries of Islamization in Java," dalam Nehemia Levtzion (ed.), (1979): *Conversion to Islam*. New York, Holmes and Meir
- Tebba, Sudirman (1993): "Orientasi Mahasiswa dan Kajian Islam IAIN," dalam *Islam Orde Baru*. Yogyakarta, Tiara Wacana
- Tibi, Bassam, (1991): *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change*. Boulder.
- Wahid, Abdurrahman (2001): *Menggerakkan Tradisi*. Yogyakarta, LKiS.
- Woodward, Mark R., (1989): *Islam in Java, Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*. Tucson, The University of Arizona Press.

ORIENTASI PENDIDIKAN PESANTREN SALAFIYAH: Studi Kasus Pesantren Benda Kerep Cirebon

Oleh: Ta'rif

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Jl. MH Thamrin No. 06 Jakarta Pusat
fajarhm@yahoo.co.id

Abstract

Pesantren is the oldest educational institution in Indonesia, which is also a subculture that has been fused and colored to the patterns of social life of religious affairs, nation and state in Indonesia. Over the time, many pesantrens are transforming themselves. The teaching methods, culture and even pesantren orientation are shifting together with the flow of changing times. The presence of these changes is expected to continue to address the needs of schools and the increasingly complex problems of the people. However, unlike the case of Benda Kerep Islamic Boarding School, a pesantren located at Benda Kerep Block, Argasunya Village, Harja Mukti Sub-district, Cirebon City, West Java. In the middle of the swift current of changes, this pesantren remains committed and defended the noble values and the past traditions. Changes hardly occur either in social, cultural, religious, and learning method aspects. External system changes do not change the existing education traditions and systems. Even the caregivers, using the legitimacy of the pesantren's founders try desperately to maintain the traditions as an advantage and uniqueness.

Keywords: *Pesantren, Tradition, Education Orientation*

Abstrak

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang juga merupakan subkultur yang telah menyatu dan mewarnai corak kehidupan sosial keagamaan, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak pesantren yang kemudian mengalami transformasi diri. Metode pengajaran, kultur, bahkan orientasi pesantren bergeser mengikuti arus perubahan zaman. Melalui perubahan ini diharapkan kehadiran pesantren dapat senantiasa menjawab kebutuhan dan problematika umat yang semakin kompleks. Namun demikian, berbeda halnya dengan Pondok Pesantren Benda Kerep, sebuah pesantren yang berlokasi di Blok Benda Kerep Desa Argasunya, Kecamatan Harja Mukti – Kota Cirebon Jawa Barat. Di tengah derasnya arus perubahan, pesantren ini tetap istiqamah mempertahankan nilai-nilai luhur dan tradisi masa lalu. Perubahan hampir tidak terjadi baik dalam kehidupan sosial, kultural keagamaan, serta metode pembelajarannya. Perubahan sistem di luar tidak serta merubah tradisi dan sistem pendidikan yang ada. Bahkan para pengasuh, dengan menggunakan legitimasi wasiat para pendiri pesantren, berupaya sekuat tenaga mempertahankan tradisi tersebut sebagai sebuah kelebihan dan keunikan tersendiri.

Kata Kunci: *Pesantren, Tradisi, Orientasi Pendidikan*

Naskah diterima 20 April 2012, revisi pertama 30 Mei 2012, revisi kedua 15 Mei 2012 dan revisi akhir 2012

PENDAHULUAN

Dunia pesantren di Indonesia tampaknya telah mengalami perubahan secara signifikan. Perubahan tersebut bukan hanya bersifat kuantitatif yang terlihat dari jumlah kelembagaan dan santri yang selalu meningkat, tetapi juga perubahan yang bersifat kualitatif antara lain perubahan visi dan misi, program pendidikan/kurikulum, pola kepemimpinan, adaptasi sistem pendidikan di luarnya dan seterusnya. Pengaruh ideologi dan faham keagamaan serta jaringan yang terbangun dengan dunia luar, sampai kepada peran pesantren yang semakin luas (*wider mandate*). Semuanya sangat mempengaruhi orientasi pendidikan pesantren. Tipologi pesantren *Salafiyah*, *Kombinasi*, *Ashriyah*, atau *Pesantren Tradisional dan Pesantren Modern* tampaknya tidak memadai lagi untuk melihat dinamika dan perkembangan pesantren yang ada saat ini.

Perubahan orientasi pendidikan sebuah pesantren pada umumnya berlangsung secara adaptif gradual, penuh kehati-hatian agar pesantren tetap menjalankan peran kepesantrenannya, menjaga tradisi dan identitas kultur keagamaan (*salafiyah*), tetapi juga tetap membuka peran-peran perubahan sesuai dengan perubahan dan kebutuhan umat. Prinsip "*Almuhafadzotu ala al qadimi ash shalih, wal akhdzu bi al-jadid al ashlah*" yaitu melestarikan yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik hingga sekarang masih berlaku di kalangan masyarakat pesantren dalam melakukan adaptasi secara cerdas dan arif terhadap tuntutan sistem di luarnya.

Perkembangan linear pada pesantren yang pada awalnya pesantren lebih mememankan diri sebagai lembaga keagamaan dan dakwah tempat para santri belajar dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam "*tafaqquh fiddin*" yang berbasis kitab kuning, tanpa mengharap ijazah atau (*civil effect*), kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan dan pengembangan masyarakat. Sistem pendidikan yang semula lebih

bersifat nonformal, ngaji dengan metode bandongan, wetonan dan sorogan berkembang menjadi pusat-pusat pendidikan baik melalui madrasah, sekolah umum, mulai dari tingkat pra sekolah, pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi. Banyak pesantren mengembangkan berbagai jenis keterampilan, agribisnis, perdagangan dan jasa serta pengembangan masyarakat yang lebih luas. Sebagian pengamat berpendapat pendidikan pesantren menjalankan peran-peran seperti "*holding company*".

Namun demikian, ada saja pesantren yang – karena berbagai faktor – cenderung mempertahankan dan melanggengkan tradisi masa lalu dan terjebak dalam romantisme dan belenggu sejarah. Sistem pendidikannya lebih menampakkan wajah pendidikan periode masa lalu dengan segala keunikannya, dan sangat berbeda dengan sistem pendidikan *mainstream* pada umumnya. Uniknya, dengan keunikan dan peran pelanggengannya ini justru ia memperoleh tempat tersendiri di kalangan masyarakat dan menjadi faktor pesantren tersebut mampu mempertahankan keberadannya.

Pesantren *Salafiyah Benda Kerep* (PBK) yang berlokasi di Blok Benda Kerep Desa Argasunya, Kecamatan Harja Mukti Kota Cirebon Jawa Barat adalah salah satu pesantren yang mempertahankan tradisi masa lalu sebagaimana disinggung di atas. Pesantren Benda Kerep cenderung sangat hati-hati terhadap modernitas dengan melakukan filterisasi secara selektif menerima perubahan dengan tetap melestarikan kearifan budaya lokal (*salafiyah*) terutama dalam konsep pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Karena ketatnya proses filterisasi yang dilakukan, maka dalam pandangan sepintas Pesantren Benda Kerep cenderung ditempatkan sebagai pesantren "*tradisional*" yang lebih berperan sebagai bentuk pelanggengkan dibandingkan dengan peran perubahan.

Studi pesantren ini dianggap penting, setidaknya karena kemampuan *survive-*

nya di tengah hadirnya berbagai lembaga pendidikan formal di lingkungan sekitarnya yang ijazahnya mempunyai *civic effect* terhadap dunia kerja dan studi lanjut. Ketahanan hidup PBK ini sebagai lembaga pendidikan Islam Tradisional, ternyata berbeda dengan kebanyakan lembaga pendidikan tradisional lainnya. Seperti digambarkan Steenbrink¹ ketika diperkenalkan lembaga pendidikan yang lebih teratur dan modern, lembaga pendidikan tradisional ternyata tidak laku dan banyak yang ditinggalkan masyarakat. Misalnya lembaga pendidikan Surau di Minangkabau, bahkan surau sekarang sudah punah dan ketika didirikan lembaga pendidikan Islam di sana, tidak lagi menggunakan Surau tetapi pesantren. Temuan Steenbrink ini diperkuat oleh Kesimpulan Azyumardi Azra, sejak dilancarkan perubahan atau modernisasi pendidikan Islam di berbagai kawasan dunia Muslim, tidak banyak lembaga pendidikan tradisional yang mampu bertahan, banyak dan lenyap setelah tegusur oleh ekspansi sistem pendidikan umum seperti kasus *Medrese* di Turki, dan *Madrasah* di Mesir.²

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan mengungkap tentang bagaimana orientasi pendidikan Pesantren Benda Kerep Cirebon di tengah perubahan yang terjadi? Dan bagaimana bentuk-bentuk pelestarian dan perubahan pendidikan salafiyah di Pesantren Benda Kerep?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara langsung (*field research*) pada Pondok Pesantren Benda Kerep Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data banyak menggunakan

¹ Karel A. Steenbrink. 1986. *Sekolah, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES.

² Azyumardi Azra. 2001. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Kalimah, h. 96

pengamatan mendalam terhadap setiap fenomena yang ditemui. Setiap data dan informasi dilihat sebagai suatu kesatuan yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan tidak menggunakan hipotesis tertentu. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi serta diskusi.

Wawancara mendalam digunakan untuk menggali data dan informasi dari pengasuh pesantren, ustadz, santri dan alumni, Kandepag Kota Cirebon, Kelurahan Argasunya, masyarakat sekitar serta melakukan klarifikasi (*tabayyun*) terhadap pihak yang berkompeten terhadap beberapa temuan lapangan yang memerlukan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut. Pengamatan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan, lingkungan sosial, lingkungan kultural, pola interaksi antar warga komunitas pesantren, maupun dengan masyarakat luar pesantren. Pengamatan terlibat juga dilakukan terhadap proses belajar mengajar di kelas, salat berjamaah, pertemuan dengan guru, kehidupan santri di asrama, interaksi antar santri, santri dengan guru, suasana makan bersama, kerja bakti membersihkan halaman asrama, merawat kebersihan kamar, mencuci pakaian, suasana ruang belajar, dan seterusnya. Sedangkan studi dokumen dilakukan terhadap semua sumber dokumen yang dapat memberikan data dan informasi Pesantren Benda Kerep.

KERANGKA TEORITIK

Awalnya, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional (*salafiy*) yang fungsi dan tujuannya adalah sebagai tempat untuk mengembangkan *syi'ar islamiyah*. Maju atau mundurnya lembaga ini sangat bergantung atau dipengaruhi

kiyainya, dan hanya dikenal di kalangan atau lingkungan setempat. Keberadaan pesantren saat itu bersifat tertutup dan perannya pun masih terbatas pada persoalan keagamaan bagi masyarakat lingkungannya saja. Perkembangan berikutnya, beberapa pesantren tertentu yang dipimpin kiyai-cendekiawan muslim mulai memperoleh perhatian masyarakat luas sejak awal abad ke-20. Sejak itu, pondok pesantren menjadi suatu sistem atau lembaga pendidikan terbuka yang mau menerima *input* dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan keinginan masyarakat luas; perannya pun tidak hanya dalam bentuk keagamaan, melainkan juga masalah-masalah sosial lainnya. Inilah yang dimaksud Mastuhu bahwa, "pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang bercirikan *grass root people* yang telah tumbuh dan berkembang di Nusantara sejak 300-400 tahun yang lalu"³.

Implikasi dari perubahan ini adalah, fungsi lembaga ini berubah dan melengkapinya dengan perlengkapan yang ada pada lembaga pendidikan sekolah pada umumnya, yaitu bentuk kelembagaan yang menerapkan sistem kelas, kurikulum dan metode pengajaran yang tidak hanya *ala tradisional* yakni *sorogan*, *bandongan* dan *halaqah*. Kenyataan ini menggambarkan bahwa, usaha dan kegiatan yang dilakukan pondok pesantren secara garis besar dapat dibedakan atas dua fungsi pelayanan yaitu: pelayanan kepada santri dan pelayanan kepada masyarakat.⁴ Dalam bentuk pelayanan pertama, pesantren menyajikan beberapa sarana bagi perkembangan para santrinya; sedangkan bentuk pelayanan kedua, pesantren berusaha mewujudkan masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemampuan yang ada.

³ Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, h. 21

⁴ M. Dawam Raharjo (ed.). 1985. *Pergulatan Pesantren; Membangun dari Bawah*. Jakarta: P3M, h. 16

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang selalu adaptif terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungannya. Sifat adaptif itu diwujudkan dalam bentuk penerapan kurikulum yang diperlukan untuk mengantisipasi tuntutan dan perkembangan. Manurut Cuban ada tiga dasar keyakinan yang kondusif untuk dijadikan sebagai landasan akan pentingnya memperhatikan sifat adaptif kurikulum terhadap perubahan yaitu: 1) perubahan yang terjadi sifatnya positif, 2) perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah cenderung sifatnya terus menerus (*kontinue*) dan 3) perlunya usaha untuk menyempurnakan rencana-rencana yang disusun oleh lembaga atau pendidik, karena terjadinya proses adopsi terhadap suatu inovasi.

Berpatokan pada ketiga dasar keyakinan di atas maka dapat diyakini bahwa, perubahan yang terjadi di pondok pesantren sangat penting artinya karena dapat mempengaruhi kurikulumnya. Selama ini, antara pondok pesantren dengan masyarakat dalam pemahaman terhadap suatu nilai (ketetapan sikap dan perilaku) terdapat perbedaan yang mendasar. Pondok pesantren dalam pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan lebih bersifat tekstual, sedangkan masyarakat lebih bersifat kontekstual. Pemahaman secara kontekstual yang dipilih masyarakat, akan melahirkan semangat kreatif-inovatif sesuai dengan persoalan yang sedang berkembang. Di samping itu, pemahaman secara kontekstual juga dapat memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk melakukan interpretasi atau reinterpretasi terhadap suatu nilai yang bersifat tekstual untuk mengadaptasi persoalan-persoalan yang muncul dan berkembang,

Pola pemahaman pertama (pemahaman terhadap nilai secara tekstual) biasanya dilakukan oleh beberapa pesantren tradisional, sedangkan pesantren yang tengah berusaha menerapkan kurikulumnya sesuai

dengan keinginan masyarakat, cenderung menggunakan pola kedua (pemahaman secara kontekstual). Perkembangan dengan pola kedua ini cukup kondusif untuk menopang proses inovasi, apalagi jika dikaitkan dengan usaha-usaha untuk membuktikan kebaikan dari inovasi itu dalam sistem kehidupan masyarakat lingkungan pondok pesantren khususnya.

Untuk menerapkan pola kedua, sangat ditentukan oleh seorang pemimpin pondok pesantren yang memiliki ilmu pengetahuan keagamaan yang luas, memahami betul tentang kurikulum pendidikan sekolah juga diterima oleh masyarakat terutama karena kewibawaan dan kesalehannya. Pemimpin pondok pesantren dimaksud adalah kiyai yang memiliki visi dan misi yang jelas dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam di pondok pesantren yang dipimpinnya. Salah satu visinya yang prospektif dan memenuhi tuntutan masyarakat adalah memadukan dua sistem pendidikan yang berbeda yaitu sistem pendidikan sekolah dan sistem pendidikan pondok pesantren. Misi dari penggabungan kedua sistem pendidikan itu, memberikan arah dan tujuan jangka panjang kepada para santrinya agar memperoleh dua ilmu pengetahuan sekaligus dalam satu saat yang bersamaan. Kedua ilmu pengetahuan dimaksud adalah ilmu pengetahuan keagamaan yang diperolehnya melalui lembaga pendidikan pondok pesantren dan ilmu pengetahuan umum atau keterampilan yang diperolehnya melalui lembaga pendidikan sekolah yang dimasukinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Pesantren Benda Kerep

Pesantren Benda Kerep terletak Kampung Benda Kerep, sebuah kampung di pinggiran Kota Cirebon, tepatnya di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, sekitar 10 km arah selatan dari pusat Kota Cirebon. Secara geografis,

posisi Benda Kerep berada pada posisi 10833 Bujur Timur dan 61 Lintang Selatan. Bentang alamnya merupakan dataran tinggi daerah Cirebon dengan luas tanah 33 hektar. Kebanyakan warga kampung ini bekerja sebagai petani, baik penggarap maupun pemilik di ladang dan di sawah. Sedangkan sebagian lainnya bekerja sebagai buruh pasir, pedagang, tukang ojek dan yang lainnya.

Menelusuri sejarah pendirian Pesantren Benda Kerep (PBK), tidak banyak bahkan nyaris tidak ditemukan literatur asli yang ditulis oleh keturunan pendiri Pesantren Benda Kerep. Menurut informasi dari Kyai Miftah yang merupakan salah satu keturunan generasi ke-4 dari pendiri Pesantren Benda Kerep, hal ini dikarenakan adanya wasiat dari pendiri yang *wanti-wanti* melarang sejarah berdirinya Benda Kerep khususnya sejarah pendirinya untuk di dokumentasikan.⁵

Wasiat tersebut setidaknya memberikan dua pesan moral yang berharga. *Pertama*, diharapkan kepada keturunan dari pendiri Pesantren Benda Kerep untuk senantiasa menghafal sejarah dalam kerangka menjaga dan melestarikan kearifan nilai sebuah budaya khususnya di Benda Kerep. *Kedua*, untuk menghindari adanya kultus individu oleh para keturunan dan masyarakat terhadap pendiri dari Pesantren Benda Kerep.

Sejarah panjang pendirian Pesantren Benda Kerep dirintis oleh seorang ulama kharismatik nan *tawadhu'*, yakni KH. Sholeh yang lebih familiar dengan sebutan Mbah Sholeh. Mbah Sholeh yang merupakan satu periode dengan *Hadhratussyaikh* KH. Hasyim Asyari, adalah keturunan dari Keraton Cirebon, generasi ke-13 dari Syekh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati). Dalam rangka mencari tempat yang dianggap representatif untuk pengembangan syiar Islam, Mbah Sholeh bersama Kyai

⁵ Wawancara dengan K. Miftah, Tanggal 21 September 2011.

Anwarudin (pesantren Buntet) mendapatkan ilham untuk melakukan “Babad Alas” terhadap wilayah yang terisolasi (belum terjamah manusia) yang sekarang dikenal dengan wilayah Benda Kerep.

Nama Benda Kerep yang sekarang menjadi sebutan wilayah tersebut sekaligus menjadi nama bagi lembaga Pondok Pesantren, sebelumnya memiliki sebutan nama yaitu; Karang Pawitan dan Cimeuwuh. Secara etimologis, penyebutan Karang Pawitan bermakna tanah “Tanah Pertama/Awal” karena Mbah Sholeh sebagai orang pertama yang dapat menjamah kawasan tersebut. Kemudian sebutan Cimeuweuh berasal dari bahasa Sunda terdiri dari kata; *cai* (air) dan *meuweuh* (hilang/lenyap). Menurut cerita mitos yang masih dipercaya warga sekitar dan informasi Kyai Miftah (salah satu generasi ke-4 dari Mbah Sholeh), konon waktu itu siapa saja yang mencoba masuk daerah tersebut maka akan hilang tidak pernah kembali lagi karena dibawa oleh mahluk ghaib yang banyak menghuni wilayah tersebut.

Selanjutnya setelah Mbah Sholeh menaklukkan daerah Cimeuweuh, beliau menggantinya dengan sebutan Benda Kerep, *i'tibar* terhadap kondisi wilayah tersebut yang banyak ditumbuhi pohon benda (semacam sukun) dan banyaknya pohon benda yang tumbuh rapat (Jawa: *kerep*) maka wilayah tersebut dikenal hingga saat ini sebagai Benda Kerep. Secara geografis, wilayah Benda Kerep lebar dengan luas sekitar 30 Hektar yang diisolasi oleh sungai masih termasuk tanah milik Keraton Kanoman Cirebon. Atas dedikasi Mbah Sholeh mengembangkan wilayah tersebut sebagai pusat syiar Islam, Sultan Zulkarnaen (Raja Kraton Kanoman waktu itu) memberikan hibah wilayah tersebut kepada Mbah Sholeh.

Berita Mbah Sholeh, sebagai ulama yang kharismatik, *tawadhu'*, memiliki wawasan keagamaan mendalam, mempunyai kesaktian, dan berakhlak sangat mulia

yang telah berhasil menaklukkan tanah Cimeuweuh mengundang banyak orang dari berbagai daerah untuk belajar menimba ilmu dan akhlak kepada beliau. Karena semakin banyaknya masyarakat yang ingin belajar kepada Mbah Soleh, maka beliau dibantu dengan beberapa murid membangun Pondok Pesantren Benda Kerep dengan sangat sederhana. Perjuangan Mbah Sholeh dalam mengajarkan ilmu agama dan akhlak kepada masyarakat melalui Pesantren Benda Kerep, masih tetap *istiqamah* diteruskan oleh keturunan-keturunan hingga saat ini.

Mbah Sholeh memiliki tiga orang putra dan putri, yaitu pertama adalah Embah Muslim atau K. Muslim, putra keduanya adalah K. Abu Bakar dan yang ketiga adalah Nyai Qona'ah. Dari Embah Muslim sebagai anak pertama mempunyai tujuh orang putra, sementara istri dan anak perempuan belum ditemukan keterangannya. Diantara tujuh orang putra tersebut adalah: K. Kaukab (Benda Kerep), K. Zaeni Dahlan (Benda Kerep), K. Muhtadi (Benda Kerep), K. Sayuti (Cibogo), K. Fahim (Benda Kerep), K. Fatin (Benda Kerep), dan K. Mas'ud (Benda Kerep). Sedangkan dari KH. Abu Bakar Putra kedua Embah Sholeh mempunyai dua orang putra diantaranya adalah: K. Hasan (Benda Kerep --Mertua dari K. Muhammad Nuh) dan KH. Faqih (Benda Kerep- Ayah kandung dari K. Muhammad Miftah).

Kepemimpinan

Peranan kyai, selain sebagai figur sentral juga sebagai pucuk pimpinan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pesantren dan kemasyarakatan. Begitupun dengan kepemimpinan Pesantren Benda Kerep saat ini. Model kepemimpinan yang dilakukan oleh para kyai dapat digolongkan dengan “kepemimpinan kharismatik”. Sebagaimana Weber menyatakan bahwa Karisma untuk menyebut suatu keadaan (sifat) dari kepribadian seseorang yang dianggap berbeda dari orang biasa dan di-

anggap diberkati dengan kekuatan adikodrati yang melebihi kekuatan manusia biasa. Oleh karena itu, sifat kharismatik lebih merupakan anugerah Allah SWT baik melalui *Mu'jizat*, *Karomah* maupun *Ma'unah* kepada siapapun yang dikehendaki-Nya. Dalam konteks ini, karena kyai adalah orang yang memiliki karisma maka dengan sendirinya ia diperlakukan sebagai pemimpin dan melahirkan kewenangan yang membentuk adanya pengikut.

Pengaruh kepemimpinan kyai merupakan hal yang terlihat jelas dalam kehidupan pesantren dan masyarakat Kampung Benda Kerep. Adanya pengaruh kyai tidak terlepas dari peranan kyai yang begitu mendapat tempat dalam masyarakat. Pengaruh kyai yang begitu kuat dan luas ini telah melahirkan hubungan *patron – client*⁶ antara kyai dengan masyarakat. Kyai bertindak sebagai *patron* yang berfungsi melindungi masyarakat. Dengan kekuatan ilmu yang dimilikinya, kyai dapat melindungi masyarakat, penasihat spiritual, mengatasi berbagai keresahan, keputusan, dan kecemasan yang dialami seorang penduduk.

Dengan mengikatkan hubungan yang kuat dengan kyai, masyarakat merasa mendapat perlindungan dan aman. Atas perlindungan itu masyarakat merasa berhutang budi kepada kyai. Kuatnya hubungan *patron – client* ini telah membentuk dan memperkuat tradisi masyarakat Kampung Benda Kerep. Begitu pula dalam interaksi antara kyai dengan santri, kyai menjadi figur sentral, ia menjadi teladan dan sumber

⁶ Menurut JC Scott patronase adalah suatu kasus hubungan antar dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan, keuntungan atau kedua-duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (*klien*), yang pada gilirannya membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan yang umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi, kepada *patron*. Lihat dalam James C. Scott. 1993 *Perlawanan Kaum Tani*, terj. Budi Kusworo Dkk. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h.7.

nilai bagi kehidupan para santri. Karena keilmuan dan kekaramahan yang dimiliki kyai, sehingga santri akan selalu taat dan patuh terhadap petuah dan perintah kyai.

Pesantren Benda Kerep mengalami beberapa pergantian kepemimpinan mulai dari Mbah Sholeh sebagai pendiri awal, kemudian dilanjutkan oleh KH. Mbah Muslim, lalu oleh KH. Mbah Abu Bakar dan KH. Faqih merupakan generasi yang sekarang memegang tajuk kepemimpinan Pesantren Benda Kerep. Dari empat kepemimpinan yang ada, model kepemimpinan kharismatik masih menjadi ciri khas pesantren ini.

Saat ini Pondok Pesantren Benda Kerep diasuh oleh banyak kyai yang merupakan keturunan dari Mbah Sholeh, maka dalam model kepemimpinan saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut: **Pertama**; Kepemimpinan pesantren hanya bisa dipimpin oleh saudara atau keturunan utama yang merupakan keluarga pesantren. Hal ini dilakukan karena mereka berpegang untuk meneruskan amanat dan wasiat dari sesepuh pendiri pesantren (Mbah sholeh) sehingga tidak mengalami kesulitan di kemudian hari baik dalam meluruskan misi dan visi pesantren. **Kedua**, Masing-masing kyai di wilayah Benda Kerep memiliki santri di rumah / asrama masing-masing dan memiliki otoritas penuh terhadap konsep dan metodologi pendidikan yang diterapkan terhadap santri masing-masing dengan tetap berpegang teguh kepada *grand police* yang diamanahkan oleh para pendiri Pesantren Benda Kerep yang kemudian menjadi konsensus bersama.

Ketiga, dalam Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan arah kebijakan Pondok Pesantren Benda Kerep terutama dalam merespon budaya luar seperti adanya listrik, tidak dibolehkannya pesantren dan masyarakat Benda Kerep untuk menggunakan alat-alat elektronik dan komunikasi seperti TV, Radio, Telepon/HP, Pengeras suara dan lain-lain dilakukan secara kolektif oleh seluruh kyai melalui musyawarah

mufakat. Dan *Keempat*, Selain mengenal kebijakan kolektif, pada prakteknya keputusan lebih sering berdasarkan pertimbangan kyai sepuh yang masih hidup yakni KH. Ahmad Faqih dan KH. Hasan. Kedua kyai sepuh tersebut merupakan cucu yang masih hidup dari *Al-Maghfurlah* Mbah Sholeh.

Lingkungan Sosial dan Budaya Masyarakat

Pesantren Benda Kerep (PBK) memiliki keunikan khusus terutama dari sisi paham tradisional yang cukup kuat dan melekat di hati nurani bahkan kehidupan masyarakat, hal ini ditandai dengan pola kehidupan masyarakat yang sangat kuat dan ketat sekali berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama Islam. Masyarakat sekitar, khususnya Benda Kerep, merupakan bagian integral dari komunitas Pesantren (kyai dan santri). Secara kasat mata sulit sekali membedakan antara santri dan masyarakat sekitar mengingat segala kegiatan pesantren baik di bidang pendidikan maupun sosial keagamaan selalu diikuti dan didukung melalui partisipasi aktif masyarakat. Sinergitas yang terbangun selama ini menjadi modal penting bagi keberlangsungan lembaga PBK.

PBK bersama masyarakat memandang pentingnya melestarikan kearifan nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu dalam menerima nilai modernisasi dilakukan secara selektif atas bimbingan kyai. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap dampak modernisasi. Sebagai satu contoh, hingga saat ini wilayah Benda Kerep masih belum berkenan adanya jembatan yang menghubungkan ke pesantren, walaupun beberapa kali pemerintah mencoba membantu memfasilitasi.

Santri dan masyarakat sekitar meyakini betul terhadap konsep "berkah" terhadap kyai dan pesantren. Hal ini diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap *wejangan* dari para kyai. Beberapa santri dan warga sekitar mengaku bahwa keber-

kahan itu akan muncul jika ajaran Islam dilaksanakan dengan baik melalui bimbingan kyai dan jika ada yang melanggar, mereka juga meyakini akan mendapatkan *bala'* kesengsaraan hidup baik di dunia maupun di akhirat.

Kegiatan *haul*, *tahlilan*, *marhabanan*, *muludan*, *rajaban*, *nisyfu sya'ban* dan *syawalan* merupakan tradisi keagamaan yang senantiasa dilestarikan dan dilaksanakan oleh PBK dan masyarakat Benda Kerep hingga sekarang. Sifat kekeluargaan dan saling tolong-menolong serta menghormati kyai dan keturunannya serta orang yang lebih tua merupakan budaya yang senantiasa diamalkan oleh masyarakat Benda Kerep.

Demikian pula budaya menutup aurat juga sangat ditekankan. Pakaian adat (sarung dan kopiah) dan busana muslimah (jilbab) merupakan pakaian yang wajib tidak hanya dalam kegiatan shalat dan mengaji. Sarung dan kopiah (bagi laki-laki) dan jilbab bagi perempuan tidak hanya dipakai oleh santri, tetapi oleh seluruh masyarakat Benda Kerep dari anak-anak sampai orang tua, bahkan para tamu yang datang (tidak membawa sarung dan kopiah) disediakan fasilitas sarung dan kopiah di masjid pesantren.

Program Pendidikan

Program pendidikan yang diterapkan di PBK hingga saat ini terlihat masih mempertahankan tradisi salafiyah. Selain mempelajari al-Qur'an, kitab kuning merupakan teks yang dipelajari para santri. Tidak dijumpai teks penunjang lainnya selain kitab kuning. Program pendidikan pesantren yang diterapkan di PBK sejak berdiri hingga sekarang tidak menggunakan sistem madrasah (klasikal) formal. Meski demikian, kitab yang sedang dikaji oleh suatu kelompok santri menandakan tingkatan santri tersebut. Dengan kata lain, tingkatan santri dibedakan berdasarkan kitab yang sedang dikaji. Sebagai contoh dalam kajian fiqh, bagi santri pemula diajarkan kitab dasar

yang sudah tidak asing lagi yakni kitab *Safinatunnajah*. Setelah selesai, untuk tingkat menengah dilanjutkan dengan kitab *Fathul Qoriib*, setelah itu dilanjutkan kajian kitab *Fathul Mu'in*, *Fathul Wahab*, *Iqna* dan seterusnya. Untuk ilmu alat misalnya, bagi santri pemula diajarkan kitab *al-Jurumiyyah*, diteruskan dengan kitab *Imrithi*, kemudian kitab *Alfiyyah Ibnu Malik* dan seterusnya. Dalam bidang Tafsir, kitab yang diajarkan adalah *Tafsir Jalalain*, *Tafsir Munir*. Dalam bidang akhlak beberapa kitab yang diajarkan adalah *Ta'limul Muta'allimin*, *Muroqi*, *Mu'awanah*, *Tanwirul Quluub*, *Ihya Ulumuddin*, dan *Hikam*. Program pendidikan bagi santri putri, selain kajian kitab di atas juga ditambah dengan materi kitab kuning yang berkaitan dengan masalah kewanitaan seperti kitab *al-Adab al-Mar'ah*, *'Uquudulujain*, *Masaailunnisa*, dan lain-lain.

Selain itu, pada bulan suci Ramadhan, sebagaimana lazimnya budaya pesantren lainnya, PBK mengadakan pengajian umum yang biasa disebut dengan istilah "pasar-an/kilatan" biasanya dilakukan selama 20 hari. Kemudian pada bulan Rabi'ul Awwal dilakukan pengajian kilat/pasaran selama 8 hari. Program pendidikan semacam *short course* ini tidak hanya diikuti para santri, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat umum.

Sistem metode pembelajaran yang dilakukan selama di PBK adalah metode *sorogan*, *bandongan*, *halaqoh*.⁷ Menurut Ky.

⁷ *Sorogan* artinya belajar secara individual dimana seorang santri berhadapan dengan seorang guru/kyai, terjadi saling interaksi saling mengenal diantara keduanya., *Bandongan* adalah belajar secara kelompok yang didikuti oleh seluruh santri. Biasanya kyai/ustad menggunakan bahasa daerah setempat dan langsung menerjemahkannya kalimat demi kalimat dari kitb yang dipelajarinya. *Halaqoh* adalah diskusi untuk memahami isi kitab, bukan untuk memepertanyakan kemungkinan benar atau salahnya apa-apa yang diajarkan oleh Kitab, tetapi untuk memahami apa maksud yang diajarkan oleh Kitab. Santri yakin bahwa Kyai tidak akan mengajarkan hal-hal yang salah, dan merka juga yakin bahwa isi kitab yang dipelajari adalah benar (Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Peantren: suatu Kajian*

Miftah, Metode *sorogan* paling diutamakan karena dengan metode ini antara kyai dan santri dapat berinteraksi langsung lebih mendalam, sehingga memungkinkan diantara keduanya mempunyai ikatan emosional yang kuat dan kyai dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan dari masing-masing santri yang dibimbing. Selain itu diharapkan santri dapat melatih mental membaca kitab baik saat masih menjadi santri maupun saat di luar pesantren/masyarakat.⁸

Kitab-kitab yang diajarkan dengan metode sorogan adalah kitab-kitab yang dari segi jumlah halamannya tidak terlalu tebal—seperti kitab *Tijan Darore*, *Safinatunnajah*, *al-Jurumiyyah*-- sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama, sedangkan metode *bandongan* biasanya kitab-kitab yang diajarkan dari segi jumlah halamannya lebih banyak—seperti kitab *Fathul Muin*, *Al-fiyah Ibnu Malik*, *Tafsir Jalalain*, *Ihya Ulumuddin*, dan lain-lain.

Menurut KH. Miftah, pemilihan nama-nama kitab yang akan diajarkan umumnya berdasarkan keinginan dan kemauan santri sendiri. Hal ini nampak dalam pengamatan pada setiap pengajian, baik *sorogan* maupun *bandongan* para santri bebas memilih kitab yang akan dikaji. Walaupun demikian, kyai tetap memberikan pertimbangan dan arahan yang apa semestinya dilakukan para santri dalam mempelajari kitab kuning.

Baik *sorogan* maupun *bandongan*, pelajaran yang disampaikan dalam bahasa Jawa dan juga dijelaskan dalam bahasa campuran Jawa-Indonesia. Para santri secara cermat mengikuti penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh kyai dengan memberikan catatan-catatan tertentu pada kitabnya masing-masing dengan kode-kode tertentu pula, sehingga kitabnya disebut kitab jenggot, karena banyaknya catatana-cataatan

tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INIS, h. 61).

⁸ Hasil Wawancara dengan K. Miftah, di Rumahnya, Tanggal 23 September 2011.

yang meyeruapai jenggot. Kyai menerjemakan kitab secara kata demi kata, atau kalimat demi kalimat dari isis kitab dalam bahasa Jawa, tidak ada tanya jawab. Dengan teknik *bandongan* kyai tidak mengetahui secara individual siapa-siapa santri yang datang mengikuti pengajian.⁹

Para santri juga diajarkan keterampilan sebagai bekal kemandirian seperti, cara bertanam / bertani (bagi santri putra) dan memasak / membuat kue bagi santri putri, ada juga pembekalan secara fisik seperti ilmu bela diri/pencak silat bagi santri yang sudah lama dan akan keluar pesantren.

Selain rutinitas pengajian harian, PBK juga menyelenggarakan acara tahunan yang melibatkan santri dan masyarakat Benda secara luas. Acara ini antara lain *Muludan*, *Khaul* dan *Syawalan*. Kegiatan *Muludan* biasanya dilaksanakan oleh santri bersama masyarakat bertepatan dengan tanggal 12/13 Maulud (bulan Rabi'ul Awal) pada setiap tahunnya. Dengan memperingati hari besar nabi Muhammad SAW, mereka berharap mendapatkan keberkahan baik hidup di dunia ataupun di akhirat kelak, atau paling tidak dapat menjadikan perilaku Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi umatnya. Berbeda dengan kegiatan *Khaul*. *Khaul* biasanya dilaksanakan setiap tanggal 11,12 dan 13 Dzulhijjah, maksud perayaan ini dilaksanakan adalah untuk memanjatkan doa bersama dalam rangka mengirim fatihah atau doa kepada khususnya pendiri atau sesepuh PBK yang sudah meninggal dunia, dengan harapan dapat keberkahan dari kyai sepuh yaitu KH. Mbah Sholeh, KH. Mbah Muslim, dan KH. Mbah Abu Bakar, serta umumnya pendiri PBK. Sedangkan kegiatan *Syawalan* dilakukan komunitas PBK pada setiap tanggal 08 Syawal.

⁹Mastuhu, Mastuhu, 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Peantren: suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS, h. 145

Santri dan Tenaga Pengajar

Jumlah santri di PBK saat ini berjumlah sekitar 240 santri putra dan putri yang mukim. Jumlah santri tersebar di rumah-rumah atau asrama kyai masing-masing. Di antara kyai yang merupakan anak menantu keturunan Mbah Sholeh yang berdomisili di Benda Kerep adalah; KH. Ahmad Faqih, KH. Hasan, KH. Ahmad Muharror, KH. Abdullah, KH. Muhammad, KH. Amsor, KH. Miftah, KH. Isma'il, KH. Munir, Kyai Kholil dan Kyai Ahmad Mubarok. Adapun untuk santri putri, selain diajar oleh para kyai di atas juga dibimbing oleh para Nyai (isteri kyai).

Selain santri mukim yang berasal dari berbagai wilayah yang menetap di pondok, terdapat juga santri kalong, yaitu santri yang belajar mengaji pulang dan pergi, karena mereka tinggal dan berasal dari lingkungan sekitar pesantren. Jumlah santri kalong yang belajar tidak banyak seperti santri yang mukim.

Dilihat dari lamanya santri belajar di pesantren, dikenal istilah santri junior (santri yang masih baru belajar), dan santri senior (santri yang sudah lama belajar sekitar tiga tahun ke atas). Selain itu, dalam komunitas santri juga dikenal istilah "*rencang*" atau *abdi dalem* atau *khadim*-nya para kyai. Pada umumnya kyai memiliki *rencang* yang bertugas mengabdikan, melayani dan membantu keperluan hidup kyai. Tugas mereka ada yang di dalam rumah kyai, seperti melayani dan membantu keperluan kyai, ada juga *rencang* yang bertugas di luar rumah/pesantren seperti memelihara kebun atau sawah milik kyai. Para santri yang menjadi *rencang* dipilih berdasarkan penunjukkan langsung dari kyai dan biasanya mereka adalah para santri senior yang sudah lama belajar/nyantri (minimal 3 tahun).

Selama mengaji/belajar di PBK, seluruh santri tidak diperkenankan "*nyambi*" belajar di sekolah formal. Ketentuan ini berlangsung sejak berdiri sampai sekarang. Hal ini memang orang tua santri sejak dari

awal belajar di pesantren ini bertujuan hanya untuk belajar agama (*tafaquh fiddin*) dan nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat sekitarnya.

Mayoritas santri adalah mereka yang orang tua atau familinya pernah belajar (*mesantren*) di PBK. Bahkan ada juga karena dapat informasi dari temannya. Dengan demikian, gambaran santri saat belajar di PBK sudah diketahui sebelumnya. Umumnya para santri berasal dari wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Karawang, Subang, Majalengka, Bandung, Tasikmalaya, Banten, Brebes, Tegal dan ada juga berasal wilayah luar Jawa. Dari segi usia, tidak ada batasan usia untuk menjadi santri (masuk belajar) di PBK. Secara usia, mayoritas santri adalah tamatan tingkat Sekolah Dasar, ada juga yang tamatan SLTP dan SLTA. Dari usia ini para santri secara otomatis sudah dapat membaca dan menulis latin, hal ini menjadi modal bagi para santri sehingga tidak mengalami kesulitan dalam hal mengharakati atau mensyakali kitab kuning. Selain santri yang baru belajar di pesantren ada juga yang pernah pesantren di tempat lain. Seperti diungkapkan beberapa santri (Saifullah, Tedi, Samsuddin), motivasi mereka belajar di PBK selain mendalami ilmu-ilmu keislaman mereka juga ingin *tabarukan* yakni mendapatkan keberkahan dari kyai, yang dalam doktrin sufi dikenal *konsep emanasi yaitu* diharapkan ilmu-ilmu kyai dapat memantulkan atau memancarkan kepada santri.

Tak ada batasan waktu dalam menempuh pendidikan di PBK. Namun umumnya mereka belajar selama lima tahun bahkan lebih dari itu, untuk menentukan apakah santri sudah mampu atau belum sangat tergantung pada *dawuh "restu"* kyai, jika kyai belum memberikan restu walaupun sudah belajar lebih dari lima tahun, maka santri belum dengan sendirinya mengikuti apa kata kyai. Demikian juga sebaliknya, walaupun baru belajar kurang dari lima tahun, tetapi kyai memberikan restu maka santri dapat keluar menegembangkan ilmu-

nya atau belajar ke lembaga pendidikan lainnya.

Biaya *syahriyah* (bulanan) santri setiap bulanya dikenakan biaya Rp. 15.000,-. Biaya tersebut digunakan untuk keperluan santri sendiri seperti biaya listrik dan biaya kebutuhan lainnya. Sedangkan biaya hidup diserahkan pada santri masing-masing. Umumnya setiap bulan orang tua mereka datang ke pesantren untuk membawa bekal bulanan, ada juga mereka yang dikirim melalui teman satu pondok.

Selama ini kegiatan proses belajar mengajar (mengaji), tenaga pengajarnya adalah para kyai dan anak menantunya serta nyai (bagi santri putri). Proses delegasian mengajar bagi santri senior untuk mengajar santri pemula, dilakukan secara insidental, seperti jika kyai berhalangan ada kegiatan di luar. Dengan kata lain, transformasi intelektual para santri dilakukan secara langsung oleh para kyai, hanya sesekali saja jika kyai berhalangan mengajar maka didelegasikan kepada santri senior.

Latar belakang pendidikan tenaga pengajar (kyai), selain belajar di Pesantren Benda Kerep, mereka juga pernah belajar di pesantren lain, pada umumnya mereka pernah belajar di Pesantren Kaliwungu, Pesantren Tegalrejo Magelang, Pesantren Lirboyo, dan beberapa pesantren yang masih ada hubungan keluarga kyai dan jaringan keilmuan pesantren. Dari pesantren-pesantren yang menjadi tempat belajar para kyai Benda terlihat ada semacam jaringan keilmuan dan *thoriqoh* yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Doktrin Keagamaan dan Jaringan Intelektual

Doktrin keagamaan yang diajarkan pada PBK, sebagaimana lazim di pesantren salafiyah lainnya adalah konsep *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja). Secara amaliah, PBK berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), meski tak ada hubungan secara struktural.

Kondisi demikian mengingat secara histories, Mbah Sholeh selaku pendiri pesantren merupakan sahabat dari pendiri NU, yakni *Hadhratussyaikh* KH. Hasyim Asy'ari.

Bentuk pemahaman keagamaan *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang dikembangkan oleh NU disebutkan secara tegas dalam AD (Anggaran Dasar) NU Bab II tentang Akidah/Asas Pasal 3 yakni: "Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyyah berakidah/berasas Islam menurut faham *Ahlussunnah wal Jama'ah* dan menganut salah satu dari madzhab empat; Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali". Untuk bidang tasawuf yang merupakan dasar pengembangan akhlak atau perilaku kehidupan individu dan masyarakat, NU menganut paham yang dikembangkan oleh Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali serta Imam-Imam yang lain.¹⁰

Oleh karena itu, doktrin keagamaan yang diajarkan di PBK meliputi akidah, fiqh dan tasawuf/akhlaq. Dalam hal akidah, sebagaimana faham NU, menganut metode Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam kajian fikih, doktrin yang diajarkan adalah madzhab Syafi'i. PBK juga mengajarkan ajaran tasawuf melalui amaliah *thariqah Sathoriyyah*. *Thariqah Sathoriyyah* sendiri merupakan amaliah *thariqah* yang banyak dianut masyarakat wilayah III Cirebon dan termasuk salah satu *Thariqah al-Mu'tabarah* yang diakui oleh Nahdlatul Ulama (NU).

Menurut keterangan KH. Hasan yang merupakan salah satu Kyai Sepuh PBK, amaliah *thariqah* yang diajarkan merupakan usaha untuk memperbaiki akhlak dan meningkatkan kualitas ibadah syaria't. Sebab antara fiqh dan tasawuf merupakan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau mengutip kaidah yang terkenal yaitu ; *Man tafaaqaha bilaa tasawwufin faqod tafassaqa, wa*

¹⁰ Aceng A. Aziz. 2007. *Islam Ahlussunnah Waljama'ah di Indonesia ; Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Pustaka Ma'arif NU, h. 15

man tasawwafa bilaa tafaqquhin faqod tazandaqo. "Barang siapa yang mengamalkan fiqh tanpa dibarengi tasawuf, maka sungguh ia telah berbuat fasik (rusak), dan barang siapa bertasawuf tanpa fiqh maka ia akan menjadi zindiq."¹¹

Pelelestarian dan Perubahan Orientasi Pesantren

Periode Salafiyah Murni

PBK, sebagaimana umumnya pesantren pada periode awal dipelopori oleh tokoh kharismatik bahkan heroik. Pendiri pesantren ini adalah *Al-Maghfurlah* Mbah Sholeh, diteruskan oleh generasi berikutnya. Ada beberapa hal penting yang terdapat di PBK pada periode ini, yaitu antara lain:

- a. Selain mempelajari Al-Qur'an, secara *takhassus* hanya mempelajari literatur klasik (kitab kuning) yang berfaham *Ahlussunnah waljama'ah*;
- b. Pendidikan akhlakul karimah merupakan hal pelajaran yang paling mendasar;
- c. Seorang kyai secara langsung mendidik dan membimbing semua santri tanpa dibedakan tingkatan santri tersebut;
- d. *Amaliyah thariqah* diberikan kepada setiap santri yang sedang menuntut ilmu dengan harapan akan terbentuk kesalehan ritual dan kesalehan sosial secara lebih baik;
- e. Tidak ada pembedaan terhadap santri pemula dengan santri senior (yang lebih dulu mesantren). Dengan kata lain suatu pengajian secara umum dapat diikuti oleh semua santri;
- f. Semangat anti penjajah (pra kemerdekaan dan perjuangan pasca kemerdekaan) selalu diajarkan dalam setiap pengajian;

¹¹ Hasil Wawancara dengan KH. Hasan, Tanggal Juni 2011.

- g. Semangat anti penjajah diwujudkan dalam berbagai aspek pendidikan dan sosial kemasyarakatan seperti dalam proses belajar mengajar tidak menggunakan papan tulis karena meniru penjajah (Belanda dan Jepang) dan tidak diperbolehkannya Sekolah formal karena saat itu adanya sekolah formal merupakan salah satu politik etis dari Penjajah;
- h. Kyai *sepuh*, merumuskan *platform* pesantren, sebagai wasiat kyai *sepuh* untuk tetap melestarikan kearifan budaya dan menolak segala bentuk budaya luar yang dapat merusak tatanan kehidupan sosial keagamaan masyarakat.
- i. Wasiat atau wejangan tersebut merupakan sumber budi pekerti yang mengkristal menjadi adat istiadat bagi generasi setelahnya sekaligus menjadi *guidance* bagi generasi penerus.

Melestarikan Tradisi Salafiyah

PBK saat ini dipimpin oleh generasi ketiga. Kyai *sepuh* yang masih hidup dan berdomisili di Benda Kerep yakni KH. Ahmad Faqih dan KH. Hasan. Saat ini sistem pendidikan PBK tidak mengalami perubahan signifikan dari periode salafiyah murni sebelumnya. Tradisi salafiyah dan sistem pendidikan PBK hingga sekarang masih tetap dipertahankan. Apa yang berlangsung di PBK seolah-olah merupakan gambaran pendidikan pesantren periode-periode awal dimana semua santri dengan pakaian sarungnya ngaji secara *wetonan* dan *sorogan*, tradisi pesantren yang masih dilestarikan dan menjadi ciri khas PBK. Bahkan lebih unik lagi, sarung dimaknai sebagai sorban-nya Sunan Gunung Jati.

Secara sosial, setiap kebijakan yang mengarah kepada perubahan dilakukan penuh kehati-hatian dengan berpedoman pada *Al-maslahah Al-Mursalah* dan tetap menimbang bobot dampak *mafsadat*-nya. Seperti masuknya jaringan listrik di wila-

yah Benda Kerep sekitar 15 tahun yang lalu merupakan bukti masyarakat pesantren ini tetap menerima unsur perubahan. Meski demikian tetap meminimalisir dampak tersebut dengan tetap melarang seluruh komunitas pesantren dan masyarakat Benda Kerep untuk menggunakan alat-alat elektronik seperti TV, radio, telepon/ hand-phone dan pengeras suara bahkan koran sebagai antisipatif terhadap pengaruh arus modernisasi yang dapat merusak nilai-nilai budaya lokal.

Hingga saat ini pun, ketatnya proteksi terhadap hal yang datang dari luar masih sangat kentara, sebut saja misalnya sekedar ingin dibangun jembatan saja mereka menolak. Praktis, untuk menuju wilayah Benda Kerep kendaraan tidak bisa masuk dan akses satu-satunya adalah dengan menyeberangi sungai bebatuan yang cukup lebar sekitar 80 meter. Jika kondisi sungai banjir, maka harus menunggu surut terlebih dahulu. Diantara alasan logis masih belum diperkenkannya membangun jembatan menurut K. Miftah bahwa selain adanya wasiat dari Mbah Soleh bahwa kehadiran jembatan akan menimbulkan lintas budaya lokal dan interlokal, lagi pula akan menimbulkan kebisingan dari alat transportasi itu jelas mengganggu ketenangan dan kekhusuan belajar para santri dan masyarakat setempat. K. Mifah juga menjelaskan walaupun ada manfaatnya dengan adanya jembatan, tetapi lebih banyak mudharatnya. Beliau menggunakan kaidah *dar'ul mafaasid muqaddamun 'ala jalbil mahsaalih*. Dari ungkapan ini dimaknai, bahwa larangan ini pada awalnya merupakan sebuah metode untuk menentang segala bentuk penjajahan kolonial Belanda seperti dalam hal sistem pendidikan dan apa yang menyerupai penjajah. Selanjutnya, kaidah ini menjadi keyakinan yang terus dilestarikan oleh generasi keturunan pendiri saat ini. Seiring dengan perubahan yang terjadi, larangan itu hanya berlaku di lingkungan pesantren Benda Kerep saja, tetapi bagi

santri, setelah keluar dari PBK, kaidah itu kelihatannya tak berlaku lagi.

Perubahan yang terjadi pada periode ini, terutama dalam aspek pendidikan pesantren, lebih kepada cara pandang yang lebih kooperatif selektif dalam menghadapi pangaruh luar. Meski sampai saat ini pesantren tidak mengadakan pendidikan formal, bagi santri yang sedang menuntut ilmu, tetapi tidak melarang santri yang sudah menjadi alumni untuk melanjutkan ke pendidikan formal. Meski tidak mendapatkan pendidikan formal, masyarakat PBK banyak yang tetap bisa membaca, menulis dan menghitung dengan baik. Pendidikan ini diajarkan secara informal oleh orang tua di rumah masing-masing, dan ada juga anak kyai yang belajar membaca dan menulis latin bersama para santri yang memang sudah dapat membaca tulis latin (karena umumnya para santri adalah tamatan SD sampai SMA).

Pendidikan Berbasis Kitab Kuning

Dipelopori oleh kyai-kyai muda PBK, pengajaran kitab kuning di PBK dilakukan secara berjenjang, mulai dari kitab-kitab rendah kemudian naik ke kitab yang lebih tinggi. Melalui metode berjenjang ini diharapkan proses pengajian santri lebih fokus dan terarah. Selain itu juga diadakan kegiatan diskusi (*bahtsul masail*) yang dilakukan para santri setiap minggu yang sebelumnya belum pernah ada. Kegiatan ini menambah wawasan tersendiri bagi kalangan santri, dimana dalam kegiatan tersebut para santri membedah dan mendiskusikan suatu persoalan-persoalan dengan merujuk pada kitab-kitab kuning.

Berkaitan dengan penguatan adaptasi dan prespektif PBK terhadap pengembangan metodologi pendidikan, pada fase ini dapat dijelaskan beberapa hal berikut: *Pertama*, Perubahan yang terjadi lebih pada cara pandang PBK dalam menghadapi perubahan yang terjadi secara selektif antipatif. *Kedua*, Dalam memandang pen-

tingnya pendidikan formal, generasi muda kyai PBK, seperti yang diungkapkan oleh KH. Miftah, pada dasarnya pendidikan formal adalah penting, hanya saja selama menjalani pendidikan di PBK, santri belum diizinkan untuk menempuh pendidikan formal. *Ketiga*, KH. Miftah, MA merupakan *pioneer* yang lebih akomodatif dalam menerima perubahan dengan tetap teguh berpijak pada tradisi. Beliau merupakan satu-satunya keturunan *Al-magfrulah* Mbah Sholeh yang berdomisili di Benda Kerep yang mengenyam pendidikan formal sampai S2. Satu hal yang menarik, KH. Miftah, MA, selain menimba ilmu di berbagai pesantren salaf seperti Kaliwungu, beliau juga menamatkan kuliah di UNISULA Semarang. Selama kuliah sampai wisuda S1, tidak ada satupun kalangan pesantren yang mengetahui, termasuk ayah beliau yakni KH. Faqih. Ketika KH. Faqih mengetahui anaknya kuliah, pada awalnya beliau sempat kecewa, tetapi KH. Miftah dapat memberikan argumen yang rasional, bahkan beliau diizinkan melanjutkan kuliah S2 di Universitas Terbuka (UT) Pondok Cabe sampai memperoleh gelar *magister*. Beliau beralasan tidak ada dikhotomi ilmu, meski ilmu agama adalah yang lebih utama, pendidikan formal yang didapat tidak lebih sebagai upaya *tholabul 'ilmi*. Oleh karenanya beliau lebih memilih mengabdikan kepada pesantren dan masyarakat daripada menjadi abdi negara (menjadi PNS), terlebih sebagai politikus.

Meski jejak KH. Miftah, MA belum diikuti oleh keturunan Pesantren yang berdomisili di Benda Kerep, namun kondisi ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya Pesantren Benda Kerep tidak "alergi" terhadap pendidikan formal. Hanya saja selama santri mengikuti pendidikan di Pesantren Benda Kerep tetap tidak diizinkan "nyambi" mengikuti pendidikan formal dengan maksud agar lebih fokus melaksanakan *tafaqqahuu fi al-diin*.

Mobilitas Alumni Pesantren

Kehadiran pesantren tidak terlepas dari harapan dan persepsi masyarakat sebagai penggunaannya. Harapan dan persepsi masyarakat semakin kuat terhadap keberadaan pesantren maka lembaga pesantren akan semakin kokoh di tengah-tengah masyarakat. Salah satu yang menjadi penopang eksistensi pesantren adalah kemampuannya dalam melahirkan *output*/alumni pesantren yang memiliki peran dan kontribusi bagi masyarakat yang dilayani. Mobilitas alumni inilah yang membawa efek positif bagi keberadaan pesantren ke depannya.

Tidak ada data pasti dan tertulis mengenai jumlah *output* (alumni) yang dihasilkan PBK. Menurut KH. Miftah, jumlahnya sudah mencapai ribuan, mengingat usia pesantren yang sudah ratusan tahun. Pada periode awal, basis alumni PBK lebih banyak berkisah sebagai ulama yang secara khusus mengabdikan dan mengembangkan syiar Islam di masyarakat. KH. Habib Lutfi Pekalongan dan Habib Abu Bakar adalah salah satu ulama kharismatik yang tercatat sebagai alumni PBK.

Pada perkembangan selanjutnya, secara umum, sebagaimana pada pesantren lainnya, alumni PBK menempati beberapa aktifitas diantaranya: *pertama*, secara *takhassus* melanjutkan pendidikan non formal (mesantren) pada lembaga pendidikan pesantren lain seperti Pesantren Kaliwungu, Tebuireng Jombang, Lirboyo dan lain-lain. *Kedua*, melanjutkan pendidikan formal seperti ke Perguruan Tinggi dan lain-lain. *Ketiga*, melanjutkan ke lembaga pesantren lain sekaligus menempuh pendidikan formal. *Keempat*, dikenal dengan istilah "alumni mukim" yaitu alumni PBK yang siap terjun melakukan pengabdian kepada masyarakat. *Kelima*, banyak alumni PBK juga yang mengembangkan wirausaha seperti menjadi pedagang kain, karpet dan lain-lain yang tersebar di Cirebon, Tasika-

malaya, Bandung, Jakarta (Tanah Abang), dan lain-lain.

Saat ini PBK secara informal, menjalin kerja sama dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan mengirimkan alumni yang berminat untuk melanjutkan pendidikan kuliah. Meskipun banyak santri yang tidak memiliki ijazah formal (SLTP dan SLTA), kerjasama ini tetap dimungkinkan karena IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengeluarkan kebijakan, bagi santri yang bisa membaca kitab kuning dan menghafal beberapa juz al-Qur'an tetap bisa melanjutkan kuliah di IAIN Syekh Nurjati.

PENUTUP

Kesimpulan

1. PBK merupakan salah satu pesantren yang secara konsisten melaksanakan peran-peran mempertahankan, melanggengkan, melestarikan (*al muhafadhatu al qadiimi shalih*) terhadap tradisi dan sistem pendidikan salafiyah. Orientasi pendidikannya lebih menitikberatkan pada *fiqh sufistik* yaitu pendidikan lebih berorientasi pada penanaman nilai-nilai akhlak utama dan orientasi ukhrawi di atas duniawi. Romantisme masa lalu dan beban sejarah menjadikan PBK cenderung bersikap mempertahankan keaslian dan keunikan PBK sejak masa lampau, kini dan mungkin yang akan datang. Masyarakat sendiri dapat menerima, memanfaatkan dan menikmati keberadaan PBK baik dalam bentuk pelayanan keagamaan, pendidikan maupun peran sosial lainnya.
2. Bentuk-bentuk salafiyah kultural yang tetap eksis di pesantren salafiyah Benda Kerep berupa kegiatan *Haolan, Muludan, Syawalan, Barzanzi, Tahlilan, Barkah, Manaqiban, Makbarah*: tradisi tersebut terkait erat dengan kepercayaan dan ritual agama Islam dalam PBK yang sampai sekarang terus dipertahankan. Perubahan hampir tidak terjadi baik

dalam kehidupan sosial, kultural keagamaan serta metode pembelajaran. Perubahan sistem di luar tidak serta merubah tradisi dan sistem pendidikan yang ada. Bahkan para pengasuh dengan menggunakan legitimasi wasiat para pendiri pesantren berupaya sekuat tenaga mempertahankan tradisi tersebut sebagai sebuah kelebihan dan keunikan yang justru dapat menunjang keberadaan PBK.

3. Dalam perspektif perubahan, sistem pendidikan PBK termasuk lembaga pendidikan yang "belum" sepenuhnya menerima perubahan sistem dari luar baik sebagai "as schooling" maupun sebagai "in class-room". Jaringan pendidikan yang terbangun dengan sejumlah pesantren, seyogyanya dapat mendorong terjadinya perubahan di kalangan komunitas PBK. Namun romantisme masa lalu, beban sejarah dan sebagian masyarakat yang dapat menikmati/membutuhkan PBK, menjadikan PBK lebih bersikap mempertahankan dan melanggengkan tradisi yang ada.

Rekomendasi

1. Perlunya Pemerintah (Daerah dan Pusat) memberikan perhatian khusus, menjalin komunikasi yang baik, bantuan finansial sekaligus payung sosial lainnya terhadap PBK dengan memperhatikan lokal *wisdom* yang berlaku di pesantren benda.
2. Perlunya pemerintah membuka akses kepada pesantren model ini untuk memberikan penguatan jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang mapan. Program kerjasama dengan lembaga lain yang telah mapan perlu digalakkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, selain itu melalui kerjasama dengan lembaga yang mapan, pesantren salafiyah mendapat masukan-masukan yang berarti dan memberikan kontribusi bagi pesantren baik yang

sifatnya bantuan teknis, finansial maupun kesempatan.

3. Keunikan dan kekhasan yang dimiliki PBK dalam melestarikan budaya/tradisi secara turun-temurun menjadi efektif dalam membendung pengaruh budaya luar yang destruktif, kiranya dapat dijadikan sebagai model dalam pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal baik di sekolah maupun di masyarakat.

SUMBER BACAAN

- Abbaza, Mona (1999): *Pergeseran Orientasi Pendidikan Islam: Studi Kasus Alumni Al Azhar*. Jakarta, LP3ES.
- Anasom (2007): *Kyai, Kepemimpinan dan Patronase*. Semarang, Pustaka Rizki Putra.
- Azra, Azyumardi (2002): *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta, Logos.
- Abdul, A. Azis, dkk. (2007): *Islam Ahlussunnah Waljama'ah di Indonesia ; Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika Nahdlatul Ulama*. Jakarta, Pustaka Ma'arif NU.
- Dhofier, Zamakhsyari (1982): *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta, LP3ES.
- Husen, Torsten (1979): *The School in Question, A Comparative Study of the School and its Future in Western Society*. Oxford University Press.
- Jarolimek, John (1981): *The Shool in Contemporary Society: An Analysis of Social Currents, Issues, and Forces*. New York, Macmillan Publishing Co.
- James C. Scott. (1993): *Perlawananana Kaum Tani*, terj. Budi Kusworo Dkk., Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,,
- Madjid, Nurcholish (1997): *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina.

Mastuhu, (1994): *Dinamika Sistem Pendidikan Peantren: suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta, INIS

Raharjo, M. Dawam (ed.), (1985): *Pergulatan Pesaantren; Membangun dari Bawah*. Jakarta, P3M.

Steenbrink, Karel A. (1986): *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*. Jakarta, LP3ES

Sudjoko Prasojo, dkk., (1982): *Profil Pesantren: Laporan Hasil Penelitian Pesantren al-Falak dan Delapan Pesantren Lain di Bogor*. Jakarta, LP3ES.

Wahid, Abdurrahman (2001): *Menggerakkan Tradisi: Esei-Esei Pesantren*. Yogyakarta, LKiS.

UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN HJ. HANIAH MAROS SULAWESI SELATAN

Oleh: Abd. Muin M

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Jl. MH Thamrin No. 06 Jakarta Pusat
puslitbangpenda@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of this paper is to reveal how the quality of education in this Islamic boarding school is, particularly related to education facilities, curriculum and strategies of education quality improvements. This study used the qualitative method. Findings of this study are: first, education infrastructure and facilities are relatively complete and adequate, which are supported by the atmosphere of the Islamic boarding school that is full of simplicity and modesty by habituation in implementing clean and healthy lifestyle. Second, the tafaqquh fi-al din (understanding of religion)-based curriculum compiled by the Islamic boarding school occupies the same degree (equal) to the curriculum prepared by the Ministry of Religious Affairs, so that both tafaqquh fi-al din (understanding of religion) studies and general studies have high electability, which is able to increase the quality of education and also generates interest and motivation of the people (parents) to put their children to the Islamic boarding school. Third, education in the Islamic boarding school has a strong independency because it is supported by substantial financial resources.

Keywords: Pesantren, tafaqquh fi al-din, Independency, Quality

Abstrak

Tujuan tulisan ini untuk mengungkapkan bagaimana mutu pendidikan di pondok pesantren ini, khususnya berkaitan dengan sarana pendidikan, kurikulum dan strategi peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil temuan studi ini adalah: Pertama, sarana dan fasilitas pendidikan relatif lengkap dan memadai, ini didukung oleh suasana kehidupan pondok pesantren yang penuh kesederhanaan dan kebersahajaan dengan pembiasaan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kedua, kurikulum yang berbasis tafaqquh fi-al din yang disusun oleh pondok pesantren ini menempati derajat yang sama (equal) dengan kurikulum yang disusun Kementerian Agama, sehingga baik kajian tafaqquh fi al-din maupun pelajaran umum memiliki electabilitas yang tinggi, hal ini mampu meningkatkan mutu pendidikan dan sekaligus membangkitkan animo dan motivasi masyarakat (orangtua) untuk memasukkan anaknya ke pesantren ini. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren ini memiliki kemandirian yang kuat, karena didukung oleh sumber dana yang besar.

Kata Kunci: Pesantren, bertafaqquh fi al-din, Berkemandirian, Bermutu

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal

30 ayat (4) pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren,... Ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal

Naskah diterima 15 Mei 2012. Revisi pertama, 1 Juni 2012. Revisi kedua, 13 Juni 2012 dan revisi terakhir 23 Juni 2012

14 ayat (1) pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Hal ini secara eksplisit dengan tegas mengakui bahwa pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam dalam sistem pendidikan nasional sejajar dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti sekolah. Tapi, kenyataan ini belum sepenuhnya disadari dengan baik oleh masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pondok pesantren. Kemungkinan hal ini disebabkan, karena undang-undang ini masih bagaikan bayi, sehingga tidak sebanding dengan usia kelahiran pondok pesantren.

Tuntutan terhadap pondok pesantren yang lebih bermutu semakin mendesak, sebagai akibat dari ketatnya persaingan dalam dunia kerja yang serasi dengan kebutuhan *stakeholders* pondok pesantren, artinya "mutu" harus menjadi orientasi produk pendidikan. Karena itu, pondok pesantren yang tidak mengorientasikan pendidikannya pada pencapaian mutu, maka dapat dipastikan bahwa cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh masyarakat. Sebaliknya, pondok pesantren yang konsisten menjadikan mutu pendidikan sebagai orientasi dan standar kualitasnya akan selalu dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Respon pondok pesantren terhadap peningkatan mutu pendidikan dan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat, sebenarnya mencakup empat hal yaitu: *pertama*, pembaruan substansi atau isi pendidikan pondok pesantren dengan memasukkan subyek-subyek umum dan vocational; *kedua*, pembaharuan metodologi, seperti sistem klasikal dan penjenjangan; *ketiga*, pembaharuan kelembagaan, seperti kepemimpinan pesantren, diversifikasi lembaga pendidikan; dan *keempat*; pembaharuan fungsi, dari fungsi pendidikan berkembang sehingga meliputi fungsi sosial.¹ Hal ini, menunjukkan

¹ Mujamil Qomar. 2005. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, h. 79

bahwa pondok pesantren telah melakukan perubahan yang dianggap tidak hanya mendukung kontinuitas pondok pesantren sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi santri seperti system penjenjangan, kurikulum yang lebih jelas dan system klasikal. Perubahan ini pondok pesantren tetap berpegang teguh kepada kaidah "*al muhafadzatu 'ala al qadimi al shalih wa al akhdzu bi al jadid al aslah*", pondok pesantren tetap memelihara, menjaga dan mempertahankan tradisi dan tata nilai yang masih relevan, namun pada sisi lain secara selektif beradaptasi dengan pola baru yang dapat mendukung keberlangsungan sistem pendidikan pondok pesantren pada masa kini dan mendatang.

Sehubungan dengan itu, Mukti Ali mengemukakan, bahwa perkembangan pondok pesantren seyogyanya tidak diarahkan ke pola vertikal, melainkan lebih tepat jika bersifat horizontal, yakni memperluas jenis-jenis pendidikan menengah yang justru diperlukan bagi perkembangan masyarakat pada saat ini.² Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesenjangan antara sistem pendidikan Islam dengan ajaran Islam. Sistem pendidikan yang ambivalen mencerminkan pandangan dikhotomis yang memisahkan ilmu agama Islam dengan ilmu umum. Ini jelas tidak seirama dengan konsep ajaran Islam yang bersifat integral, sebab ajaran Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara urusan dunia dengan akhirat. Karena itu, apakah Pondok Pesantren Hj. Haniyah ini mampu menyandingkan dengan mesra antara pendidikan keagamaan (*tafaquh fi al-din*) melalui berbagai kajian kitab kuning dengan pembahasan pelajaran umum melalui pendidikan formal (madrasah).

Dengan demikian, berbagai masalah yang dihadapi pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam, sama sekali tidak menyebabkan pondok pesantren terkubur dan menghilang dari dunia pendidikan. Tapi, justru memicu ker-

² A. Mukti Ali. 1987. *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini*. Jakarta: Rajawali Press. h. 47.

ja keras pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Hj. Haniah ini untuk mengubah wajah pondok pesantren semakin tertata dengan menjadikan pendidikan pondok pesantren sebagai pendidikan berbasis *tafaqquh fi al-din*, berkemandirian dan bermutu. Memang tidak mudah untuk membangun pendidikan pondok pesantren yang semacam ini, tapi ketika faktor tersebut dijadikan orientasi dalam pendidikan, maka berbagai faktor yang mendukung untuk mencapainya selalu diupayakan dengan maksimal, seperti; sarana pendidikan, kurikulum, strategi peningkatan mutu pendidikan dan manajemen pendidikan. Namun, bagaimana faktor-faktor tersebut secara empirik belum diketahui dengan jelas, untuk itulah penelitian ini penting dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sejarah berdiri, sarana pendidikan, kurikulum dan bagaimana strategi peningkatan mutu pendidikan di pondok pesantren ini? Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami sejarah berdiri, sarana pendidikan, kurikulum dan strategi peningkatan mutu pendidikan di pondok pesantren ini.

Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah: a) Sejarah berdiri, meliputi: pendiri, latar belakang pendirian, visi-misi dan perkembangan pondok pesantren, b) Sarana pendidikan, meliputi: jenis dan kondisi sarana pendidikan yang dapat menunjang proses pendidikan yang bermutu, seperti: ruang belajar, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, masjid dan asrama, c) Kurikulum, meliputi: sumber materi pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran dan alokasi waktu yang disediakan dan digunakan dalam proses pembelajaran, dan d) Strategi peningkatan mutu pendidikan, meliputi: pendidik dan tenaga kependidikan, santri dan pendanaan operasional pendidikan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Mutu Pendidikan

Berbagai pendapat berkaitan dengan mutu pendidikan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain menurut Wahid mutu pendidikan pondok pesantren sangat terkait dengan visi-misi, tujuan, kurikulum, kepemimpinan yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman era globalisasi. Namun, pondok pesantren juga harus memelihara, menjaga dan mempertahankan identitas dirinya sebagai penjaga tradisi keilmuan klasik, dalam arti tidak larut dengan modernisasi, tapi mengambil sesuatu yang dipandang bermanfaat untuk perkembangan mutu pendidikan pondok pesantren itu sendiri.³ Dalam hal ini, pondok pesantren telah memasuki era globalisasi, artinya pondok pesantren bersedia atau tidak, harus berhadapan dengan kompetitor lainnya di tengah perkembangan dunia yang kian kompetitif. Karena itu, pendidikan di pondok pesantren harus mampu menjembatani antara keilmuan yang dikembangkan di pondok pesantren dengan tuntutan globalisasi dan modernisasi, sehingga output pondok pesantren mampu memenangkan persaingan dengan output dari lembaga pendidikan lainnya, baik dalam bidang pendidikan keagamaan (*tafaqquh fi al-din*) maupun dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di samping itu, Umiarso dan Zazin mengemukakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan dari konsumen pendidikan (santri, orang tua santri dan masyarakat).⁴ Sejalan dengan pendapat ini Tilaar mengemukakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memberdayakan outputnya,

³ Abdurrahman Wahid. 2010. *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, hh. 51–55.

⁴ Umiarso & Nur Zazin. 2011. *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan*. Semarang: Rasail Media Group, h. 173.

bukan diperdayakan oleh berbagai jenis sistem dan program. Juga suatu lembaga pendidikan memiliki kualitas tinggi apabila mempunyai akuntabilitas terhadap masyarakatnya.⁵ Hal ini berarti semua program pendidikan yang ada dalam pondok pesantren accountable terhadap pemiliknya, ini tepat dilaksanakan di pondok pesantren, karena pondok pesantren adalah merupakan pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud mutu pendidikan dalam penelitian ini adalah jika orientasi mutu pendidikan di pondok pesantren yang meliputi input, proses dan output dapat terpenuhi dengan baik sesuai tuntutan kebutuhan baik santri, orang tua santri maupun masyarakat secara luas dengan melalui strategi peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk meletakkan standar minimal yang harus ditempuh untuk mencapai mutu pendidikan, juga peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi kepada keterampilan hidup (*life skills*).

Pondok Pesantren

Berdasarkan sosio-historis, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang telah berusia relatif tua lahir dengan tujuan untuk mengajarkan, menyampaikan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan misi awalnya (*tafaqquh fi al-din*). Dalam hal ini Dhofier mengemukakan bahwa ada lima elemen dasar dari tradisi pesantren, yaitu pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan kyai. Ini berarti bahwa suatu lembaga pengajian yang telah berkembang hingga memiliki kelima elemen tersebut, akan berubah statusnya menjadi pesantren.⁶

⁵ H. A. R. Tilaar. 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, hh. 463 – 469.

⁶ Zamakhsyari Dhofier. 1985. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, h. 44.

Pendapat ini seirama dengan Zarkasyi dalam Amir Hamzah yang mengemukakan, bahwa pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kyai sebagai figur sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwalkannya dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya.⁷ Sedangkan Yacub berdasarkan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pondok pesantren, selain melakukan tugas utama sebagai lembaga pendidikan keagamaan (*tafaqquh fi al-din*), juga terlibat secara langsung dalam kegiatan pembangunan yang terdiri dari berbagai bidang, seperti; bidang sosial, ekonomi, teknologi dan ekologi, sehingga beberapa pondok pesantren telah berhasil meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitarnya.⁸

Begitupun Mukti Ali dalam Hasbullah mengatakan bahwa pondok pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat kyai (pendidik) yang bertugas mengajara dan mendidik santri-santri (peserta didik) dengan menggunakan masjid sebagai sarana untuk menyelenggarakan pengajaran dan pendidikan tersebut dan didukung pondok sebagai tempat tinggal (mukim) santri.⁹ Juga menurut Ziemek pondok pesantren adalah lembaga multi-fungsional yang tidak hanya berkutat pada perkembangan pendidikan Islam semata. Namun, juga sangat berperan terhadap kemajuan pembangunan lingkungan sekitarnya.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seirama dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terjadilah adaptasi struk-

⁷ Amir Hamzah Wirosukarto. 1996. K. H. Imam Zarkasyi dari Gontor. Ponorogo: Gontor Press, h. 56.

⁸ M. Yacub. 1985. *Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Angkasa, hh. 12 – 14.

⁹ Hasbullah. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 24.

¹⁰ Manfred Ziemek. 1986. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, h. 96.

tur dan pandangan dalam berbagai aspek kehidupan, di antara aspek tersebut adalah berkaitan dengan dunia pendidikan. Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, pada satu sisi pondok pesantren harus mampu memelihara dan mempertahankan nilai-nilai *tafaqquh fi al-din* sebagai cirikhas dan karakter pendidikan pondok pesantren. Pada sisi lain, pondok pesantren harus beradaptasi dalam menerima pembaharuan sistem pendidikan yang merupakan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan modern.

Kaitannya dengan orientasi mutu pendidikan pondok pesantren, maka yang dimaksud pondok pesantren dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada elemen-elemen pondok pesantren di atas. Tapi, juga berbagai elemen utama lainnya yang mampu mewujudkan dan memperkuat *tafaqquh fi al-din*, kemandirian dan mutu pendidikan, antara lain; laboratorium bahasa, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang pimpinan, ruang ustadz/ah, ruang tata usaha, aula (ruang pertemuan) dan semua elemen-elemen ini dikelola dengan sistem manajemen yang profesional dan dukungan oleh dana yang kuat. Selain itu, metode kajian kitab-kitab kuning dengan menggunakan sorogan, wetonan, bandongan dengan teknik pembelajaran halaqah dan musdzakarah diterapkan secara proporsional dan profesional.

METODOLOGI PENELITIAN

Sasaran penelitian ini adalah Pondok Pesantren Hj. Haniah berdiri pada 2006, meskipun relatif baru, tapi memiliki beberapa aspek yang menarik untuk diteliti secara mendalam, antara lain; (a) santrinya cukup banyak (794 orang) dan setiap tahun jumlahnya meningkat dengan signifikan, semuanya tinggal di asrama (santri mukim), (b) umumnya pondok pesantren didirikan oleh kyai, tapi pondok pesantren ini didirikan oleh pengusaha, (c) umumnya pondok pesantren dipimpin oleh kyai yang sekaligus pendiri dan pemilik, tapi Pondok

Pesantren Hj. Haniah ini dipimpin oleh kyai yang bukan pendiri dan pemilik pondok pesantren ini, (d) umumnya pondok pesantren mengharapkan bantuan sarana, dana pendidikan dan bantuan lainnya dari pemerintah, misalnya dana BOS. Ternyata pondok pesantren ini tidak pernah menerima dana operasional pendidikan, dan tidak pernah mengajukan permohonan dana operasional pendidikan kepada pemerintah, sehingga semua pengadaan sarana dan dana operasional pendidikan ditanggung sendiri, padahal santrinya dibebaskan dari segala bentuk uang iuran.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan alasan, antara lain: (1) untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui secara empirik, (2) memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif, (3) sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena apa adanya, (4) ingin memahami makna secara holistik tentang fenomena yang terjadi, dan (3) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan.¹¹

Teknik pengumpulan informasi dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan penelitian ini adalah Pimpinan pondok pesantren, Kepala Bidang Pendidikan dan Kurikulum, Kepala Bidang Kesantrian, Kepala Tata Usaha, Ustadz/ah, Santri, dan Orangtua santri.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Informasi, sebagai berikut: a) Triangulasi metode, dalam hal ini informasi atau data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, diuji dengan hasil observasi dan seterusnya, b) triangulasi sumber, informasi atau data tertentu yang telah diperoleh, ditanyakan lagi kepada informan yang

¹¹ Anselm Strauss & Juliet Corbin. 1988: *Basics of Qualitative Research*. Chicago, University of Chicago Press., h. 5.

berbeda antara informan dan dokumentasi, dan c) Triangulasi situasi, peneliti memperhatikan dengan cermat bagaimana penuturan seorang informan, jika dalam keadaan sendirian, dibandingkan penuturannya jika bersama-sama dengan orang lain.

Peneliti sebagai instrumen, maka teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data/informasi melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Peneliti merekam, mencatat, mengkaji, melakukan check and recheck, mengklasifikasi, serta mengembangkan dan mengabstraksi data/informasi yang diperoleh dari informan dan dokumen. Data/informasi yang dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen diolah, dianalisis dan dirumuskan secara induktif yang pada akhirnya menjadi hasil/temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdiri

Proses pendirian Pondok Pesantren Hj. Haniah dirintis oleh keluarga besar H. Bukhari HG¹² yang dipelopori oleh Drs. H. Muh. Hajar Arif Daeng Gassing¹³ pada

¹²H. Bukhari adalah putra asli daerah ini yang dikenal sebagai dermawan dan pengusaha (CV. Anugrah Alam Jaya Suzuki Pratama) yang sukses mengembangkan usahanya ke seluruh wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur. Beliau tidak hanya mendirikan dan menanggung seluruh dana operasional pendidikan Pondok Pesantren Hj. Haniah. Tapi, juga membangun sebagian besar masjid, dan membiayai sejumlah pondok pesantren dan madrasah swasta di Kab. Maros.

¹³Drs. H. Muh. Hajar Arif Daeng Gassing, juga putra asli daerah ini dan merupakan adik tiri dari Ibu Hj. Haniah (almarhumah) ibu kandung H. Bukhari. Beliau cukup lama menuntut ilmu di Pondok Pesantren DDI Mangkoso Barru. Setelah banyak menimba ilmu dari pondok pesantren ini, beliau merantau ke Papua Jayapura dan mukim di daerah ini cukup lama dan sempat mengembangkan agama Islam di Papua. Pada tahun 2005 beliau kembali ke kampung halamannya dan mengajak keluarga besar H. Bukhari untuk bersama-sama merintis mendirikan pondok pesantren. Karena itu, pada tahun 2006 berhasil mendirikan pondok pesantren yang disepakati memberi nama "Pondok Pesantren Hj. Haniah". Nama pondok pesantren ini diambil dari nama

pertengahan Nopember 2005. Pendirian pondok pesantren ini dilatar belakangi oleh selain untuk menolong masyarakat (orang-tua) yang secara ekonomi tidak mampu, agar anak-anaknya bisa menuntut ilmu di pondok pesantren. Juga, situasi dan kondisi yang sedang berkembang pada saat itu, kini dan mendatang. Dalam hal ini, Kab. Maros merupakan salah satu daerah tingkat dua yang bertetangga dekat dan sekaligus merupakan daerah penyangga Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan.

Kota Makassar merupakan pintu gerbang utama bagi wisatawan mancanegara di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur, di mana wisatawan, khususnya para wisatawan mancanegara jelas membawa sikap dan perilaku liberalisme dan sekularisme, juga membongkang berbagai budaya yang cenderung sangat bebas dari nilai-nilai ajaran agama (Islam) atau moral, etika dan akses-akses negatif lainnya.

Begitu imperatifnya tantangan tersebut, sehingga kegagalan dalam mengatasinya, akan berarti berbagai budaya Barat yang secara ekstrim merobek-robek gaya hidup generasi muda di daerah ini yang penuh keikhlasan, kejujuran dan kesederhaan dalam berbagai aspek kehidupan akan menjadi individu-individu yang semata-mata mengutamakan kesenangan material (*hedonism*).

Sementara itu, masyarakat umumnya dan generasi muda khususnya di Kab. Maros tidak mungkin menghindari dampak tersebut. Karena itu, faktor yang sangat penting dan strategi adalah memperkuat benteng dan daya filter dari berbagai dampak tersebut, khususnya dampak negatif yang sangat deras. Untuk membangun ben-

kak tirinya dan juga merupakan ibu kandung H. Bukhari. Ini dimaksudkan semata-mata tidak untuk mengkultuskan Ibu Hj. Haniah (almarhumah). Tapi, dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk mengenang dan melanjutkan cita-cita luhur almarhumah untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai ajaran Islam kepada anak-anak di daerah ini khususnya, dan umumnya untuk generasi umat Islam.

teng dan daya filter yang handal, kuat dan kokoh tidak lain adalah harus mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa “pondok pesantren”, di mana pola hidup pondok pesantren yang penuh kesederhanaan, kejujuran, dan paling tidak menjauhkan pikiran, sikap dan tindakan materialistik.

Oleh karena itu, pondok pesantren sejak dari dahulu kala sampai sekarang sudah teruji dan diyakini kemampuannya untuk mendidik anak-anak menjadi beriman, bertakwa berakhlakul karimah, cerdas, jujur, amanah yang sekarang ini sudah mulai terkikis dan tergusur oleh derasnya dampak negatif budaya Barat yang melahirkan gaya hidup dan penghidupan kota-kota besar seperti Kota Makassar yang seakan-akan tidak lagi tertanam dan tumbuh nilai-nilai ajaran agama Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Meskipun, pondok pesantren perannya cukup sentral dalam menjaga dan memelihara keilmuan. Namun, bukan berarti pondok pesantren tidak terlepas dari kelemahan. Dalam pandangan Madjid pelaksanaan pola salafiyah di pondok pesantren secara kaku (*rigid*) merupakan kendala tersendiri. Karena itu, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan dan sosial, dituntut melakukan kontekstualisasi tanpa harus mengorbankan watak aslinya.¹⁴

Dengan demikian, Pondok Pesantren Hj. Haniah dibuka pada tanggal 1 Maret 2006 yang dipimpin oleh KH. Mustafa Deku dengan memiliki 451 santri yang tersebar pada jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Madrasah Diniyah, selain mata pelajaran agama, juga difokuskan kepada pelajaran Tilawatil Qur'an, Qiraatul Qur'an, Tahfidz Qur'an dan Barzanji yang diasuh langsung oleh Usman Hawa dan Drs. H. Muh. Hajir Arif Daeng Gassing. Oleh karena pada saat

¹⁴Nurcholis Madjid. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren.... Op. Cit.*, h. 114.

itu, ternyata cukup banyak anak-anak usia tingkat pendidikan dasar dan menengah yang mendaftar dan sangat memungkinkan untuk membuka pendidikan formal (madrasah), maka pada saat itu (tahun pelajaran 2006/2007), juga membuka Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), sebab memang lokal/ruang belajar dan sarana pendidikan lainnya sudah tersedia.¹⁵

Berdasarkan latar belakang berdiri sebagaimana diuraikan secara singkat di atas, maka Pondok Pesantren Hj. Haniah dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam, memiliki visi terwujudnya generasi muda yang ahli agama, beriman, berakhlak mulia, terampil, produktif, mandiri dan berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan misinya, sebagai berikut: a) mengoptimalkan pemantapan pembinaan santri melalui pendekatan kekeluargaan dan kekerabatan, sehingga santri merasa aman, nyaman dan lebih bersemangat belajar, b) melaksanakan metode, strategi dan pendekatan pembelajaran yang mampu membentuk karakter santri yang beriman, berakhlakul karimah, percaya diri, terampil dan kompetatif dalam berbagai aspek kehidupan, c) mengembangkan muatan lokal potensial yang bernilai produktif dalam upaya kemandirian santri, d) meningkatkan tradisi keagamaan, seperti; membaca surat Yasin, barzanji, tahlilan, shalawatan, shalattullael dan berbagai puasa sunnah sebagai upaya lebih menghidupkan tradisi kepesantrenan, e) meningkatkan pembahasan al Qur'an dan hadis melalui kajian kitab-kitab klasik, sehingga santri mampu menguasai pendidikan keagamaan (*tafaqquh fi al-din*) yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi dan modernisasi.¹⁶

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Bidang Kesantrian, tgl. 9 April 2011.

¹⁶ Sumber: Dokumen Pondok Pesantren Hj. Haniah, 2011.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa pondok pesantren ini telah meletakkan dasar-dasar pendidikan *tafaqquh fi al-din* yang berorientasi kepada mutu pendidikan untuk melahirkan santri yang berdaya saing dalam bidangnya. Hal ini hanya dapat diwujudkan dalam proses pendidikan yang bermutu pula, sehingga dapat melahirkan santri yang berwawasan luas, unggul dan profesional dan akhirnya menjadi suri tauladan yang diharapkan untuk kepentingan pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

Sarana Pendidikan

Pondok Pesantren Hj. Haniah mengalami kemajuan yang fenomenal, karena mendapat dukungan yang kuat dari pendirinya sebagai dermawan dan pengusaha yang sukses, sehingga pondok pesantren ini memiliki gedung dan berbagai fasilitas pendidikan yang relatif memadai dan layak untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Karena itu, pondok pesantren ini tidak lagi bisa sepenuhnya diasosiasikan dengan fasilitas fisik seadanya dengan asrama santri, karyawan dan ustadz yang penuh sesak dan tidak higienis.

Berdasarkan observasi, wawancara dan dokumen tentang data sarana dan fasilitas pendidikan Pondok Pesantren Hj. Haniah tahun 2011, dapat diketahui bahwa sejak didirikan pada tahun 2006 sampai tahun 2011 pondok pesantren ini berdiri di atas tanah seluas 6 Ha dengan status sertifikat hak milik..

Ketersediaan sarana dan fasilitas pendidikan di Pondok Pesantren Hj. Haniah tidak lagi identik dengan kelembagaan pendidikan Islam yang terbelakang dan kumuh. Tapi, tampaknya pondok pesantren ini telah mengadopsi sarana dan fasilitas pendidikan yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, di pondok pesantren ini ada ikhtiar untuk mempertemukan ajaran agama dengan sains. Dalam

hal ini, menurut beberapa santri di antaranya, Firdaus dan Muharram mengatakan bahwa ketersediaan sarana pendidikan di pondok pesantren ini sangat mendukung kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran, Karena, selain fasilitas pembelajaran cukup lengkap, juga ustadz/ah yang sebagian besar tinggal di asrama dalam lingkungan pondok pesantren, sehingga para ustadz/ah tersebut selama 24 jam selalu siap untuk membimbing santri yang mengalami masalah dalam pembelajaran, misalnya, ketika santri sedang belajar baik belajar berkelompok maupun sendirian dalam kamar, jika menemukan hal-hal yang belum jelas, maka dapat ditanyakan secara langsung kepada ustadznya.¹⁷

Kondisi sarana dan fasilitas pendidikan yang memadai tersebut, tentunya masyarakat menaruh harapan yang besar kepada pondok pesantren ini untuk menjadi salah satu agen perubahan dan pembangunan masyarakat. Artinya, Pondok Pesantren Hj. Haniah diharapkan tidak hanya mampu dalam memainkan fungsi-fungsi kepesantrenannya, yaitu: 1). transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, 2). pemeliharaan tradisi Islam, dan 3). reproduksi ulama.¹⁸ Karena itu, pendidikan yang ditanamkan dan dikembangkan di pondok pesantren ini lebih adaptif dan antisipatif terhadap berbagai kebutuhan tantangan zaman, sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

Ketersediaan sarana pondok pesantren yang demikian ini, diharapkan menjadi alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu sendiri dan sekaligus sebagai pusat pengembangan pembangunan yang tetap berorientasi kepada nilai-nilai ajaran agama Islam (*tafaqquh fi al-din*), se-

¹⁷ Wawancara dilakukan di masjid pada tgl. 8 April 2011.

¹⁸ Azyumardi Azra. 1997. *Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan*, sebagai Pengantar Buku "Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan" oleh Nurcholis Madjid. Jakarta: Dian Rakyat, h. xxiii

hingga pada akhirnya, Pondok Pesantren Hj. Haniah dapat menjadi pusat penyuluhan kesehatan masyarakat, pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya dan seterusnya akan lahir berbagai pusat pelayanan masyarakat dari pondok pesantren ini.

Kurikulum Pendidikan

Penyusunan kurikulum membutuhkan berbagai landasan yang kuat dan didasarkan atas hasil-hasil pemikiran mendalam. Landasan kurikulum yang dimaksud adalah landasan filosofis, psikologis, kultur dan sosial serta landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I, Pasal 1 ayat (19) kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Sehubungan dengan itu, Ketua Bidang Pendidikan dan Kurikulum mengungkapkan,¹⁹ bahwa kurikulum yang diterapkan di Pondok Pesantren Hj. Haniah ini, adalah: *Pertama*, kurikulum yang disusun oleh Kementerian Agama. Kurikulum ini khusus diterapkan pada kegiatan intrakurikuler pendidikan formal (MTs dan MA) yang diselenggarakan di lingkungan pondok pesantren ini. *Kedua*, kurikulum yang disusun sendiri (pengasuh dan para guru/asatidz) pondok pesantren. Kurikulum ini, selain memuat budaya lokal dengan tujuan untuk memperkuat tradisi pesantren, juga untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, seperti; membaca surat Yasin (yasinan), barazanji, tahlilan, shalawatan yang dilaksanakan di masjid setiap Kamis (malam Jum'at) ba'da shalat Maghrib yang

dilanjutkan ba'da shalat Isya yang dipimpin oleh ustadz Muh. Farid Fadly, kegiatan ini wajib diikuti oleh semua santri, kecuali santri perempuan yang dalam keadaan berhalangan.

Kurikulum yang disusun sendiri, juga memuat berbagai kajian kitab-kitab kuning dengan tujuan untuk lebih memperkuat dan mengembangkan fungsi-fungsi tradisional pondok pesantren. Sebab kajian kitab-kitab kuning adalah merupakan cirikhas dan karakter pondok pesantren, maka kajian kitab-kitab kuning di pondok pesantren ini tetap dipelihara, dipertahankan dan lebih dikembangkan.

Kajian kitab-kitab kuning yang diterapkan di pondok pesantren ini menggunakan metode sorogan dan bandongan. Dalam hal ini metode sorogan dilaksanakan di masjid, sedangkan metode bandongan (di pesantren ini lebih dikenal dengan *halaqah*) dilaksanakan di ruang kelas, yaitu ustadz menerangkan pelajaran dan para santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan yang dianggap penting. Dalam kaitannya dengan metode sorogan, ustadz Jumain mengemukakan, bahwa bagi santri yang belum menguasai dasar-dasar ilmu alat (nahwu dan sharaf) akan mengalami kesulitan dalam mengikuti kajian kitab-kitab kuning dengan metode sorogan, karena ilmu nahwu dan sharaf ini merupakan kunci utama untuk mengkaji kitab-kitab kuning dengan metode sorogan, maka ustadz selalu memotivasi kepada santri untuk lebih menyenangkan belajar dan memperdalam ilmu nahwu-sharaf dan kitab-kitab kuning dengan menanamkan konsep "barakah" yang diyakini oleh komunitas pondok pesantren ini. Ustadz Jumain ini merupakan salah seorang ustadz yang bertugas untuk membimbing santri dalam kajian kitab-kitab kuning mengungkapkan, bahwa metode sorogan memiliki kelebihan, antara lain; santri relatif cepat dalam mengkaji kitab-kitab, ustadz mudah mengevaluasi sejauhmana tingkat kemampuan setiap santri dalam memahami materi dari kitab tersebut, juga

¹⁹Wawancara dengan Ketua Bidang Pendidikan dan Kurikulum Pondok Pesantren Hj. Haniah Drs. H. Abd. Azis Zakaria, M.Pd, tgl. 9 April 2011.

ustadz dapat menanamkan berbagai nilai-nilai yang terkandung dalam kitab-kitab yang dikaji itu. Karena itu, metode sorogan intinya adalah menanamkan nilai-nilai kepada santri, sebab setiap santri memiliki kesempatan untuk belajar dan berdialog secara langsung dengan ustadz, hanya saja metode sorogan ini dapat memakan waktu yang relatif lama, sehingga sangat memerlukan kesabaran dan keuletan baik santri maupun ustadz.²⁰

Adapun kitab-kitab kuning yang tercantum dalam kurikulum yang disusun sendiri oleh pondok pesantren ini, antara lain: Tafsir Jalalain, Ilmu Tafsir, Tanwir Qulub, Khazinatul Asrar, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Ilmu Nahwu (Mukhtasar Jiddan, Mutamimah, Awamil, Alfiyah Khudari, Qawaidul Lugatul 'Arabiyah, 'Imrithi, Qatrun Nada), Sharaf (Kitab Tasrif, Matan Kaylani, Nazham Maqsud), Ilmu Mantiq (Idahul Mubham, Sulam Munauraq, Syu'ban.), Kifayatul Akhyar, Baidayatul Mujtahid, Riyadhus Shalihin, Irsyadul 'Ibad, Kifayatul Awwam, Bulughul Maram, dan Jawahirul Kalamiyah.²¹ Menurut Ketua Bidang Pendidikan dan Kurikulum,²² kitab-kitab ini merupakan kitab-kitab yang populer diajarkan di pondok-pondok pesantren di Sulawesi Selatan, tapi beberapa tahun terakhir ini sejumlah pondok pesantren tidak memprogramkan kitab-kitab ini sebagai kajian yang wajib diikuti dan dikuasai oleh santri dengan berbagai alasan, antara lain; umumnya santri kurang termotivasi mengikuti kajian kitab-kitab kuning, kondisi ini lebih diperburuk lagi karena tidak ada ikatan secara formal bagi setiap santri dalam mengikuti kajian kitab kuning, misalnya tidak ada absensi, bahkan silabus materi kajian kitab-kitab kuning tidak terprogram dengan baik.

²⁰ Wawancara dilakukan pada tanggal 9 April 2011.

²¹ Sumber: Dokumentasi (kurikulum) Pondok Pesantren Hj. Haniah tahun 2011.

²² Wawancara dilakukan pada tanggal 9 April 2011.

Kajian kitab-kitab kuning di Pondok Pesantren Hj. Haniah, selain wajib diterapkan pada pendidikan non formal (Madrasah Diniyah), juga pada pendidikan formal (MTs dan MA) baik yang diselenggarakan dalam kelas maupun di masjid. Selain itu, kehadiran santri dalam kajian kitab-kitab kuning dan tingkat penguasaannya menjadi bahan pertimbangan yang sangat menentukan dalam kenaikan kelas dan kelulusan seorang santri. Karena itu, alokasi waktu kegiatan kajian kitab-kitab kuning di pondok pesantren ini seimbang dengan alokasi waktu dalam proses pembelajaran umum, seperti; IPA, IPS dan pelajaran umum lainnya. Ini dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan waktu yang tersedia, sehingga proses pembelajaran di pondok pesantren ini betul-betul diatur secara ketat (sangat disiplin dalam memanfaatkan waktu). Dalam hal ini, menurut beberapa santri di antaranya Lukman, Yassir dan Mawardi pada awalnya peraturan yang diterapkan dalam pondok pesantren ini memang dirasakan "sangat berat" karena sebelumnya (semasih tinggal bersama orangtua di kampung) mereka tidak pernah mengalami peraturan yang seketat di pondok pesantren ini. Tapi, setelah mereka tinggal beberapa bulan di pondok pesantren dengan penuh kesabaran dan ketabahan sambil mohon kekuatan kepada Allah SWT, akhirnya mereka merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan tinggal di asrama pondok pesantren.²³

Selanjutnya, Pimpinan Pondok Pesantren Hj. Haniah bersama pengurus lainnya menuturkan, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, menunjukkan bahwa pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam, jelas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan Nasional. Hal ini berarti, bahwa pondok

²³ Wawancara dilakukan pada tanggal 11 April 2011.

pesantren sebagai benteng kekuatan moral bangsa memiliki peluang yang istimewa untuk lebih mengorientasikan mutu pendidikannya dalam rangka ikutserta mendedikasikan kehidupan bangsa.

Oleh karena itu, dari sejak berdiri pondok pesantren ini sampai sekarang menggunakan kurikulum yang telah disusun oleh pemerintah (Kementerian Agama), khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan formal (MTs dan MA) di lingkungan pondok pesantren ini. Sedangkan, kurikulum yang disusun oleh pondok pesantren ini, umumnya mengandung dan mengangkat budaya lokal, sehingga posisinya mampu memperkuat dan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat pada era globalisasi dan modernisasi.

Dengan demikian, pada dasarnya kurikulum yang digunakan di Pondok Pesantren Hj. Haniah adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yaitu kurikulum yang disusun Kementerian Agama diperkuat dengan kurikulum lokal yang disesuaikan dengan kondisi kultur dan sosial setempat dan lebih ditekankan kepada segi fungsional, sehingga dapat dicapai tingkat relevansi yang tinggi antara pembinaan pendidikan dengan kebutuhan pengguna dalam masyarakat. Karena itu, semua jenjang pendidikan (formal dan nonformal) diberikan materi pelajaran tambahan (ekstrakurikuler). Dalam hal ini, kegiatan ekstrakurikuler, antara lain: kajian kitab-kitab kuning, tilawatil Qur'an, tahfidz Qur'an, nasyid, qasidah, latihan dakwah, shalawat, yasinan, barazanji, teater, kepramukaan, PMR, seni bela diri (pencak silat) dan berbagai keterampilan (*life skills*).²⁴

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hj. Haniah dipimpin oleh ustadz/ah dan wajib diikuti oleh seluruh santri. Kegiatan ekstrakurikuler di pondok pesantren ini, selain untuk

²⁴ Wawancara dengan pimpinan pondok pesantren dan beberapa pengurus yang diperkuat dengan dokumen dan observasi yang dilaksanakan pada tgl. 9 April 2011.

memperkuat kegiatan intrakurikuler, juga lebih diarahkan untuk pembentukan karakter (*character building*) para santri, di mana karakter merupakan pondasi yang harus ditanamkan sedini mungkin pada santri, sehingga karakter tersebut dapat berakar dan tumbuh dengan kokoh pada diri anak yang pada akhirnya anak tersebut memiliki benteng yang kuat untuk membendung dan memfilter berbagai dampak negatif globalisasi dan modernisasi yang telah merambah ke berbagai aspek kehidupan.

Oleh karena itu, dalam pondok pesantren ini kehidupan santri diatur menurut peraturan (jadwal kegiatan). Sejak santri mulai bangun tidur, para santri dididik untuk mengikuti peraturan jam bangun, agar terbiasa melaksanakan shalat lael atau shalat tahajjud dan shalat shubuh berjama'ah, sampai waktu tidur yang ditentukan pada jam 23.30. Dalam hal ini, pendapat Lukman dan rekan-rekannya di atas, dapat diperkuat dengan pendapat santri-santri lainnya, misalnya Rugayyah dan Nuriah mengemukakan, bahwa bagi para santri baru peraturan seperti ini dirasakan berat dan sulit untuk dilaksanakan, sebab mereka mempunyai kecenderungan untuk bangun siang dan tidur terlambat. Tapi, setelah mereka melalui latihan selama sebulan atau dua bulan, akhirnya mereka terbiasa menyesuaikan dengan mudah dan dapat merasakan manfaatnya.²⁵

Oleh karena itu, pimpinan dan pengurus Pondok Pesantren Hj. Haniah telah memiliki kemampuan untuk meletakkan fungsi pondok pesantren pada kesiapan pondok pesantren itu sendiri dalam menyiapkan diri untuk ikut serta dalam pembangunan di bidang pendidikan yang seirama dengan tuntutan perubahan sistem pendidikan yang berorientasi kepada arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global dan tetap menjaga dan memelihara tradisi sistem pendidikan pondok pesantren. Hal ini, dapat dilihat bahwa

²⁵ Hasil wawancara dengan beberapa santri pada tanggal 9 April 2011.

sistem pendidikan pondok pesantren ini tidak pernah berhenti dalam mengadaptasi dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pendidikan dengan tetap berpegang teguh kepada kaidah “*Al muhafadzatul ‘ala al qadimi al shalih wa al akhdu bi al jadid al ashlah*”. Karena itu, pondok pesantren meskipun pada awalnya dibangun sebagai pusat produk spritual, tetapi pada prinsipnya tidak berfikir secara absolut dan stagnan yang tidak menerima perkembangan dan tuntutan zaman. Akan tetapi, pondok pesantren terbuka dalam menerima perubahan zaman dengan memberikan nafas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁶

Dengan demikian, Pondok Pesantren Hj. Haniah dalam merespon sistem pendidikan nasional, tetap memainkan fungsi-fungsi tradisional pondok pesantren, khususnya dalam memainkan tradisi keilmuan pondok pesantren (*tafaqquh fiddin*) melalui kajian kitab-kitab kuning dan tradisi-tradisi pondok pesantren lainnya, seperti; tahlilan, shalawatan, yasinan, barzanji dan sebagainya. Dalam hal ini, untuk merespon sistem pendidikan nasional Pondok Pesantren Hj. Haniah menyelenggarakan pendidikan formal (MTs dan MA) di lingkungan (kompleks) pondok pesantren. Dengan cara ini, menurut Azra pondok pesantren tetap berfungsi sebagai pondok pesantren dalam pengertian aslinya (*tafaqquh fi al-din*), yakni tempat pendidikan dan pengajaran bagi para santri (umumnya mukim) yang ingin memperoleh wawasan tentang ajaran Islam secara mendalam dan sekaligus merupakan madrasah yang diselenggarakan di lingkungan pondok pesantren.²⁷

Sejalan dengan pendapat ini, pengurus Pondok Pesantren Hj. Haniah merespon sistem pendidikan nasional dengan menggunakan strategi “menolak dan mencontoh”. Dalam hal ini, “menolak” dalam arti bahwa tidak hanya sebagian besar santri yang

mukim. Tapi, semua santri wajib mukim di pondok pesantren. Sedangkan “mencontoh” dalam arti bahwa pondok pesantren ini tetap konsisten sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang memelihara, mempertahankan dan mengembangkan fungsi-fungsi tradisional pondok pesantren dengan mengkaji sejumlah kitab kuning dan berbagai tradisi pondok pesantren lainnya.

Pondok Pesantren Hj. Haniah yang sejak berdiri menyelenggarakan pendidikan formal (MTs dan MA), berarti pondok pesantren sebagai bentuk sistem tradisional mulai berubah dari yang konvensional mulai beranjak kepada bentuk sistem persekolahan. Dalam hal ini, menurut Mansur bahwa adanya sistem persekolahan di lingkungan pondok pesantren tidak dengan serta merta melanggar sistem kelas bandongan yang selama ini dikenal kitab-kitab klasik (kitab kuning) yang tetap harus diajarkan oleh pengasuh (kyai) pondok pesantren. Pengajian sistem bandongan ini, biasanya disampaikan setelah shalat rawatib. Tapi, jumlah santri di pondok pesantren semakin bertambah banyak, maka pengajian kitab-kitab kuning pun bersifat massal dan sama sekali tidak meninggalkan metode sorogan, di mana santri mengajukan bab-bab tertentu dari kitab-kitab kuning tersebut untuk dibaca di hadapan kyai.²⁸ Ini berarti, bahwa sistem pendidikan di pondok pesantren, meski dalam prosesnya bersifat tradisional, tapi tidak pernah berhenti dalam melakukan inovasi pendidikan yang lebih baik dengan tujuan untuk melahirkan santri (output) yang dapat mempresentasikan pendidikan dengan mutu tinggi.

Dengan demikian, Pondok Pesantren Hj. Haniah sejak awal berdiri cukup adaptif dan antipatif terhadap berbagai perubahan dengan persetujuan bersama (mufakat) untuk menemukan pola yang dipandang cukup strategis dan efektif dalam meng-

²⁶ Umiarso & Nur Zazin. 2011. *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan*, Semarang: Rasail Media Group, h. 56.

²⁷ Azyumardi Azra. 1997. *Op. Cit.*, h. xxi

²⁸ Mansur. 2004. *Moralitas Pesantren: Meneguh Kearifan dari Telaga Kehidupan*. Yogyakarta: Safiria Insani Press, h. 9.

hadapi gelombang globalisasi dan modernisasi yang semakin deras dan berdampak luas. Tapi, adaptasi dan antisipasi tersebut dilakukan pondok pesantren tanpa mengorbankan esensi dan faktor-faktor yang mendasar dalam eksistensi pondok pesantren ini. Karena itu, pondok pesantren ini selalu berupaya merekonstruksi sistem pendidikannya agar tetap relevan dan survive. Tapi, sesungguhnya dalam merekonstruksi sistem pendidikan tersebut selalu berpegang tegguh kepada kaedah "*al muhafadzatu 'ala al qadimi al shalih wa al akhdzu bi al jadid al aslah*", Artinya, ketika pondok pesantren ini melakukan rekonstruksi sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka aspek *al ashlah* menjadi prinsip yang harus dipegang teguh.

Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Pendidik (Ustadz)

Peningkatan kualitas komponen-komponen sistem pendidikan telah terbukti lebih berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan adalah komponen yang bersifat *human resources*. Hal ini dapat dipahami dari kenyataan, bahwa komponen yang bersifat *material resources* tidak dapat bermanfaat secara maksimal tanpa adanya dukungan komponen yang bersifat *human resources*.

Komponen sistem pendidikan yang bersifat *human resources* dapat digolongkan sebagai pendidik (guru/ustadz). Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab I Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Selain itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen, Bab I Pasal 1 ayat (1) guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Bab IV Pasal 8 disebutkan, bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, Pasal 9 disebutkan, bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) disebutkan, bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Berdasarkan data Pondok Pesantren Hj. Haniah,²⁹ dapat diketahui bahwa jumlah pendidik (ustadz/ustadzah) 32 orang. Dari segi jenis kelamin, terdapat sebagian besar (81,48 %) adalah laki-laki. Ini berarti, bahwa tingkat kehadiran mereka dalam menjalankan tugas di pondok pesantren cenderung lebih tinggi. Sebab, selain sebagian besar ustadz mukim di pondok pesantren, juga umumnya laki-laki tidak terlalu direpotkan dengan berbagai urusan keluarga, dibanding dengan perempuan. Karena itu, hal ini sangat mendukung proses pembelajaran di pondok pesantren ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sementara itu, dari pendidikan terakhir (tingkat pendidikan), juga terdapat sebagian besar (74,07 %) telah berpendidikan sarjana (strata 1), bahkan terdapat sekitar 30 % ustadz/ah yang sedang melanjutkan studinya ke Program Pascasarjana dan pada saat

²⁹Sumber: Dokumen Pondok Pesantren Hj. Haniah, 2011

ini baru 2 ustadz yang sudah lulus (selesai) pendidikan strata 2. Ini menunjukkan, bahwa sebagian besar pendidik (ustadz/ah) di pondok pesantren ini telah memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Apabila pendidik (ustadz/ah) dilihat dari pengalaman mengajar (menjalankan tugas sebagai guru), juga terdapat sebagian besar, (85,19 %) telah memiliki pengalaman mengajar sekitar 5 tahun (sejak beridiri pondok pesantren ini). Hal ini sangat penting, mengingat bahwa guru yang berpengalaman dalam mengajar, jauh lebih professional dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar, jika dibanding dengan guru yang belum berpengalaman dalam mengajar. Artinya, ustadz/ah yang telah memiliki pengalaman mengajar (pengalaman minimal 5 tahun), cenderung jauh lebih mampu dan menguasai (professional) dalam mengajarkan (mengampuh) suatu mata pelajaran, meskipun ustadz/ah tersebut berasal dari disiplin ilmu yang berbeda dengan mata pelajaran yang diajarkan.

Di samping itu, di pondok pesantren ini memiliki asatidz yang khusus untuk menangani pembelajaran (kajian) kitab-kitab kuning. Asatidz tersebut adalah Ust. Sanusi Mahmud, M.Ag, Ust. Hamzah Ahmad, S. Ag, ust. H. Abd. Salam, S.Pd.I, ust. Muh. Farid Fadli, S.Pd.I, ust. Jumain, MA dan ust. H. Idris A. Rahman, Lc. Hal ini menunjukkan bahwa kajian kitab-kitab kuning di pondok pesantren ini tidak diajarkan oleh sembarang ustadz, tapi tentunya para ustadz telah telah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang tidak diragukan lagi dalam penguasaan pembelajaran kitab-kitab kuning. Karena para ustadz ini, selain cukup lama menimba ilmu di pondok pesantren, juga telah menempuh pendidikan formal di perguruan tinggi, sehingga berbagai metode, strategi dan teknik pembelajaran mereka dapat menguasainya dengan baik.

Kajian kitab-kitab kuning di pondok pesantren ini, baik yang diselenggarakan di masjid maupun yang di ruang/kelas menggunakan metode pembelajaran bandongan dan sorogan. Dalam hal ini, pembelajaran kitab-kitab kuning yang diselenggarakan di masjid dilaksanakan setiap hari ba'da shalat Maghrib berjamaah dan kajian kitab-kitab kuning yang diselenggarakan di ruang kelas dilaksanakan ba'da Ashar sampai menjelang Maghrib.

Dengan demikian, kajian kitab-kitab klasik (kitab kuning) di pondok pesantren ini tentu tidak terlepas dari suatu tuntutan di dalam memahami dengan baik ajaran-ajaran Islam yang sangat luas dan mendalam. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendidik (ustadz/ah) di Pondok Pesantren Hj. Haniah umumnya telah memiliki kualifikasi dan kompetensi, sehingga dalam proses pembelajaran memiliki kemampuan yang handal untuk mewujudkan mutu pendidikan di pondok pesantren ini.

Santri

Perkembangan jumlah santri di pondok pesantren ini dapat diketahui pada tabel berikut ini.

Tabel 1: Jumlah Santri

Jalur Pendidikan	Jenjang	2008/2009			2009/2010			2010/2011		
		L	P	Jl	L	P	Jl	L	P	Jl
Non Formal Pend. Diniyah	Ula'	50	30	80	56	35	91	63	47	110
Formal	MTs	129	97	226	142	103	245	153	133	286
	MA	60	52	112	65	47	112	68	49	117
Jumlah Santri Formal		189	149	338	207	150	357	221	182	403
Jumlah Santri Non Formal dan Formal		239	179	418	263	185	448	284	229	513

Sumber: Dokumen Pondok Pesantren Hj. Haniah, 2009, 2010 dan 2011.

Data di atas, menunjukkan bahwa pondok pesantren ini setiap tahun mengalami peningkatan jumlah santri, yaitu tahun 2009 sebanyak 418 santri dapat mengalami peningkatan pada tahun 2010 sehingga mencapai 448 santri, mengalami kenaikan 7,18 %, sedangkan pada tahun 2011 meng-

alami kenaikan lebih tinggi lagi, yaitu 513 santri (14,51 %) dan pada tahun 2011 ini jumlah santri (laki-laki dan perempuan) dapat mencapai 794 orang. Hal ini berarti bahwa pondok pesantren ini mampu memenuhi harapan masyarakat, ini salah satu indikasi bahwa pondok pesantren ini dapat memberikan pelayanan, khususnya pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam mutu pendidikan santrinya. Sebab, kalau tidak mustahil setiap tahun jumlah santrinya mengalami peningkatan, bahkan santri-santrinya tidak hanya berasal dari daerah ini, tapi juga berasal dari hampir seluruh daerah di Sulawesi Selatan.

Di samping itu, data di atas menunjukkan bahwa santri yang mengikuti jalur pendidikan formal jauh lebih banyak, jika dibanding dengan jumlah santri yang mengikuti jalur pendidikan non formal (pendidikan diniyah). Artinya, masyarakat (orangtua santri) memiliki animo jauh lebih tinggi untuk memasukkan anaknya ke jalur pendidikan formal yang diselenggarakan di pondok pesantren ini. Hal ini menunjukkan, bahwa orangtua santri jauh lebih banyak yang menginginkan anaknya, selain belajar untuk lebih memperdalam pengetahuan agama, juga belajar pengetahuan umum, sebagaimana yang diajarkan pada jalur pendidikan formal. Sementara itu, hanya sebagian kecil masyarakat (orangtua) santri yang menginginkan anaknya hanya belajar dan memperdalam pengetahuan agama sebagaimana yang diajarkan pada jalur pendidikan non formal, yaitu hanya memperdalam pembelajaran Bahasa Arab dan pengetahuan agama Islam melalui kajian berbagai kitab kuning.

Meskipun demikian, baik jalur pendidikan non formal (Diniyah Ula), maupun jalur pendidikan formal (MTs dan MA) jumlah santri laki-laki jauh lebih banyak dari santri perempuan. Hal ini berarti, bahwa animo masyarakat masih cukup tinggi untuk memasukkan anaknya, terutama anak laki-laki untuk menuntut ilmu di pon-

dok pesantren ini. Karena itu, adanya jumlah santri laki-laki jauh lebih banyak dari perempuan dapat membantah terhadap orang yang berpendapat bahwa pondok pesantren sebagian besar santrinya adalah kaum hawa.

Pendanaan Pendidikan

Selama ini, selain kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang sering menjadi permasalahan yang sulit dipecahkan oleh setiap pimpinan lembaga pendidikan, khususnya pendidikan di pondok pesantren, juga masalah pendanaan operasional pendidikan. Bahkan, masalah pendanaan operasional pendidikan sering menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan. Hal ini, tentu wajar saja sebab pendanaan operasional pendidikan termasuk salah satu komponen pendidikan yang turut menentukan tinggi dan rendahnya mutu pendidikan.

Namun demikian, Pondok Pesantren Hj. Haniah, sebagai lembaga pendidikan Islam faktor pendanaan operasional pendidikan tidak menjadi suatu permasalahan yang signifikan. Dalam hal ini, Ketua Bidang Administrasi dan Perlengkapan mengungkapkan,³⁰ bahwa sejak berdiri pondok pesantren ini, semua kegiatan yang berkaitan dengan dana operasional pendidikan, seperti; bayar rekening listrik, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan dan sebagainya seluruhnya ditanggung oleh pendiri pondok pesantren ini (Keluarga besar H. Bukhari HG). Pada saat ini, dana operasional pendidikan setiap bulan dapat mencapai sekitar Rp. 80 juta (delapan puluh juta rupiah). Pada hal, uang iuran setiap santri hanya Rp. 200 ribu (dua ratus ribu rupiah) perbulan, ini termasuk biaya makan tiga kali sehari (pagi, siang dan malam) dan biaya-biaya lainnya.

³⁰ Wawancara dengan Ketua Bidang Administrasi dan Perlengkapan Pondok Pesantren Hj. Haniah pada tgl. 9 April 2011.

Sementara itu, pada saat ini jumlah santri mencapai 794 orang, di antaranya terdapat sekitar 80 % santri yang dibebaskan dari segala uang iuran (gratis), santri-santri ini berasal dari keluarga yang tergolong ekonomi lemah. Tapi, orang tuanya sangat menginginkan agar anak-anaknya dapat diterima untuk menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Karena itu, santri yang membayar uang iuran hanya sekitar 20 %, inipun terdapat sejumlah santri yang tidak lancar (setiap bulan) membayarnya, juga terdapat beberapa santri yang membayar iuran kurang dari Rp 200 ribu (dua ratus ribu rupiah), walaupun sudah ditentukan untuk membayar iuran sebanyak Rp 200 ribu/bulan, inilah kenyataan yang harus diterima dengan penuh kesabaran. Sebab, memang pada dasarnya pondok pesantren ini didirikan untuk menolong keberlangsungan pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu dalam bidang ekonomi. Tapi, anak-anak tersebut memiliki minat dan motivasi yang kuat untuk belajar, yang penting santri-santri tersebut rajin belajar tidak akan ditegur oleh pimpinan. Karena itu, pimpinan pondok pesantren ini tidak pernah menagih atau meminta uang iuran kepada santri yang tidak membayar sesuai ketentuan.

Pimpinan, para pengurus, asatidz/ah dan karyawan telah menyadari bahwa pondok pesantren ini bukan tempat untuk mencari dan memperoleh "uang". Tapi, pondok pesantren ini merupakan salah satu tempat untuk memperbanyak "pengabdian" melalui pengamalan berbagai kemampuan dan keterampilan (ilmu pengetahuan) yang telah dimiliki. Faktor ini yang selalu ditanamkan oleh Dewan Penasehat dan Pembina pondok pesantren ini kepada para ustadz dan karyawan. Dalam hal ini, tidaklah berarti bahwa para pengurus, asatidz/ah dan karyawan di pondok pesantren ini dalam menjalankan tugas dengan "semaunya" saja. Tapi, ternyata dengan pendekatan yang demikian ini, para pengurus, asatidz/ah dan karyawan dalam

menjalankan tugasnya penuh dengan disiplin dan tanggung jawab. Juga, tidaklah berarti bahwa para pengurus, asatidz/ah dan karyawan tidak membutuhkan "uang" untuk biaya hidup dan penghidupan keluarganya. Tapi, sesungguhnya mereka sangat membutuhkan biaya hidup yang layak dan ternyata segala kebutuhan hidup (biaya hidup) para ustadz/ah dan karyawan telah dipenuhi oleh pendiri pondok pesantren ini. Artinya, pondok pesantren ini telah memiliki sumber pendanaan yang kuat, sehingga pondok pesantren ini sangat mandiri dalam aspek pendanaan operasional pendidikan dan hal ini merupakan salah satu faktor utama yang dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Oleh karena itu, pendiri Pondok Pesantren Hj. Haniah (Keluarga besar H. Bukhari HG) sebagai penyandang dana utama, sangat memperhatikan tingkat kesejahteraan para pengurus, asatidz/ah dan karyawan. Tapi, faktor yang menjadi ukuran tingkat kesejahteraan, tidak semata-mata hanya diukur dan ditentukan oleh banyaknya "harta/uang/materi" yang dimiliki oleh mereka. Tampaknya, di sinilah letak keunggulan pondok pesantren ini, sehingga setiap tahun pelajaran selalu dibanjiri orangtua yang membawa anak-anaknya untuk dimasukkan menuntut ilmu di pondok pesantren ini.

Ketertarikan orangtua untuk memasukkan anaknya menuntut ilmu di pondok pesantren ini, tampaknya bukan semata-mata disebabkan oleh faktor persyaratan penerimaan santri baru tergolong "mudah dan gratis", (biaya pendaftaran semua jenjang pendidikan tidak dipungut biaya). Tapi, beberapa orangtua santri yang sempat diwawancarai oleh peneliti menyatakan, mereka sering mendengar cerita dari orangtua santri yang lebih duluan memasukkan anaknya ke pondok pesantren ini, dari cerita tersebut beberapa faktor yang menarik mereka untuk memasukkan anaknya ke pondok pesantren ini, antara lain; sarana prasarana dan fasilitas pendidikan lengkap

dan memadai, misalnya; anak-anak belajar menulis dengan komputer, lingkungan pondok pesantren bersih, anak-anak tinggal di asrama pondok pesantren, sehingga anak-anak tidak bebas berkeliaran, misalnya; ke toko-toko besar, anak-anak dibiasakan hidup secara sederhana, disiplin, jujur, dibiasakan shalat berjama'ah, shalat tahajjud, dibiasakan hidup mandiri, kalau anak sakit dibawa ke dokter oleh gurunya dan biayanya ditanggung oleh pondok pesantren. Selain itu, ijazah lulusan madrasah di pondok pesantren ini sama dengan ijazah madrasah di luar pondok pesantren, bahkan ijazah di pondok pesantren ini sama dengan ijazah lulusan di sekolah-sekolah umum, seperti di SMP dan SMA.

Di samping itu, guru-gurunya dalam membina dan mendidik sangat memperhatikan santri-santri, sehingga santri merasakan adanya terjalin hubungan kekeluargaan yang harmonis antara santri dengan guru-gurunya. Guru-guru di pondok pesantren ini tidak pernah membedakan antara santri perempuan dengan yang laki-laki, antara santri yang membayar iuran dengan santri yang bebas uang iuran, antara santri yang berasal dari daerah ini dengan santri yang berasal dari luar daerah ini, antara santri yang orangtuanya sering mengunjungi anaknya dengan santri yang jarang dikunjungi oleh orangtuanya dan sebagainya semua santri diperlakukan sama.³¹

Hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha³² dapat diketahui, bahwa tingkat pendidikan umumnya orangtua santri hanya mencapai pendidikan dasar, bahkan di antaranya tidak tamat pendidikan dasar. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu bersaing untuk memperoleh pekerjaan yang layak di kota dengan penghasilan yang memadai, seperti; Kota Makassar dan kota-kota lainnya. Kalau pun ada yang me-

³¹ Wawancara dengan beberapa orangtua santri, antara lain: Laratte, Subhana, dan Odding, pada tanggal 10 April 2011.

³² Wawancara dilakukan pada tanggal 8 April 2011.

rantau, misalnya ke Malaysia, maka di sana pasti mereka bekerja dengan penghasilan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kondisi orangtua santri yang demikian ini, akhirnya mereka menyadari dan memilih berdomisili di pedesaan, sebab di desa masih terbuka beberapa jenis pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, misalnya; bekerja di sawah, di kebun dan sebagainya jenis pekerjaan yang tidak terlalu banyak menuntut persyaratan yang formal dengan kemampuan dan keterampilan (keahlian) yang profesional.

Oleh karena itu, umumnya orangtua santri bekerja sebagai petani, bahkan petani tradisional dan di antaranya bekerja sebagai buruh tani (mengerjakan sawah, kebun atau tambak orang lain), sedangkan mereka hanya memperoleh beberapa bagian dari penghasilannya, tentu sesuai hasil kesepakatan bersama antara pemilik lahan (sawah, kebun atau tambak) dengan orangtua santri sebagai pekerja (buruh tani). Karena itu, penghasilannya hampir dapat dipastikan hanya cukup untuk di makan bersama keluarga, bahkan mungkin kurang. Karena itu, di pondok pesantren ini terdapat sekitar 80% santri yang dibebaskan dari segala uang iuran, sebab mereka berasal dari keluarga yang secara ekonomi tergolong kurang mampu.

Meskipun demikian, sejak berdiri pondok pesantren ini tidak pernah meminta, menerima dan memanfaatkan bantuan atau biaya operasional pendidikan dari pemerintah, baik dari dana Bantuan Operasional Madrasah (BOM) dan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) pada hal di pondok pesantren ini terdapat sekitar 80% santri berasal dari keluarga miskin, maupun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pada awalnya dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional, meskipun pemerintah menawarkannya. Karena memang sendiri pondok pesantren ini tidak bersedia

meminta, menerima dan memanfaatkan dana-dana tersebut, dengan alasan bahwa selama ini penerimaan dan pemanfaatan dana baik BOM, BSM maupun BOS sering menjadi masalah dan dipermasalahkan, sehingga dana-dana tersebut yang pada dasarnya dimaksudkan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah biaya operasional pendidikan di sekolah atau di madrasah. Tapi, ternyata dalam perakteknya dana dari BOM, BSM dan BOS tersebut sering “melahirkan masalah baru” di sekolah atau di madrasah. Jika hal tersebut terjadi di pondok pesantren ini, maka jelas akan mengganggu proses pendidikan yang selama ini telah berjalan dengan baik (tanpa mengalami masalah yang sulit dipecahkan), khususnya dalam masalah pendanaan operasional pendidikan. Selain itu, jika pondok pesantren ini menggunakan dana operasional pendidikan dari pemerintah, maka berarti kemandirian pondok pesantren ini akan terkikis dan pada akhirnya hilang dan akibatnya akan menjadi peminta-minta dan pengemis, jika ini terjadi jelas peningkatan mutu pendidikan akan terabaikan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hakikat kurikulum di pondok pesantren ini adalah berbagai aspek yang berkaitan dengan sikap dan perilaku kyai (ustadz/ah). Selain itu, secara tertulis pondok pesantren ini menerapkan kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum yang disusun sendiri oleh pondok pesantren ini. Kurikulum yang disusun oleh pondok pesantren, selain lebih fokus kepada kajian kitab-kitab kuning dan tradisi-tradisi kepesantrenan dengan tujuan untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan cirikhas dan karakteristik pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan *tafaqquh fi al-din*, juga lebih fokus kepada pengembangan budaya lokal dan keterampilan hidup (*life skills*) dengan

tujuan untuk memenuhi harapan dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

2. Pondok pesantren ini menjadikan kajian Kitab Kuning sebagai kurikulum yang ditempatkan pada posisi “istimewa”, yaitu menjadikan materi kajian kitab-kitab kuning sebagai “landasan yang kokoh” dalam pembahasan materi pelajaran umum. Ini berarti, bahwa pimpinan dan pengurus pondok pesantren ini dapat menjadikan Kitab Kuning sebagai unsur utama dan sekaligus sebagai cirikhas dan karakteristik pondok pesantren dan semua santri (pendidikan non formal dan formal) wajib mengikuti dan menguasainya. Karena itu, pondok pesantren ini mampu menjaga dan mempertahankan, bahkan mengembangkan identitas dirinya sebagai penjaga dan pemelihara tradisi keilmuan klasik dengan tujuan untuk lebih memperkuat fondasi intelektual dan basis kajian dalam rangka *tafaqquh fi al-din*. Namun, tidak berarti bahwa pondok pesantren ini “anti modernitas”. Artinya, pondok pesantren ini tidak larut dalam arus deras globalisasi dan modernisasi, tapi mampu melihat, memilih dan menentukan sikap dan tindakan yang lebih banyak bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan di pondok pesantren.
3. Animo masyarakat memasukkan anaknya ke pondok pesantren ini sangat tinggi. Indikasinya, setiap tahun jumlah santrinya mengalami peningkatan yang signifikan dan seluruh santri tinggal (mukim) di asrama. Hal ini membuktikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren ini relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
4. Sebagian besar santri berasal dari keluarga petani tradisional pedesaan dan secara ekonomi tergolong kurang mampu, tapi mereka dibebaskan dari segala uang iuran. Artinya, sebagian

besar santri pondok pesantren ini dibebaskan dari segala bentuk uang iuran. Tampaknya, lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya yang dikelola masyarakat (sekolah swasta) tidak ada yang berani dan kuat untuk membebaskan sebagian besar siswanya dari segala uang iuran. Tapi, hanyalah pondok pesantren, khusus Pondok Pesantren Hj. Haniah ini sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam yang dikelola masyarakat (swasta) berani dan kuat untuk membebaskan sebagian besar santrinya dari segala uang iuran.

5. Sejak berdiri pondok pesantren ini memiliki sumber dana yang kuat, faktor ini sangat mendukung kemandirian pondok pesantren ini. Indikasinya pondok pesantren ini tidak pernah meminta, menerima dan memanfaatkan dana dari pemerintah, khususnya Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian terkait lainnya. Karena itu, seluruh pengadaan sarana-prasarana pendidikan dan dana operasional pendidikan sepenuhnya ditanggung oleh pendirinya, yaitu seorang pengusaha yang sukses dan darmawan. Namun, tidaklah berarti bahwa pondok pesantren ini "anti pemerintah", tapi justru terjalin kerjasama yang harmonis dengan pemerintah.

Rekomendasi

1. Sebaiknya Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan terhadap pendidikan pondok pesantren menjadikan salah satu rujukan Pondok Pesantren Hj. Haniah yang telah berhasil menyelenggarakan pondok pesantren berbasis *tafaqquh fi al-din*, bermutu dan berkemandirian melalui integrasi kajian kitab kuning dengan pelajaran umum dalam pendidikan formal (madrasah) yang didukung oleh sumber dana yang kuat.

2. Sebaiknya pimpinan Pondok Pesantren Hj. Haniah membentuk dewan yang terdiri dari beberapa orang ahli (pakar) dalam bidang pendidikan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab oleh kyai (pimpinan pondok pesantren) untuk berperan secara aktif dalam memfokuskan dan memberi arahan pada wilayah pondok pesantren. Dalam hal ini, hanya antara kyai dan merekalah yang memiliki visi ke depan dan berkemampuan untuk mengajak para ustadz/ah dan karyawan pondok pesantren agar dapat menerima visi itu sebagai miliknya, ini dimaksudkan sebagai bagian yang mengacu pada tanggung jawab bersama.
3. Sebaiknya para ustadz/ah dalam proses pembelajaran memiliki kemampuan untuk lebih mengembangkan pola santri *orientated*, sehingga dapat membentuk karakter kemandirian, kreatif, adaptif, antisipatif dan inovatif pada setiap santri. Untuk itu, para ustadz/ah harus memahami makna pendidikan dalam arti yang sesungguhnya, tidak hanya terbatas pada pengajaran belaka. Artinya, proses pembelajaran lebih diorientasikan kepada mutu pendidikan, sehingga mampu membentuk kepribadian dan mendewasakan santri, ini tidak hanya sekedar *transfer of knowledge*, tapi proses pembelajaran yang mampu untuk *mentransfer of value and skill* dan *character building*.

SUMBER BACAAN

- Darmadi, Hamid (2011): *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung, Alfabeta.
- Dhofier, Zamakhsyari (1985): *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta, LP3ES.
- Daulay, Haidar Putra (2001): *Historistas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya.

- Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln (2000): *Handbook Of Qualitative Research*. California, Sage Publication.
- Fajar, Malik (1997): "Sintesa antara Perguruan Tinggi dan Pesantren" dalam Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta, Paramadina.
- Hamzah, Amir Wirosukarto (1996): *K. H. Imam Zarkasyi dari Gontor*. Ponorogo: Gontor Press.
- Hasbullah (1999): *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kutha Ratna. Nyoman (2010): *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Kontowijoyo (1993): *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*. Jakarta, Mizan.
- Manfred Ziemek (1986): *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Jakarta, P3M.
- Madjid, Nurcholis (1997): *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta, Paramadina.
- Miles, B Matthew & A. Michael Huberman (1984): *Qualitative Data Analysis*. New York, Sage Publications, Inc.
- Mulyana, Deddy (2002): *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng (2000): *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Pondok Pesantren Hj. Haniah (2011): *Profil dan Dokumentasi Pontren*. Maros, Sulsel.
- Rahardjo, M. Dawam (1984): *Dunia Pesantren dalam Peta Perubahan*. Jakarta, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S).
- Subhan, Arief (2012): *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20 Pergumulan Antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta, Kencana.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin (1988): *Basics of Qualitative Research*. Chicago, University of Cichago Press.
- Umiarso & Nur Zazin (2011): *Pesantren di Tengah Arus Mutu Pendidikan*. Semarang, Rasail Media Group.
- Tilaar, H. A. R. (2012): *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Yacub, M. (1985): *Pesantren dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Angkasa
- Wahid, Abdurrahman (1984): *Pesantren sebagai Subkultur*. Jakarta, LP3S.

KETENTUAN DAN PEDOMAN PENULISAN

KETENTUAN UMUM

Redaksi Jurnal EDUKASI menerima naskah tulisan dari para ahli dan peminat pendidikan. Naskah belum pernah dipublikasikan pada media atau jurnal lain. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai kaidah masing-masing bahasa, dilengkapi abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia (dwibahasa).

Redaksi berhak menyunting naskah tanpa mengurangi maksud-nya. Isi naskah sepenuhnya merupakan tanggungjawab penulis. Redaksi tidak berkewajiban mengembalikan naskah yang ditolak.

Pengiriman naskah harus disertai dengan SURAT RESMI dari penulis, khususnya menyangkut pertanggungjawaban penulis atas legalitas isi naskah. Naskah dikirimkan ke:

Redaksi JURNAL EDUKASI
Puslitbang Pendidikan Agama dan
Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Jalan MH Thmarin No. 6 Jakarta Pusat.
Telp & Fax. 021-3920379

Penulis mengirimkan satu eksemplar naskah asli beserta dokumennya (file) dalam *compact disk* (CD) atau *soft copy* via e-mail ke: puslitbangpenda@yahoo.co.id

Penulis harus menyertakan riwayat hidup, meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan, alamat lengkap tempat tinggal dan alamat lengkap tempat bertugas, disertai nomor telepon, fax, e-mail dan nomor rekening bank, untuk kepentingan korespondensi.

KETENTUAN KHUSUS

Seluruh bagian dari naskah tulisan, mulai judul hingga sumber bacaan diketik satu setengah spasi, minimum 17 halaman dan maksimum 20 halaman kertas ukuran A 4. Pengetikan dilakukan dengan menggunakan *font Times New Roman* 12 poin dan margin 4-3 (kiri-kanan) dan 3-3 (atas-bawah).

SISTEMATIKA

Penulisan naskah dilakukan dengan sistematika berikut:

JUDUL. Judul merupakan rumusan mengenai pokok isi bahasan yang singkat, padat dan jelas. Dalam judul sudah tercantum variabel-variabel utama penelitian.

NAMA PENULIS. Nama penulis ditulis lengkap dan tanpa gelar.

ABSTRAKSI DAN KATA KUNCI. Abstrak merupakan intisari pokok bahasan dari keseluruhan naskah. Ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Abstrak maksimum terdiri dari 250 kata. Kata Kunci ditulis di bawah abstrak, antara empat hingga enam kata.

PENDAHULUAN. Bagian pendahuluan merupakan bahasan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teori, hipotesis dan metodologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN Bagian yang merupakan inti dari hasil-hasil penelitian, meliputi deskripsi data dan analisis hasil penelitian. Penggunaan grafik dan tabel hendaknya dibatasi jika masih dapat disajikan dengan tulisan secara singkat. Pembahasan merupakan

interpretasi penulis terhadap bahasan hasil dan analisis penelitian. Pembahasan dilakukan secara mendalam dan fokus dengan menggunakan acuan teori.

PENUTUP. Merupakan bagian terakhir dari keseluruhan naskah yang meliputi kesimpulan dan saran/rekomendasi.

CATATAN KAKI

Keterangan atau penjelasan khusus yang dinyatakan dalam teks, diberikan dalam bentuk catatan kaki (*footnotes*), bukan *bodynotes* atau *endnotes*, dengan mengacu pada contoh berikut:

BUKU

Pengarang. Tahun. *Judul buku*. Tempat terbit: penerbit, h.

Qodry A. Azizy. 2003. *Pendidikan untuk Membangun Etika Sosial*. Jakarta: Aneka Ilmu, h.

BAB DALAM BUKU

Pengarang. Tahun. "Judul artikel/tulisan," dalam *Judul Buku Utama*. Editor. Tempat terbit: penerbit, halaman.

Marsana Windhu. 2000. "Dimensi Kekerasan Tinjauan Teoritis Atas Fenomena Kekerasan" dalam *Malawan Kekerasan Tanpa Kekerasan*. Ed. Franz Magnis Suseno. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 91-96.

JURNAL

Pengarang. Tahun. "Judul artikel/tulisan." *Nama Jurnal*. Jilid/tahun (nomor): halaman.

Ahmad Qowaid. 2003. "Profil Guru Pendidikan Agama di Sekolah Umum." *Edukasi Jurnal Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 4 (2): 25-30.

SKRIPSI/THESIS/DISERTASI

Pengarang. Tahun. *Judul*. Tesis pada lembaga perguruan tinggi. Tempat/kota: nama lembaga perguruan tinggi, halaman

Husen Hasan Basri. 2006. *Politik Luar Negeri Iran Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan dan Pertahanan (Studi Kasus Pengembangan Teknologi Nuklir Dalam Memenuhi Kebutuhan Energi*. Tesis Magister Sains, Universitas Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, h. 143.

INTERNET

Pengarang. tahun. Judul karangan. *Nama website*.

P. Collier and A. Hoeffler. 2002. Aid, Policy and Growth in Post-Conflict Societies. www.worldbank.org

SURAT KABAR

Penulis. Tahun. "Judul artikel." *Nama surat kabar*, tanggal. Halaman.

Eep Saefullah Fattah. 2004. "Pesona Figur Besar." *Koran Tempo*, 26 April. Hal. 5

MAKALAH SEMINAR

Pengarang. Tahun. *Judul makalah*. Makalah disampaikan pada seminar. Penyelenggara. Tempat, tanggal.

C. VanDijk. 2003. *Coping with Separatism: Is there a Solution?* Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional tentang Konflik di Asia Pasifik. LIPI. Jakarta, Nikko Hotel, 22-23 Oktober.

SUMBER BACAAN

Sumber Bacaan ditulis dengan menggunakan acuan pada contoh berikut:

BUKU

Pengarang (tahun): *Judul buku*. Tempat terbit, penerbit.

Azizy, A. Qodry (2003): *Pendidikan untuk Membangun Etika Sosial*. Jakarta, Aneka Ilmu.

INDEKS ISI

PESANTREN SALAF DAN PERUBAHAN SOSIAL

M. Murtagho

Globalization and modernization of information sponsored by the state have resulted in a variety of social changes. The impact on social changes must be faced by all social institutions, including traditional Islamic boarding school (or called pesantren salafiyah in Indonesia). One important issue in dealing with challenges of social changes is the identity issue. How is traditional Islamic boarding school identity in dealing with social changes? This study attempts to analyze the model of traditional Islamic boarding school identity creation in dealing with social changes. The study took the case of Al-Anwar Traditional Islamic boarding school, Sarang, Rembang in Central Java. The study found that the traditional Islamic boarding school has developed a specific identity creation in dealing with social changes.

Globalisasi informasi dan modernisasi yang disponsori oleh negara telah menghasilkan berbagai perubahan sosial. Dampak perubahan sosial ini harus dihadapi oleh semua institusi sosial, termasuk Pesantren salaf. Salah satu isu penting dalam menghadapi tantangan perubahan sosial adalah masalah identitas. Bagaimana identitas pesantren salaf menghadapi perubahan sosial tersebut? Studi ini mencoba mengkaji model kreasi identitas pesantren salaf menghadapi perubahan sosial. Studi mengambil kasus pada Pesantren Salaf Al Anwar Sarang Rembang Jawa Tengah. Studi ini menemukan bahwa pesantren salaf dalam menghadapi perubahan sosial telah mengembangkan kreasi identitas tertentu.

PENGAJARAN KITAB-KITAB FIQH DI Pesantren

Husen Hasan Basri

In addition to clerics and values, yellow books are essential elements of an Islamic boarding school. Yellow Books are Islamic boarding school instructional materials that have been used for a long time. One area of yellow book that has been long taught is jurisprudence (fiqh) field. Teaching of fiqh books starts from the low level books, such as Safinahan-Najah to the high level books, such as Al-Muhadzdzab. Teaching methods used were Bandongan and Sorogan methods. In line with diversified development of forms and types of education in Islamic boarding schools, such as formal education (madrassas and schools) and vocational education, it is expected that teaching of yellow books, including books of fiqh, was changing, either books taught, teaching methods used, number of meetings in teaching, and teaching level. Through a survey of 951 schools in 15 provinces of 72 books of fiqh chosen by the researchers, there were 5 books of 72 books of fiqh included in a group of the most widely taught books of fiqh, namely:

Selain Kyai dan tata nilai, kitab kuning merupakan unsur pokok dari sebuah pondok pesantren. Kitab kuning adalah bahan ajar pesantren yang sudah lama digunakan. Salah satu bidang kitab kuning yang sudah lama diajarkan adalah bidang fiqh. Pengajaran kitab-kitab fiqh dimulai dari kitab tingkat rendah seperti kitab Safinahan-Najah sampai kitab tinggi seperti kitab al-Muhadzdzab. Metode pengajarannya menggunakan metode bandongan dan sorogan. Seiring dengan munculnya diversifikasi pengembangan bentuk dan jenis-jenis Pendidikan di pesantren seperti Pendidikan formal (madrassah dan sekolah) dan Pendidikan keterampilan, diduga pengajaran kitab kuning, termasuk kitab-kitab fiqh, mengalami perubahan pengajaran kitab, baik kitab-kitab yang diajarkan, metode pengajaran yang digunakan, jumlah pertemuan dalam pengajaran, dan tingkat pengajaran. Melalui survei pada 951 pesantren di 15 propinsi terhadap 72 kitab fiqh hasil pilihan peneliti, terdapat 5 kitab dari 72 kitab fiqh yang termasuk kelompok kitab

<p>Taqrib, Safinah an-Najah, Fath al-Mu'in, Fath al-Qarib, and Sullam at-Taufiq. Besides Fath al-Mu'in, these books are elementary books of fiqh.</p>	<p>fiqh yang banyak diajarkan, yaitu: Taqrib, Safinah an-Najah, Fath al-Mu'in, Fath al-Qarib, dan Sullam at-Taufiq. Kecuali, Fath al-Mu'in, kitab-kitab tersebut merupakan kitab-kitab fiqh elementer.</p>
<p>PONDOK PESANTREN KYAI AGENG SELO: OTORITAS KEAGAMAAN, PEMBERDAYAAN EKONOMI, DAN PENDIDIKAN</p> <p>Soemanto</p>	
<p><i>This research was conducted using the qualitative approach. Data collection was done using in-depth interviews, participatory observation. This study aims at uncovering the religious, economic, and educational roles at Ki Ageng Selo Islamic Boarding School. In religious affairs, the boarding school has portrayed itself as a spiritual guide for the people. The interaction between the boarding school and the community in economic development spawned economic independence in the boarding school. Education developed was traditional (salafi) Islamic education focusing on religion teaching in order to preserve of salafi values both tafaqquh fi addin tradition and the culture.</i></p>	<p><i>Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif. Penelitian ini bertujuan mengungkap peran keagamaan, ekonomi, dan Pendidikan di Pondok Pesantren Ki Ageng Selo. Dalam hal keagamaan, pesantren ini telah memerankan diri sebagai pemandu spritual bagi masyarakat. Adanya interaksi antara pesantren dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi melahirkan pola kemandirian ekonomi di pesantren. Pendidikan yang dikembangkan berjenis Pendidikan salafiyah yang fokus pengajaran agamanya sehingga terjaga nilai-nilai kesalafiyahan baik tradisi tafaqquh fi addin maupun kulturalnya.</i></p>
<p>PERAN TEKNOLOGI INFORMASI (TI) DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI PESANTREN NURUL HARAMAIN NW (NUSA TENGGARA BARAT)</p> <p>Farida Hanun</p>	
<p><i>This study aims at describing the management of information and technology-based (IT) education system at Nurul Haramain NW Islamic boarding school, supporting factors and constraints in the use of IT, the impacts on IT use on the changing power of education system and absorption capacity of Islamic boarding school graduates. The research method used was the qualitative approach. The findings showed that a) Information Technology is an inseparable part of the integration system of science and technology and faith and piety, and as a grand strategy in the education and teaching programs of Nurul Haramain NW Islamic boarding school integrally and holistically, b) a supporting capacity factor of IT implementation is the strong role of clerics in developing IT mastery as: facilitators, motivators, accelerators and common users, and c) the impacts on IT utilization provide significant values to the advancement of the education system at the Islamic boarding school and as an important component in the education system.</i></p>	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan sistem Pendidikan berbasis teknologi dan informasi (TI) di pesantren Nurul Haramain NW, faktor penunjang dan kendala dalam menggunakan TI, dampak penggunaan TI terhadap daya ubah sistem Pendidikan dan daya serap output lulusan pesantren. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a) Teknologi Informasi sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari system integrasi IPTEK dan IMTAQ, dan sebagai grand strategik dalam program Pendidikan dan pengajaran di pesantren Nurul Haramain NW secara integral dan holistik, b) Faktor daya dukung terselenggaranya TI adalah peranan kiya yang kuat dalam pengembangan penguasaan TI yang berperan sebagai: fasilitator, motivator, accelerator dan common user, dan c) Dampak pemanfaatan TI memberikan nilai yang signifikan bagi kemajuan sistem Pendidikan di pesantren dan sebagai komponen penting dalam sistem Pendidikannya</i></p>

<p>PELAYANAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN PADA KOMUNITAS ANAK JALANAN KOTA MEDAN</p> <p>Faiqoh</p>	
<p><i>Every citizen has the right to education. There is no difference between one citizen and another. Citizens with physical, emotional, mental, intellectual and / or social disorders shall be entitled to special services. Ideally, street children get education access both general education and religious education. However, it is still unknown how street children acquire adequate education, especially religious education. Using a case study, this paper is intended to explore how religious education services are provided to street children in Medan.</i></p>	<p><i>Setiap warga berhak mendapat Pendidikan. Tidak ada perbedaan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan khusus. Idealnya anak jalanan mendapat pemenuhan Pendidikan baik Pendidikan umum maupun Pendidikan keagamaan. Namun, masih belum diketahui bagaimana anak jalanan memperoleh Pendidikan secara memadai, terlebih lagi Pendidikan keagamaan. Dengan menggunakan studi kasus, tulisan ini ingin menggali bagaimana pelayanan Pendidikan keagamaan diberikan kepada anak jalanan kota Medan.</i></p>
<p>PEMIKIRAN KEAGAMAAN MAHASISWA ISLAM PERGURUAN TINGGI UMUM NEGERI</p> <p>Suprpto</p>	
<p><i>This study focuses on how is religious thought of Muslim students in Public Colleges? Is it exclusive, inclusive, or liberal? And how far is the level of exclusivism, inclusivism or liberalism of their religious thoughts? The research findings showed that religious thoughts of Muslim students in Public Colleges tended to be exclusive and inclusive. The tendency of their religious thought was more strongly influenced by religious thoughts and activities at intra-campus organizations. The implication was religious guidance for Muslim students of Public Colleges, particularly those studying about Islamic Education, needed to consider the tendency of religious thought of Muslim students, especially from curriculum preparation aspects and religion learning models.</i></p>	<p><i>Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran keagamaan mahasiswa Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) Negeri, apakah eksklusif, inklusif, ataukah liberal? Dan seberapa jauh tingkat eksklusivisme, inklusivisme, atau liberalisme berpikir keagamaan mereka? Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran keagamaan mahasiswa Islam PTU Negeri cenderung eksklusif dan inklusif. Kecenderungan berpikir keagamaan mereka lebih kuat dipengaruhi oleh aktivitas dan pemikiran keagamaan di intra kampus. Implikasinya, pembinaan keagamaan bagi mahasiswa Islam PTU Negeri khususnya perkuliahan Pendidikan Agama Islam perlu mempertimbangkan kecenderungan pemikiran keagamaan mahasiswa Islam, terutama dari aspek penyusunan kurikulum dan model-model pembelajaran agama.</i></p>

PENELITIAN EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT JARAK JAUH (DJJ)

Hayadin

This study aims at determining the context, input, process and output of distance education and training organized by the Ministry of Religious Affairs since 2009. This study used the survey method at research sites covering Jakarta education and training center, Bandung education and training center, Surabaya education and training center, Semarang education and training center, Denpasar education and training center, Banjarmasin education and training center, Makassar education and training center, Padang education and training center, Palembang education and training center and Medan education and training center. The data collection was done by interviews, questionnaires, observations, and study of documents. The study concluded that distance education and training of technical personnel conducted since 2009 at 4 education and training centers and in 2010 at the entire education and training centers (12 education and training centers) have contributed to three things: a). Increasing the number of education and training participants, b). Providing ICT competencies to lecturers and staff of education and training centers to be on-line tutors and administrators of distance education and training, and c). Providing Virtual Learning Environment (VLE), hardware and software in the form of internet websites with contents that support the distance learning.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konteks, input, proses dan output penyelenggaraan diklat jarak jauh yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI sejak tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode survei, pada lokasi penelitian yang meliputi balai diklat Jakarta, balai diklat Bandung, balai diklat Surabaya, balai diklat Semarang, balai diklat Denpasar, balai diklat Banjarmasin, balai diklat Makassar, balai diklat Padang, balai diklat Palembang dan balai diklat Medan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, angket, observasi, dan studi dokumen. Penelitian menyimpulkan bahwa penyelenggaraan diklat jarak jauh tenaga teknis dilaksanakan sejak tahun 2009 pada 4 balai diklat dan pada tahun 2010 pada seluruh balai diklat (12 BDK) telah memberikan kontribusi terhadap tiga hal, yaitu: a). Meningkatkan jumlah peserta diklat; b). Memberikan kompetensi TIK kepada widyaiswara dan staf balai diklat untuk menjadi tutor on-line dan administrator diklat-jarak jauh; dan c). Menyediakan Virtual Learning Environment (VLE), hardware dan software dalam bentuk web-site internet dengan content yang mendukung pembelajaran jarak jauh.

STUDI EKSPERIMEN: PENGARUH STRATEGI PEMBELAJARAN DAN MINAT BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR FIQIH

Lisa'diyah Ma'rifatani

This study aims at examining the effect of Cooperative learning strategies and competitive learning strategies to improve student learning outcomes in Fiqh subject associated with student interest. The research method used is experimental method with a 2x2 factorial design, the population target of which is the entire students of State Islamic Junior High Schools (MTsN) in East Jakarta. The findings of this study are: first, as a whole, the Fiqh learning outcomes of students treated using the Cooperative learning were higher than those treated using the competitive learning. Second, for students who have a high interest in learning, the Fiqh learning outcomes of students treated using the

Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh strategi pembelajaran kooperatif dan strategi pembelajaran kompetitif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Fiqh dikaitkan dengan minat belajar siswa. Metode penelitian yang dipakai adalah Eksperimen dengan desain faktorial 2x2, populasi targetnya adalah seluruh siswa MTs Negeri se-Jakarta Timur. Temuan dari hasil studi ini ditemukan: pertama, Secara keseluruhan, hasil belajar Fiqih siswa yang diberi perlakuan Pembelajaran kooperatif lebih tinggi dari hasil belajar Fiqih siswa yang diberi pembelajaran kompetitif. Kedua, siswa yang memiliki minat belajar tinggi, hasil belajar Fiqih bagi siswa

Cooperative learning were higher than those treated using the competitive learning. Third, for students who have low interest in learning, the Fiqh learning outcomes of students treated using the competitive learning were higher than those treated using the Cooperative learning. Fourth, There was an interaction effect between the Cooperative learning and the competitive learning and students' interest in learning (high and low) to the Fiqh learning outcomes of students.

yang diberi perlakuan Pembelajaran kooperatif lebih tinggi dari siswa yang diberi pembelajaran kompetitif. Ketiga, siswa yang memiliki minat belajar rendah, hasil belajar Fiqh bagi siswa yang diberi pembelajaran kompetitif, lebih tinggi dari yang diberi perlakuan Pembelajaran kooperatif. Keempat, Terdapat pengaruh interaksi antara Pembelajaran kooperatif dan kompetitif learning dengan minat belajar (tinggi dan rendah) terhadap hasil belajar Fiqh siswa.

PENDIDIKAN AGAMA ALTERNATIF: STUDI KASUS SEKOLAH ALAM NURUL ISLAM YOGYAKARTA

Wahid Khozin

In the current age of information, it is increasingly difficult to find a moral bulwark for students who are unsurprisingly still in the developmental age. Some experts indicate that the last bulwark is in religious education. However, religious education yet still receives criticism, excessively oriented to knowledge that has not been able to substantially change the behavior of students in accordance with the religious education they have learned. In the context of taking the religious education closer to the behavior of students in the society, alternative religious education could be an option of solution. In this regard, this is what Sekolah Alam Nurul Islam (Nurul Islam Natural School) of Yogyakarta provides, which is to integrate religious education into other subjects.

Di era informasi seperti sekarang ini semakin sulit menemukan benteng moral bagi anak didik yang nota bene masih dalam usia perkembangan. Beberapa ahli mensinyalir bahwa benteng terakhir berada pada pendidikan agama. Namun, pendidikan agama toh masih mendapat kritik, yang terlalu berorientasi pada pengetahuan sehingga belum banyak bisa mengubah perilaku peserta didik sesuai dengan pendidikan agama yang diperolehnya. Dalam konteks mendekatkan antara pendidikan agama dengan perilaku peserta didik dalam masyarakat maka pendidikan agama alternatif bisa menjadi pilihan sebagai solusi. Dan ini yang dilakukan Sekolah Alam Nurul Islam Yogyakarta yaitu dengan mengintegrasikan pendidikan agama ke dalam mata pelajaran lainnya.

BUILDING PEACE GENERATION: HOW THE ISLAMIC VALUES OF PEACE TO BE EDUCATED IN INDONESIA

Ayi Yunus Rusyana

Dalam dua tahun terakhir, Indonesia mengalami masalah yang sangat kompleks berhubungan dengan kekerasan yang terjadi di dalam masyarakat. Anak-anak atau remaja biasanya menjadi korban konflik dan kekerasan tersebut. Sayangnya, problem ini telah diasosiasikan dengan ajaran Islam sejak peristiwa bom Bali pada tahun 2001 dan 2002 yang melibatkan beberapa pesantren dan siswa muslim. "Peace Generation" (PG), yang didirikan di Bandung-Jawa Barat, telah mengembangkan program pendidikan perdamaian yang kreatif yang didasarkan kepada ajaran Islam. Komunitas ini telah memproduksi beberapa seri modul yang disebut

For the two last decades, Indonesia has experienced a critical problem related to violence amongst its citizens. Children or young people usually become the victims of the conflict and violence. Unfortunately, this problem has been associated with Islamic teaching since the Bali Bombings in 2001 and 2002 involving some Pesantren (Islamic Schools) and Islamic students. "Peace Generation" (PG), founded in Bandung, West Java, has been developing a creative peace education program based on Islamic teaching. It has produced a unique series of modules, entitled "12 Basic Values of Peace," which are taught in Islamic schools as well as youth communities.

dengan “12 Nilai Perdamaian” yang diajarkan di sekolah Islam dan komunitas remaja lainnya. Selain itu, Peace Generation telah menciptakan beberapa program dalam rangka menyebarkan nilai-nilai dasar perdamaian. Respon dari beberapa siswa menunjukkan bahwa program ini telah diimplementasikan dengan sukses. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa Islam dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam menyebarkan nilai-nilai perdamaian jika kita mengembangkan ajaran Islam dengan cara yang kreatif.

In addition, Peace Generation has created some great programs to disseminate Islamic values of peace. The responses of students show that this program has been successfully implemented. Therefore, we can see that Islam is able to play a significant role in spreading the values of peace if we develop Islamic teaching in creative ways.

HUBUNGAN ANTARA KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU AGAMA DENGAN MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR SISWA DI SMP PGRI CIBINONG

Masruro

This study used the descriptive analytic method with the survey technique, which took place in May and June 2012 at SMP (Junior High School) PGRI 1 Cibinong, Bogor District. This study population was students of grade VIII of SMP PGRI 1 Cibinong, Bogor District, amounting to 426 students. Samples taken were 20% of the population numbered 86 students, using the proportional sampling cluster technique. From the results of correlation analysis using the Kendall Tau-b formula, it is shown that most teacher pedagogical competence variables (X), which include sub-variables of mastery of learning theory and principles of educating (X_1), ability to conduct educational learning (X_2), ability to facilitate potential development of students (X_3), ability to communicate effectively, empathetically and politely with students (X_4), and ability to conduct assessment and evaluation process and learning outcomes (X_5), are significantly correlated with the students' motivation variables (Y_1). Only one sub-variable, namely the implementation of curriculum development PAI (X_6), is not significantly correlated positively with students' learning motivation (Y_1). Teacher pedagogical competence (X) is not significantly associated with student achievement in general positively (Y_2), but significantly correlated with learning achievement sub-variable, namely as the formative achievement ($Y_{2.1}$).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan teknik survei yang berlangsung pada bulan Mei sampai Juni 2012 di SMP PGRI 1 Cibinong, Kabupaten Bogor. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP PGRI 1 Cibinong, Kabupaten Bogor yang semuanya berjumlah 426 orang. Sampel diambil sebanyak 20% dari populasi sehingga terdapat 86 orang dengan menggunakan teknik cluster proportional sampling. Dari hasil analisis korelasi menggunakan rumus Tau-b Kendall menunjukkan sebagian besar variabel kompetensi pedagogik guru (X) yang meliputi sub variabel penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip mendidik (X_1), kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik (X_2), kemampuan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik (X_3), kemampuan berkomunikasi efektif, empatik dan santun dengan peserta didik (X_4), dan kemampuan menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar (X_5) berhubungan nyata dengan variabel motivasi belajar siswa (Y_1). Hanya satu sub variabel, yaitu implementasi pengembangan kurikulum PAI (X_6) yang tidak berhubungan nyata positif dengan motivasi belajar siswa (Y_1). Kompetensi pedagogik guru (X) tidak berhubungan secara nyata positif dengan prestasi belajar siswa secara umum (Y_2), namun berhubungan nyata positif dengan sub variabel prestasi belajar yaitu prestasi formatif ($Y_{2.1}$).

KESIAPAN MADRASAH DALAM PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Nurudin

The purpose of this study is to determine: 1) local government policies in the implementation of 12-year compulsory education, 2) policies of the Ministry of Religious Affairs on the implementation of 12-year compulsory education in Madrasah Aliyah (Islamic Senior High School) and 3) the readiness of Islamic Senior High School in infrastructure, financial, and educational staff aspects of 12-year compulsory education. This study used the qualitative approach with a policy analysis. Data sources were obtained and collected from interviews, observation and documentation. The findings included: completion of 9-year compulsory education at Elementary School/ Islamic Elementary School and Junior High School / Islamic Junior High School in Districts / Cities of the study target areas completed, except for a small portion of areas whose GER and NER have not met 95% as pilot program requirements of 12-year compulsory education. Policies of Provincial, District, and City Governments have largely led to the pilot program of 12-year compulsory education. Meanwhile, the policies of the Ministry of Religious Affairs had not prepared the regulatory device, either regulations, guidelines or other technical guidance related to the pilot program of 12-year compulsory education in Islamic Senior High School. The aspect of the availability of infrastructure and facilities in Public Islamic Senior High School is adequate and appropriate to the national standards, whereas most Private Islamic Senior High School does not meet minimum standards based on the standardized infrastructure and facilities. Meanwhile, for the financing aspect, no balance between revenue and expenditure is yet found, especially at Private Islamic Senior High School annually.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) kebijakan Pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan wajib belajar 12 Tahun, 2) kebijakan Kementerian Agama terhadap pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Madrasah Aliyah dan 3) kesiapan Madrasah Aliyah dalam aspek sarana-prasarana, pembiayaan, dan tenaga kependidikan dalam program wajib belajar 12 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan (policy analysis). Sumber data digali dan dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan antara lain: Penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten/ Kota pada daerah sasaran penelitian telah tuntas, kecuali sebagian kecil daerah yang APK dan APM belum memenuhi 95% sebagai sarat rintisan program wajib belajar 12 tahun. Kebijakan Pemda Propinsi, Kabupaten, dan Kota sebagian besar telah mengarah pada rintisan program wajib belajar 12 tahun. Sedangkan kebijakan Kementerian Agama belum menyiapkan perangkat regulasi, baik peraturan, pedoman, dan petunjuk teknis lainnya terkait rintisan program wajib belajar 12 tahun di madrasah Aliyah. Pada aspek ketersediaan sarana prasarana di MAN telah memadai dan sesuai standar nasional, sebaliknya di madrasah swasta sebagian besar belum memenuhi standar minimum berdasarkan standar sarana prasarana. Dan pada aspek pembiayaan belum terjadi keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran khususnya pada madrasah swasta dalam setiap tahunnya.

KOMPETENSI KEPALA MADRASAH ALIYAH

Umul Hidayati

The purpose of this study is to determine the competence of heads of Madrasah Aliyah (Islamic Senior High Schools), which includes five competencies, namely Personality Competence, Managerial Competence, Supervision Competence, Entrepreneurial Competence and Social

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi Kepala Madrasah Aliyah yang mencakup lima kompetensi yaitu Kompetensi Kepribadian, Manajerial, Supervisi, Kewirausahaan dan Sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan survei yang dilakukan di enam propinsi yaitu:

<p><i>Competence. This study used the survey approach in six provinces, namely: Banten, Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta and East Java. The findings show that the competence of heads of Madrasah Aliyah (Islamic Senior High Schools) is included in sufficient category with a mean score of 3.8, or about 76% meets the NES. Of the five circumstances, the social competence is the best competence with a score of 4.1 or 82% meets the NES and the entrepreneurial competence is the worst competence with a score of 3.5 or 70% which meets the National Education Standards (NES).</i></p>	<p><i>Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi kepala Madrasah Aliyah termasuk kategori cukup dengan rerata skor 3.8 atau sekitar 76% memenuhi SNP. Dari lima kompetensi tersebut, kompetensi sosial merupakan kompetensi terbaik dengan skor 4.1 atau 82% memenuhi SNP dan kompetensi kewirausahaan merupakan kompetensi paling kurang baik dengan skor 3.5 atau 70% memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP).</i></p>
<p>REFORMULASI PARADIGMA KAJIAN KEISLAMAN DI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) Saifullah</p>	
<p><i>In the midst of highly rapid social changes, currently the PTAIs /IAINs are facing various problems. On one hand, the PTAIs / IAINs are in crucial period of their development, while on the other hand, the PTAIs are also at the intersection between: 1) various scientific traditions, 2) state and civil society, and, 3) science and religious education and general studies. Therefore, in the face of these issues, PTAI must seek to respond to the existing challenges and the need to reformulate a new paradigm in accordance with the needs of society, which rest on three main pillars, namely independency in management or autonomy, accountability and quality assurance, and with reference to the Three Responsibilities of Higher Education: education / teaching, community service and research. This paper tries to describe how PTAI provides efforts in response to changes in the surrounding and any attempt to do by PTAI in accordance with the global market demands while characterizing the Islamic professionalism.</i></p>	<p><i>Di tengah perubahan sosial masyarakat yang begitu cepat, saat ini PTAI/IAIN dihadapkan pada berbagai persoalan. Satu sisi PTAI/IAIN berada pada periode sangat menentukan dalam perkembangannya; sementara di lain pihak PTAI juga berada pada titik temu antara: 1) berbagai tradisi ilmiah, 2) negara dan masyarakat sipil, dan, 3) ilmu pengetahuan dan pendidikan agama serta ilmu pengetahuan umum. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan tersebut, PTAI mesti berupaya merespon tantangan yang ada dan perlunya mereformulasikan kembali paradigma baru sesuai kebutuhan masyarakat yang bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu kemandirian dalam pengelolaan atau otonomi, akuntabilitas (accountability) dan jaminan mutu (quality assurance), serta dengan mengacu kepada Tridharma Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan/pengajaran, pengabdian masyarakat dan penelitian. Tulisan ini berusaha mendeskripsikan bagaimana upaya PTAI dalam merespon perubahan yang terjadi sekitarnya dan upaya apa saja yang harus dilakukan PTAI sesuai dengan tuntutan pasar global dan tetap mencirikan profesionalitas keislaman-nya.</i></p>
<p>ORIENTASI PENDIDIKAN PESANTREN SALAFIYAH: STUDI KASUS PESANTREN BENDA KEREK CIREBON Ta'rif</p>	
<p><i>Pesantren is the oldest educational institution in Indonesia, which is also a subculture that has been fused and colored to the patterns of social life of religious affairs, nation and state in Indonesia.</i></p>	<p><i>Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang juga merupakan subkultur yang telah menyatu dan mewarnai corak kehidupan sosial keagamaan, berbangsa dan bernegara di</i></p>

Over the time, many pesantrens are transforming themselves. The teaching methods, culture and even pesantren orientation are shifting together with the flow of changing times. The presence of these changes is expected to continue to address the needs of schools and the increasingly complex problems of the people. However, unlike the case of Benda Kerep Islamic Boarding School, a pesantren located at Benda Kerep Block, Argasunya Village, Harja Mukti Sub-district, Cirebon City, West Java. In the middle of the swift current of changes, this pesantren remains committed and defended the noble values and the past traditions. Changes hardly occur either in social, cultural, religious, and learning method aspects. External system changes do not change the existing education traditions and systems. Even the caregivers, using the legitimacy of the pesantren's founders try desperately to maintain the traditions as an advantage and uniqueness.

Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak pesantren yang kemudian mengalami transformasi diri. Metode pengajaran, kultur, bahkan orientasi pesantren bergeser mengikuti arus perubahan zaman. Melalui perubahan ini diharapkan kehadiran pesantren dapat senantiasa menjawab kebutuhan dan problematika umat yang semakin kompleks. Namun demikian, berbeda halnya dengan Pondok Pesantren Benda Kerep, sebuah pesantren yang berlokasi di Blok Benda Kerep Desa Argasunya, Kecamatan Harja Mukti – Kota Cirebon Jawa Barat. Di tengah derasnya arus perubahan, pesantren ini tetap istiqamah mempertahankan nilai-nilai luhur dan tradisi masa lalu. Perubahan hampir tidak terjadi baik dalam kehidupan sosial, kultural keagamaan, serta metode pembelajarannya. Perubahan sistem di luar tidak serta merubah tradisi dan sistem pendidikan yang ada. Bahkan para pengasuh, dengan menggunakan legitimasi wasiat para pendiri pesantren, berupaya sekuat tenaga mempertahankan tradisi tersebut sebagai sebuah kelebihan dan keunikan tersendiri.

UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN HJ. HANIAH MAROS SULAWESI SELATAN

A. Muin

The purpose of this paper is to reveal how the quality of education in this Islamic boarding school is, particularly related to education facilities, curriculum and strategies of education quality improvements. This study used the qualitative method. Findings of this study are: first, education infrastructure and facilities are relatively complete and adequate, which are supported by the atmosphere of the Islamic boarding school that is full of simplicity and modesty by habituation in implementing clean and healthy lifestyle. Second, the tafaqquh fi-al din (understanding of religion)-based curriculum compiled by the Islamic boarding school occupies the same degree (equal) to the curriculum prepared by the Ministry of Religious Affairs, so that both tafaqquh fi-al din (understanding of religion) studies and general studies have high electability, which is able to increase the quality of education and also generates interest and motivation of the people (parents) to put their children to the Islamic boarding school. Third, education in the Islamic boarding school has a strong independency because it is supported by substantial financial resources.

Tujuan tulisan ini untuk mengungkapkan bagaimana mutu pendidikan di pondok pesantren ini, khususnya berkaitan dengan sarana pendidikan, kurikulum dan strategi peningkatan mutu pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil Temuan studi ini adalah: Pertama, sarana dan fasilitas pendidikan relatif lengkap dan memadai, ini didukung oleh suasana kehidupan pondok pesantren yang penuh kesederhanaan dan kebersahajaan dengan pembiasaan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kedua, kurikulum yang berbasis tafaqquh fi-al din yang disusun oleh pondok pesantren ini menempati derajat yang sama (equal) dengan kurikulum yang disusun Kementerian Agama, sehingga baik kajian tafaqquh fi al-din maupun pelajaran umum memiliki electabilitas yang tinggi, hal ini mampu meningkatkan mutu pendidikan dan sekaligus membangkitkan animo dan motivasi masyarakat (orangtua) untuk memasukkan anaknya ke pesantren ini. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren ini memiliki kemandirian yang kuat, karena didukung oleh sumber dana yang besar.

INDEKS MITRA BESTARI

Azyumardi Azra, Prof., Dr., MA.

Muhaimin AG, Dr. H.

Muhammad Hisyam, Prof., Dr., MA

M. Bambang Pranowo, Prof., Dr., MA

INDEKS PENULIS

A

Amrusi Jailani, Imam. Menggagas IAIN Sebagai Pusat Keunggulan. Volume 8 No. 3 September-Desember 2010.

Arifin, Syamsul. Pesantren dan Mobilitas Sosial dalam Perspektif Teoretik. Volume 8 Nomor 1 Januari - April 2010.

B

Baidhawiy, Zakiyuddin. Pendidikan Multikultural untuk Pengembangan Masyarakat Madani di Pesantren: Studi Kasus Pesantren Modern As-Salam. Volume 8 No. 3 September-Desember 2010.

F

Faiqoh. Pelayanan Pendidikan Keagamaan pada Komunitas Anak Jalanan Kota Medan. Volume 10 No. 1 Januari – April 2012

H

Hanum, Farida. Penerapan Meta Analisis untuk Mengukur Pengaruh Strategi Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Siswa. Volume 8 Nomor 1 Januari - April 2010.

----- . Peran Teknologi Informasi (TI) dalam Sistem Pendidikan di Pesantren Nurul Haramain. Volume 10 No. 1 Januari – April 2012

Hasan Basri, Husen. Pesantren Zainul Hasan Genggong: Dinamisasi Pendidikan Berbasis Salafiyah Kultural. Volume 9 No. 1 Januari-April 2011

----- . Pengajaran Kitab-Kitab Fiqh di Pesantren. Volume 10 No. 1 Januari – April 2012

Hayadin. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kemampuan Baca Tulis al-Qur'an. Volume 9 No. 1 Januari-April 2011

----- . Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh. Volume 10 No. 1 Januari – April 2012

Hidayati, Ummul. Kompetensi Kepala Madrasah Aliyah. Volume 10 No. 2 Mei – Agustus 2012

I

Idris, Moh. Pembaruan PTAI (STAIN/IAIN) Menuju UIN (Perspektif Pemikiran Pendidikan A. Malik Fadjar). Volume 8 No. 2 Mei-Agustus 2010.

J

Djamaluddin. Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (MTs-SA) di PP. Miftahul Ulum I Sampang Jawa-Timur. Volume 8 No. 3 September-Desember 2010.

K

Kadir dan Mi'raj. Kinerja Guru dan Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah Di MTsN 2 Pamulang. Volume 8 Nomor 1 Januari - April 2010.

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. Pesantren Pusat Peradaban Muslim: Pengalaman Indonesia untuk Asia Tenggara. Volume 8 No. 2 Mei-Agustus 2010

Khazin, Wahid. Pemberdayaan Ekonomi Pesantren: Studi Kasus Pesantren Nurul Mursyidah Pandeglang. Volume 9 No. 1 Januari-April 2011

----- . Pendidikan Agama Alternatif : Studi Kasus Sekolah Alam Nurul Islam Yogyakarta. Volume 10 No. 2 Mei – Agustus 2012

M

Ma'rifatini, Lisa'diyah. Pengaruh Strategi Pembelajaran dan Minat Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Fiqh. Volume 10 No. 1 Januari – April 2012

Masruro. Hubungan Antara Kompetensi Pedagogik Guru PA dengan Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa di SMP PGRI 1 Cibinong. Volume 10 No. 2 Mei – Agustus 2012

Masykhur, Anis. Ke Arah Desain Pendidikan di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Perbatasan Kalimantan Timur [Indonesia] – Malaysia. Volume 8 Nomor 1 Januari - April 2010.

Muin, Abd. Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (MTs-SA) Pesantren Nurul Huda Tangerang. Volume 8 No. 2 Mei-Agustus 2010

_____. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pesantren. Volume 9 No. 1 Januari-April 2011

_____. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di Pondok Pesantren Hj. Haniah Maros Sulawesi Selatan. Volume 10 No. 2 Mei – Agustus 2012

Munawiroh. Pengaruh Kemampuan Membaca al-Qur'an dan Konsep Diri Siswa terhadap Hasil belajar Aqidah Akhlak. Volume 9 No. 1 Januari-April 2011

Murtadho, Muhammad. Pesantren Salaf dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Volume 10 No. 1 Januari – April 2012

N

Nurudin. Proses Kebijakan Pendidikan Gratis Pasca Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kabupaten Banyuwangi. Volume 8 No. 2 Mei-Agustus 2010

_____. Kesiapan Madrasah dalam Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Volume 10 No. 2 Mei – Agustus 2012

Nurhattati Fuad. Pendidikan Berbasis Masyarakat: Studi Kasus di Pondok Pesantren al-Itifaq Bandung. Volume 8 No. 3 September-Desember 2010.

Q

Qomar, Mujamil. Pengembangan Sistem Pendidikan Pesantren dalam Perubahan Sosial. Volume 8 Nomor 1 Januari - April 2010.

R

Rohman, M & Deden S Ridwan. Pendidikan Sex dalam Tradisi Pesantren: Telaah di

Pesantren Salafi Bani Syafi'i. Volume 9 No. 1 Januari-April 2011

S

Saifulloh. Reformulasi Paradigma Kajian Keislaman di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Volume 10 No. 2 Mei – Agustus 2012

Salmah, Sri. Pendidikan Agama bagi Waria melalui Pesantren: Kasus Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. Volume 8 Nomor 1 Januari - April 2010.

Saputro, Endi. *Ngelmu Laku Tumrap Liyan*: Pesantren Muslim Kultural dan Peradaban Multikultural di Indonesia. Volume 8 No. 3 September-Desember 2010.

Soemanto. Pondok Pesantren Kyai Ageng Selo: Otoritas Keagamaan, Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan. Volume 10 No. 1 Januari – April 2012

Suprpto. Program Sertifikasi Guru dan Kompetensi Pedagogik GPAI. Volume 8 Nomor 1 Januari - April 2010.

----- . Pemikiran Keagamaan Mahasiswa Islam Perguruan Tinggi Umum Negeri. Volume 10 No. 1 Januari – April 2012

T

Ta'rif. Orientasi Pendidikan Pesantren Salafiyah: Studi Kasus Pesantren Benda Kerep Cirebon. Volume 10 No. 2 Mei – Agustus 2012

Y

Yasid, Abu. Pendidikan Tinggi di Pesantren: Studi Kasus Ma'had 'Ali Situbondo. Volume 8 No. 2 Mei-Agustus 2010

Yunus Rusyana, Ayi. *Buliding Peace Generation: How The Islamic Values of Peace to be Educated In Indonesia*. Volume 10 No. 2 Mei – Agustus 2012

